



BUPATI PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2005 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik sendiri;
 - b. bahwa untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

DAN

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2005 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan ;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan

daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan daerah.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
13. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
14. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pasal 2

Sistematika RPJP Daerah terdiri dari:

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Analisis Isu-Isu Strategis
- d. Visi dan Misi Daerah
- e. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- f. Kaidah Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJP daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan
- (2) Kondisi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari kondisi umum daerah, tantangan daerah dan prediksi kondisi umum daerah

Pasal 4

- (1) Visi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah Kabupaten Pacitan Yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera yang Menjunjung Nilai-nilai Agama dan Budaya;
- (2) Keberhasilan pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan misi pembangunan yang terdiri dari :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (AgroIndustri), Kelautan dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil;
4. Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya;
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pasal 6

Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut :

- a. Misi Pertama, Pembangunan Pendidikan, Pembangunan Kesehatan, Pembangunan Kependudukan, Pembangunan

Ketenagakerjaan, Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Pembangunan dan Pemantapan Jatidiri Bangsa, Penanggulangan Kemiskinan, Pembangunan Kehidupan Beragama, dan Pengembangan Kebudayaan;

- b. Misi Kedua, Penguatan Struktur Perekonomian, Penguatan Struktur Industri, Revitalisasi Pertanian, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Investasi dan Perdagangan, Peningkatan Daya Saing Pariwisata, Peningkatan Daya Saing Industri, Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dan Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan dan Perbankan;
- c. Misi Ketiga, Pembangunan Transportasi, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Wilayah, Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi,;
- d. Misi Keempat, Penyempurnaan Struktur Politik, Peningkatan Kualitas Proses Politik, Peningkatan Peranan Komunikasi dan Informasi, Penataan Peran Pemerintah dan Masyarakat, Pembangunan Keamanan dan Ketertiban;
- e. Misi Kelima, Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) Terbarukan, Pendayagunaan Sumber Daya Alam Tak-Terbarukan, Pengembangan Energi, Pemantapan Kawasan Lindung, Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Peningkatan Konservasi di Kawasan Budidaya, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH, Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan, dan Penanganan Bencana;
- f. Misi Keenam, Pembangunan Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Politik, Pembangunan Komunikasi dan Informasi, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur, Pembangunan Keuangan Daerah

Pasal 7

Periodesasi pelaksanaan RPJP Daerah terbagi dalam empat tahapan, yaitu :

- a. Tahap Pertama (2006-2011);
- b. Tahap Kedua (2011-2016);
- c. Tahap Ketiga (2016-2021);
- d. Tahap Keempat (2021-2026).

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN PACITAN

Pasal 8

- (1) Program Pembangunan Kabupaten Pacitan periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah dan RTRW Kabupaten yang merupakan satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penjabaran dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
- (3) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai matra ruang RPJPD Kabupaten untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan dalam perodesasi yang telah ditentukan.

Pasal 9

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (2) RPJMD Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD Kabupaten untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD Kabupaten yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

Pasal 11

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten yang memuat visi, misi dan Program Bupati.

- (2) RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) RPJP Daerah dapat dievaluasi kembali setiap 5 tahun.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : 7 - 3 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2005-2025

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, melalui tahapan penyusunan adalah sebagai berikut : pertama, penyusunan rancangan awal RPJP Daerah, kedua, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, ketiga, perumusan rancangan akhir RPJP Daerah dan keempat, penetapan RPJPD.

Maksud disusunnya RPJP Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 adalah menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif dengan jangka dua puluh tahunan yang memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahunan yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan RPJP Daerah adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang berdasar pada karakteristik Kabupaten Pacitan, sinergis, koordinatif dan *austainable* dalam pelaksanaan serta terarah menuju Masyarakat Kabupaten Pacitan yang diidamkan 20 tahun ke depan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Cukup jelas

Pasal 2

: Cukup jelas

Pasal 3

: Cukup jelas

Pasal 4

: Cukup jelas

Pasal 5

: Cukup jelas

Pasal 6

: Cukup jelas

Pasal 7

: Cukup jelas

Pasal 8

: Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Program pembangunan adalah uraian secara umum tentang arah kebijakan pembangunan.

Ayat (2)

: Cukup jelas

Pasal 10

: Cukup jelas

Pasal 11

: Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJPD Daerah dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Ayat (2)

: Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 13

: Cukup jelas

Pasal 14

: Cukup jelas

: Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PACITAN

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL : 7 - 3 - 2011

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
1.5. Maksud dan Tujuan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-29
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-40
2.5. Gambaran Tata Ruang Wilayah	II-70
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Pemasalahan Pembangunan	III-1
3.2. Isu Strategis	III-4
3.3. Prediksi Kondisi Umum Daerah	III-6
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1. Visi	IV-1
4.2. Misi	IV-4
4.3. Tujuan dan Sasaran	IV-7
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	V-1
5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Untuk Masing-Masing Misi	V-1
5.2. Pendanaan Pembangunan Daerah	V-11
5.3. Tahapan dan Prioritas	V-18
BAB VI Kaidah PELAKSANAAN	VI-1
6.1. Kaidah	VI-1
6.2. Prasyarat	VI-3

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Luas Kawasan Hutan Produksi	II-4
Tabel 2.2	Luas Kawasan Pertanian	II-5
Tabel 2.3	Bencana yang terjadi tahun 2006-2009	II-15
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006 – 2009	II-16
Tabel 2.5	Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006 – 2009	II-17
Tabel 2.6	Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2006 – 2009	II-18
Tabel 2.7	Perkembangan dan Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pacitan dan Jawa Timur Tahun 2002-2009	II-19
Tabel 2.8	Perkembangan dan Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pacitan dan Jawa Timur Tahun 2002-2009	II-19
Tabel 2.9	PDRB Perkapita Kabupaten Pacitan dan Jawa Timur Tahun 2002-2008	II-20
Tabel 2.10	Distribusi Sektoral PDRB Kabupaten Pacitan Tahun 2002 – 2009(%)	II-21
Tabel 2.11	Kontribusi per Sektor PDRB terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2002-2009 (%)	II-22
Tabel 2.12	Angka Melek Huruf per Kecamatan Tahun 2002-2007	II-23
Tabel 2.13	Rata-rata Lama Sekolah per Kecamatan Tahun 2002-2007	II-24
Tabel 2.14	Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2006 - 2009	II-25
Tabel 2.15	Skor PPH Kabupaten Pacitan Berdasarkan NBM Tahun 2006 – 2007	II-26
Tabel 2.16	Skor PPH Kabupaten Pacitan Berdasarkan NBM Tahun 2008-2009	II-27
Tabel 2.17	Jumlah dan Jenis Potensi Seni dan Budaya	II-27
Tabel 2.18	Perkembangan Penduduk Menurut Agamanya Tahun 2004-2009	II-28
Tabel 2.19	Perkembangan Tempat Peribadatan Tahun 2004-2009	II-29
Tabel 2.20	Perkembangan APK dan APM Tahun 2006-2009	II-29
Tabel 2.21	Rasio Murid/Guru Tahun 2005-2009	II-30
Tabel 2.22	Rasio Siswa/Sekolah Tahun 2005-2009	II-30
Tabel 2.23	Rasio Siswa/Kelas Tahun 2005-2009	II-31
Tabel 2.24	Rasio Kelas/Guru Tahun 2005-2009	II-31
Tabel 2.25	Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Balita Tahun 2006 – 2009	II-32
Tabel 2.26	Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan Tahun 2002 – 2009	II-33

Tabel 2.27	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2005-2009	II-34
Tabel 2.28	Jumlah UMKM Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2009	II-34
Tabel 2.29	Perkembangan Industri Tahun 2006-2009	II-35
Tabel 2.30	Perkembangan Investasi Tahun 2004-2009	II-36
Tabel 2.31	Struktur Pegawai Menurut Golongan	II-37
Tabel 2.32	Struktur Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-38
Tabel 2.33	Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah	II-39
Tabel 2.34	Luas Sawah Berdasarkan Jenis Irigasi	II-41
Tabel 2.35	Perkembangan Luas Areal, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2002-2009	II-41
Tabel 2.36	Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produksi Jagung Tahun 2002-2009	II-42
Tabel 2.37	Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2002-2009	II-43
Tabel 2.38	Luas Lahan dan Produksi Kelapa Tahun 2002-2009	II-43
Tabel 2.39	Luas Areal dan Produksi Cengkeh Tahun 2002-2009	II-44
Tabel 2.40	Populasi Temak Tahun 2006-2009	II-45
Tabel 2.41	Perkembangan Produksi Laut Tahun 2006-2009	II-46
Tabel 2.42	Jumlah Nelayan dan Alat Tangkap Tahun 2006-2009	II-47
Tabel 2.43	Data Luas Tegakan Hutan Rakyat dan Lahan Kritis di Kabupaten Pacitan 2006 - 2009	II-48
Tabel 2.44	Potensi Kehutanan Tahun 2006 – 2009	II-48
Tabel 2.45	Potensi Pariwisata	II-49
Tabel 2.46	Perkembangan Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Tahun 2002-2009	II-50
Tabel 2.47	Penggolongan Potensi Tambang Tahun 2006 - 2009	II-52
Tabel 2.48	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2006 - 2009	II-54
Tabel 2.49	Target dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2006 - 2009	II-55
Tabel 2.50	Perkembangan Kondisi Permukiman Tahun 2006-2009	II-56
Tabel 2.51	Perkembangan Kondisi Parameter Kebersihan di Kabupaten Pacitan	II-56
Tabel 2.52	Kondisi Keterlayanan Air Bersih di Kabupaten Pacitan	II-58
Tabel 2.53	Jumlah Pelanggan, Produksi dan Nilai Produksi PDAM Tahun 2003-2008	II-58
Tabel 2.54	Panjang Jalan di Kabupaten Pacitan	II-59
Tabel 2.55	Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Poros Desa Tahun 2006-2009	II-60
Tabel 2.56	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan Tahun 2006-2009	II-62
Tabel 2.57	Perkembangan Jaringan Listrik Tahun 2006-2009	II-62
Tabel 2.58	Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Jenis Tarif Tahun 2003-2008	II-63

Tabel 2.59	Data Dusun Yang Belum Terjangkau Jaringan Listrik	II-63
Tabel 2.60	Banyaknya Satuan Sambungan Telepon (SST) dan Warfel Tahun 2003-2008	II-67
Tabel 2.61	Daftar Gangguan Ketantraman dan Keterjiban Umum Yang Dilaporkan Tahun 2006-2009	II-68
Tabel 2.62	Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Pacitan	II-68
Tabel 2.63	Rasio Ketergantungan Tahun 2005 s/d 2009	II-70
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro dan Kondisi Makro Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2026	III-8
Tabel 5.1	Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi 1	V-2
Tabel 5.2	Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi II	V-4
Tabel 5.3	Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi III	V-6
Tabel 5.4	Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi V	V-9
Tabel 6.5	Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi VI	V-11

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Pacitan	11-1

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul Grafik	Halaman
Grafik 2.1	Perkembangan Laju Inflasi PDRB Tahun 2006-2009	II-23
Grafik 2.2	Perkembangan IPM Tahun 2006-2009	II-25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan dari 189 negara anggota PBB sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium. Deklarasi itu berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi delapan tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)* yang hendak dicapai sampai tahun 2015 oleh bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Tujuan pertama adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan (United Nations, 2005).

Konsep penanggulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari pelaksanaan mandat UUD 1945 yang diterjemahkan ke dalam berbagai agenda pembangunan negara. Dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan menetapkan target-targetnya yang sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* atau *MDGs*). Keterkaitan berbagai agenda pembangunan tersebut diharapkan dapat lebih memfokuskan upaya pencapaian target penanggulangan kemiskinan agar dapat dipercepat.

Diberiakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan landasan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, menjadikan Kabupaten Pacitan menerima banyak limpahan urusan yang lebih luas untuk menyeienggarakan pemerintahan dan kebijaksanaan pembangunan secara otonom.

Menyadari banyaknya pelimpahan urusan sesuai dengan mandat otonomi daerah serta berbagai keterbatasan yang ada, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan memberlakukan paradigma pembangunan yang lebih menegaskan bahwa pembangunan harus dilaksanakan oleh tiga pelaku ekonomi, yaitu: masyarakat, swasta dan pemerintah. Oleh karena itu, hal mutiak yang perlu dilakukan adalah memperkuat sinergitas tiga pelaku ekonomi tersebut dalam kesamaan tujuan pembangunan, yaitu: mengefektifkan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya dalam jangkauan jangka panjang yang mengarah pada peningkatan keberdayaan masyarakat menuju sejahtera lahir dan batin.

Penerapan otonomi daerah mestinya dapat diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun karena sifatnya tergolong relatif baru, maka wajar apabila masih dijumpai banyak kendala. Menyikapi kondisi tersebut diperlukan visi yang mengarah kepada tindakan yang penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pacitan, termasuk di dalamnya masyarakat yang diharapkan dapat lebih berperan sebagai subyek dan pelaku pembangunan.

Berkenaan dengan kondisi tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah memerlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk (*guidance*) dan penentu arah pembangunan, serta dengan cara bagaimana pemerintahan dan pembangunan semestinya dilakukan. Kebijakan itu diwujudkan dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang mencakup periode waktu selama 20 tahun (tahun 2005 hingga 2025). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tersebut terdiri atas empat rencana jangka menengah yang masing-masing mencakup periode waktu lima tahunan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah ini sangat diperlukan karena merupakan yang pertama disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Dokumen ini mencakup perencanaan periode tahun 2005 sampai dengan 2025.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2005–2025 lebih menekankan pada pendekatan makro, holistik dan fleksibel, agar dapat mengantisipasi berbagai dampak dari beriangsungnya pembangunan Kabupaten Pacitan. Karena itu, proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, sehingga upaya yang dilakukan oleh setiap pelaku pembangunan dapat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak menuju cita-cita Kabupaten Pacitan. Untuk itu, maka perlu dilakukan pentahapan sebagai berikut :

- **Penyiapan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah**
Kegiatan ini dibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah**, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap rancangan RPJP Daerah.
- **Penyusunan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah**, yang dalam hal ini seluruh hasil Musrenbang menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJP Daerah, menjadi rancangan akhir RPJP Daerah.
- **Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah**, di bawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJP Daerah beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi peraturan daerah tentang RPJP Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025, adalah:

1. Landasan idiil Pancasila
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
3. Landasan operasional:
 - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- h) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- j) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- k) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - o) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - p) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - q) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4315);
 - r) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 - s) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- u) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- v) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028.

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan memperhatikan RPJPD Propinsi.

Adapun hubungan RPJP Daerah Kabupaten Pacitan dan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen RPJP Daerah Kabupaten Pacitan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Propinsi Jawa Timur.
- b. Dokumen RPJM Daerah Kabupaten Pacitan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Pacitan dan memperhatikan RPJM Nasional.
- c. Dokumen RPJP Daerah Kabupaten Pacitan berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5. Gambaran Tata Ruang Wilayah

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Permasalahan Pembangunan
- 3.2 Isu Strategis
- 3.3 Prediksi Kondisi Umum Daerah

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Tujuan dan Sasaran

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

- 5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Untuk Masing-Masing Misi
- 5.2 Pendanaan Pembangunan Daerah
- 5.3 Tahapan dan Prioritas

BAB VI. KAJIAN PELAKSANAAN

- 6.1 Kaidah
- 6.2 Prasyarat

4.1 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif dengan jangka dua puluh tahunan yang memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen di Kabupaten Pacitan (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (lima tahunan), sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan skala makro dalam waktu dua puluh tahunan, RPJPD ini mencakup rancangan arah kebijakan dari empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan skala makro perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, isi dan substansinya disusun dengan maksud:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan jangka panjang 2005-2025;
2. Menyediakan satuan pedoman berwawasan jangka panjang (20 tahun) untuk menentukan arah kebijakan jangka menengah pembangunan daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan pada kondisi riil dan perspektif ke depan;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai secara periodik (lima tahunan) setiap arah kebijakan jangka menengah sesuai dengan perkembangan hasil pembangunan yang dicapai.

Mendasarkan pada maksud di atas, tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Pacitan secara umum adalah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berdasar pada karakteristik Kabupaten Pacitan, sinergis, koordinatif dan sustainable dalam pelaksanaan serta terarah menuju Masyarakat Kabupaten Pacitan yang diidamkan 20 tahun ke depan. Sedangkan tujuan khusus adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kondisi umum Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir;
2. Memprediksi kondisi Kabupaten Pacitan sampai dengan tahun 2025;
3. Merumuskan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pacitan sampai tahun 2025;
4. Mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan untuk perencanaan pembangunan sampai tahun 2025.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

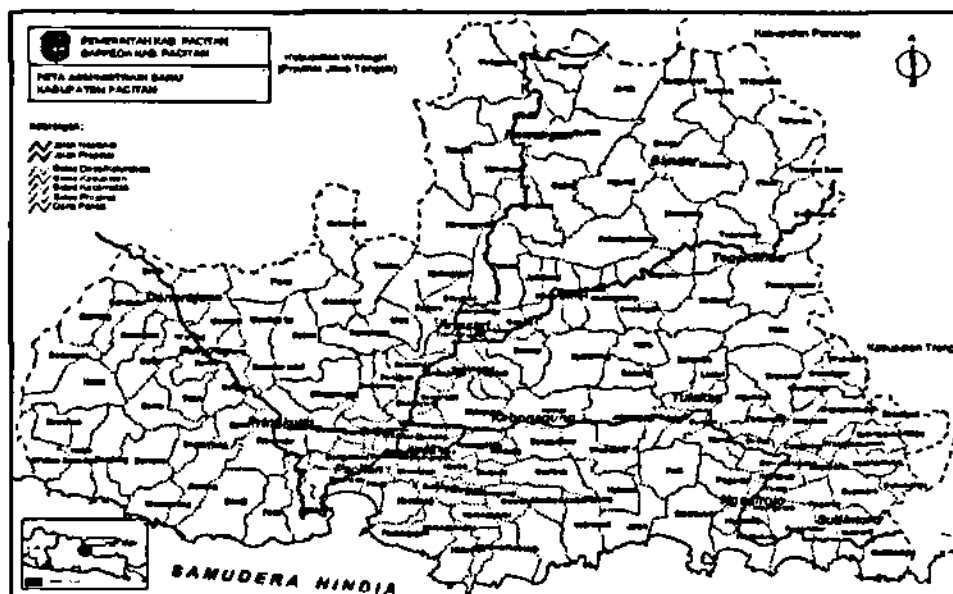
a. Kondisi Geografi

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan terletak di antara $07^{\circ} 55'$ - $08^{\circ} 17'$ Lintang Selatan 110° dan $55'$ - $111^{\circ} 25'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah $1.389,8716 \text{ Km}^2$ atau $138.987,16 \text{ Ha}$ yang sebagian besar berupa bukit, gunung, dan jurang terjal.

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Pacitan



Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu $161,61 \text{ Km}^2$ dan Kecamatan Tegalombo seluas $149,25 \text{ Km}^2$. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, dengan luas $71,86 \text{ Km}^2$.

Topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km² atau 4 % dari luas wiiayah Kabupaten Pacitan
2. Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan
3. Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km² atau 24 % dari luas wiiayah Kabupaten Pacitan
4. Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km² atau 52 % dari luas wiiayah Kabupaten Pacitan
5. Bergunung (kelas kelerengan > 62%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan

Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Januari dan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 581 mm³, suhu udara berkisar antara 22,6°C sampai dengan 32,1°C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%. Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Tanah ladang | : 21,51 % atau 29.890,58 ha |
| 2. Pemukiman Penduduk | : 02,27 % atau 3.153,33 ha |
| 3. Hutan | : 58,56 % atau 81.397 ha |
| 4. Sawah | : 09,36 % atau 13.014,26 ha |
| 5. Pesisir dan tanah kosong | : 08,29 % atau 11.530,99 ha |

Sementara itu rencana pola ruang bagi Kabupaten Pacitan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan klasifikasi peruntukan lahan sebagai berikut :

A. Kawasan Lindung terbagi atas beberapa kawasan berikut :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terdiri atas :
 1. Kawasan Hutan Lindung;
 - ii. Kawasan Karst.
2. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas :
 - i. Kawasan sempadan pantai;
 - ii. Kawasan sempadan sungai;

- iii. Kawasan sekitar mata air;
- iv. Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- 3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya
 - i. Kawasan Cagar Alam;
 - ii. Kawasan Cagar Budaya.
- 4. Kawasan Rawan Bencana Alam
 - i. Kawasan rawan gempa bumi;
 - ii. Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah;
 - iii. Kawasan gelombang pasang tsunami;
 - iv. Kawasan rawan banjir.
- 5. Kawasan lindung lainnya, terdiri atas :
 - i. Kawasan ruang terbuka hijau;
 - ii. Kawasan terumbu karang.
- B. Kawasan Budidaya, terdiri atas :
 - 1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - 2. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - 3. Kawasan peruntukan pertanian;
 - 4. Kawasan peruntukan perikanan;
 - 5. Kawasan peruntukan perikanan;
 - 6. Kawasan Peruntukan pertambangan;
 - 7. Kawasan peruntukan industri;
 - 8. Kawasan peruntukan pariwisata;
 - 9. Kawasan peruntukan permukiman;
 - 10. Kawasan peruntukan lainnya.

b. Potensi Pengembangan Wiiayah

Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Pacitan maka wiiayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi merupakan kawasan hutan di luar kawasan hutan lindung. Jenis kayu hutan di Kabupaten Pacitan terdiri dari kayu jati, mahoni, pinus, akasia, sanakeling, dan lain-lain. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, arahan lokasi yang digunakan untuk kawasan peruntukan hutan produksi hingga tahun 2023 adalah hutan produksi yang telah berkembang saat ini, yaitu seluas 1.484,39 ha (1,07% dari luas total wiiayah Kabupaten Pacitan), seperti pada tabel Luas Kawasan Hutan Produksi.

Perkembangan hutan produksi dapat dilakukan di tanah yang rusak/tandus. Pada kawasan tersebut diperbolehkan adanya kegiatan dan bangunan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsi perlindungan dibawahnya. Kemudian hutan produksi terbatas juga dikembangkan di kawasan karst.

Tabel 2.1
Luas Kawasan Hutan Produksi

No	Kecamatan	Hutan Produksi (Ha)	Persentase
1.	Donorojo	77,3	5.21%
2.	Punung	9,2	0.62%
3.	Pringkuku	377,1	25.40%
4.	Pacitan	241,75	16.29%
5.	Kebonagung	-	0.00%
6.	Arjosari	81,5	5.49%
7.	Tegalombo	41,1	2.77%
8.	Nawangan	212,74	14.33%
9.	Bandar	409,4	27.58%
10.	Tulakan	-	0.00%
11.	Ngadirojo	16,3	1.10%
12.	Sudinoro	18	1.21%
Total		1.484,39	100 %

Sumber: PT. Perhutani

2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Sebagian besar hutan yang ada di Kabupaten Pacitan merupakan hutan rakyat, namun demikian kawasan peruntukan hutan rakyat tersebut berada pada kelerengan > 40% yang pada umumnya dimanfaatkan untuk permukiman, pertanian, kebun/area hutan rakyat, maupun kegiatan budidaya yang lain. Kawasan dengan kemiringan > 40% yang merupakan hutan rakyat yaitu seluas 65.951 Ha (47,45% dari luas total Kabupaten Pacitan). Oleh karena itu, kawasan dengan kemiringan lereng > 40% ini memerlukan penanganan tersendiri (tidak mutlak menjadi hutan lindung, karena lahannya dimiliki masyarakat). Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan lokasi yang menyebar pada seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

3. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pacitan dengan luas 13.033 ha (9,38% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan), meliputi pertanian dengan pengairan menggunakan irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa/non PU, dan tadah hujan (tabel 5.7). Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi teknis berlokasi di Kecamatan Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Tulakan, dan Ngadirojo. Kawasan peruntukan pertanian yang

menggunakan irigasi setengah teknis berlokasi di Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Kawasan pertanian yang menggunakan irigasi sederhana berlokasi di Kecamatan Punung, Pringkuku, Pacitan, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi desa/non PU berlokasi di Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Kawasan yang menggunakan sawah tadah hujan berlokasi di Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Sesuai dengan Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan mengenai lahan pertanian berkelanjutan dengan kriteria:

1. Lahan beririgasi;
2. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak), dan / atau;
3. Lahan tidak beririgasi.

Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan berdasarkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan pada :

1. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. Lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan:

1. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. Lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

Tabel 2.2
Luas Kawasan Pertanian

No	Kecamatan	Luas Lahan Pertanian					
		Irigasi Teknis	Irigasi Setengah teknis	Irigasi Sederhana	Irigasi Desa/non PU	Tadah Hujan	Lainnya
1.	Donorojo	-	8	-	-	83	54
2.	Punung	105	55	32	-	562	-
3.	Pringkuku	-	57	95	11	319	-
4.	Pacitan	94	243	190	15	664	-
5.	Kebonagung	155	251	-	787	575	-

No	Kecamatan	Luas Lahan Pertanian					
		Irigasi Teknis	Irigasi Setengah teknis	Irigasi Sederhana	Irigasi Desa/non PU	Tadah Hujan	Lainnya
6.	Arjosari	246	303	86	-	240	-
7.	Tegalombo	137	187	165	-	728	-
8.	Nawangan	223	294	315	-	848	251
9.	Bandar	-	460	642	34	277	264
10.	Tulakan	157	102	325	15	828	353
11.	Ngadirojo	291	165	175	30	75	-
12.	Sudimoro	-	97	140	15	210	-
TOTAL		1.408	2.222	2.165	907	5.409	922

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan

Kawasan peruntukan pertanian tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu budidaya tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan, dan bio farmaka; budidaya, peruntukan peternakan; dan peruntukan perkebunan.

1. Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Buah-buahan, dan Bio Farmaka

Kawasan budidaya tanaman pangan dan hortikultura dikelompokkan menjadi : kelompok palawija, kelompok hortikultura/sayuran, kelompok pertanian padi sawah, kelompok buah-buahan, dan kelompok bio farmaka. Kawasan pengembangan palawija berada di lahan dataran rendah dengan kemiringan <15%. Sedangkan kawasan pengembangan tanaman sayuran berada di lahan dataran tinggi dengan kemiringan <15% dan berhawa sejuk. Kawasan budidaya pertanian padi sawah berada di dataran datar sampai berombak, yang memiliki sumber air mencukupi. Kelompok buah-buahan dan bio farmaka dikembangkan sesuai dengan kemampuan lahan.

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Tanaman pangan dan Hortikultura, Buah-buahan, dan Bio Farmaka adalah:

- a. Kecamatan Bandar, Nawangan, Tegalombo diunggulkan untuk pengembangan tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian, jambu biji, rambutan, melinjo, manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing, mangga, pisang, salak, sukun; jahe gajah (bio farmaka).
- a. Kecamatan Ngadirojo, Sudimoro diunggulkan untuk pengembangan tanaman melinjo, durian, dukuh, pepaya, jeruk jambu biji, rambutan, sawo, nanas, manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing, mangga, pisang, salak & sukun;
- b. Kecamatan Pacitan diunggulkan untuk pengembangan tanaman melinjo.

c. Kecamatan Punung, Donorojo, Pringkuku diunggulkan untuk pengembangan tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian, jambu biji, rambutan, melinjo, manggis, nangka, alpukat sirsak, belimbing, mangga, pisang, salak & sukun.

d. Kecamatan Kebonagung, Arjosari, Tulakan diunggulkan untuk pengembangan tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian, jambu biji, rambutan, melinjo, manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing.

2. Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan menyebar pada seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan. Kawasan peruntukan peternakan dikelompokkan menjadi dua kawasan pengembangan, yaitu kawasan pengembangan temak kerbau dan kawasan pengembangan temak sapi, kambing, dan domba.

Arahan pemilihan lokasi pengembangan kawasan temak kerbau adalah di lahan dataran rendah, topografi datar 0-8%, dekat sumber air dan banyak sumber hijauan pakan ternak. Daerah yang memenuhi kriteria tersebut adalah beberapa desa di Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Punung dan Kecamatan Pringkuku.

Arahan pemilihan lokasi pengembangan kawasan peternakan sapi, kambing, dan domba adalah di lahan kering, hawanya tidak terlalu panas, banyak sumber hijauan pakan ternak dan bukan daerah endemis antrax.

Daerah yang memenuhi kriteria tersebut adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan, kecuali Kelurahan Sidoharjo, Kelurahan Ploso dan Desa Kembang Kecamatan Pacitan, serta Desa Plumbungan Kecamatan Kebonagung.

3. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan menyebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan. Kawasan ini menempati lereng bergelombang hingga agak berbukit. Lokasi pengembangan kawasan perkebunan adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan. Komoditi perkebunan yang ada dan sangat prospektif untuk dikembangkan dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:

a. tanaman semusim: kapas,

b. tanaman tahunan: kelapa, panill, cengkeh, kopi, kakao.

Lokasi pengembangan kawasan perkebunan:

a. Kapas: Donorojo, Punung

- b. Kelapa, panili, getah pinus: Bandar, Ngadirojo
- c. Kelapa: Pacitan, Punung, Donorojo, Pringkuku, Kebonagung, Sudimoro, Arjosari
- d. Panili: Nawangan, Sudimoro Getah pinus: Nawangan, Tegalombo
- e. Cengkeh: Kebonagung, Tegalombo, Nawangan, Tulakan, Bandar, Ngadirojo, Sudimoro
- f. Kopi: Kebonagung, Nawangan, Bandar, Ngadirojo
- g. Kakao: Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo

4. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan tempat budidaya tambak, kolam, karamba, dan jaia apung. Arahan Pemilihan lokasi Kawasan Budidaya Perikanan Air Payau terletak di pesisir pantai dan bukan ekosistem hutan bakau. Sedangkan lokasi kawasan Budidaya Air Tawar terletak pada daerah yang mempunyai potensi air yang cukup untuk usaha budidaya, topografi datar, tekstur tanah halus, kualitas air baik.

Kawasan peruntukan perikanan berlokasi di sebagian wilayah Kecamatan Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro, Punung, Donorojo, Arjosari, Pringkuku, Tegalombo dan Bandar.

Pengembangan budidaya perikanan tambak juga dikembangkan disepanjang pantai Kabupaten Pacitan yang termasuk kedalam kawasan sempadan pantai yang termasuk kedalam daerah rawan tsunami. Sedangkan untuk wilayah tangkapan ikan laut terbagi atas dua kelompok wilayah, yaitu tangkapan ikan di wilayah perairan laut dangkal dan wilayah perairan laut dalam dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pacitan 4 mil laut.

5. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Potensi bahan tambang dan galian di Kabupaten Pacitan mencapai 85% dari luas Kabupaten Pacitan. Namun dengan tingginya persentase luasan kawasan lindung di Pacitan, menyebabkan terbatasnya lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan tambang. Kawasan peruntukan pertambangan meliputi pertambangan mineral dan pertambangan batu bara.

Pertambangan mineral meliputi:

- 1. Pertambangan mineral radioaktif, meliputi
 - a. Uranium di Kecamatan Tulakan.

2. Pertambangan mineral logam, meliputi:
 - a. Timah putih di Kecamatan Ngadirojo.
 - b. Nikel di Kecamatan Ngadirojo.
 - c. Timah hitam di Kecamatan Ngadirojo, Tulakan, Nawangan.
 - d. Tembaga di Kecamatan Pacitan, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo.
 - e. Seng di Kecamatan Ngadirojo, Tulakan, Tegalombo.
 - f. Emas di Kecamatan Ngadirojo, Tegalombo, Punung, Arjosari, Pringkuku, Nawangan, Tulakan, Bandar.
 - g. Pasir besi di Kecamatan Ngadirojo, Donorojo.
 - h. Batu besi di Kecamatan Kebonagung, Pacitan, Tegalombo.
3. Pertambangan mineral bukan logam, meliputi:
 - a. Mangan di Kecamatan Tegalombo, Nawangan, Bandar.
 - b. Batu gamping di Kecamatan Tulakan, Ngadirojo, Pacitan, Kebonagung, Sudimoro.
 - c. Dolomit di Kecamatan Kebonagung, Tulakan.
 - d. Gypsum di Kecamatan Tegalombo, Nawangan.
 - e. Bentonit di Kecamatan Donorojo, Punung, Tulakan, Pringkuku, Tegalombo.
 - f. Kalsit di Kecamatan Pringkuku, Punung, Donorojo.
 - g. Zeolit di Kecamatan Bandar.
 - h. Oker di Kecamatan Bandar, Tegalombo, Tulakan.
 - i. Fosfat di Kecamatan Donorojo, Pringkuku, Ngadirojo.
 - j. Pirophyllit di Kecamatan Arjosari, Nawangan.
 - k. Kaolin di Kecamatan Bandar, Punung, Tegalombo, Pringkuku, Arjosari.
 - l. Feldspar di Kecamatan Sudimoro, Pacitan, Tulakan, Punung, Arjosari.
 - m. Pasir kuarsa di Kecamatan Tegalombo, Ngadirojo, Donorojo, Pacitan.
 - n. Tosekl di Kecamatan Arjosari, Nawangan.
 - o. Ball clay di Kecamatan Punung, Kebonagung, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo.
 - p. Fosil kayu di sepanjang sungai di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
 - q. Rijang di Kecamatan Punung, Ngadirojo.
 - r. Kalsedon/agate di sepanjang sungai di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
 - s. Jasper di Kecamatan Donorojo, Tegalombo, Pacitan.
 - t. Kristal kuarsa di Kecamatan Nawangan.
 - u. Agat di Kecamatan Tegalombo.

4. Kawasan potensial pertambangan mineral batuan, meliputi:
 - a. Batu pasir di Kecamatan Arjosari.
 - b. Lempung (tanah liat) di Kecamatan Tegalombo, Tulakan, Pacitan, Kebonagung.
 - c. Batuan beku di Kecamatan Nawangan, Ngadirojo, Pacitan, Tulakan, Bandar.
 - d. Sirtu di sepanjang Sungai Grindulu, Brongkah, Pacitan, Watugaleng, Tumpuk, Guyangan, Lorok, Ngroto, Bawur.
 - e. Marmer di Kecamatan Tulakan Kebonagung, Sudimoro.
 - f. Trass di Kecamatan Kebonagung, Tulakan.
5. Pertambangan batu bara meliputi:
 - a. Batubara di Kecamatan Tulakan (Desa Jatigunung, Desa Gasang, dan Desa Kalikuning), Kebonagung (Desa Ketepung), Punung (Desa Mendolo Kidul).

6. Kawasan Peruntukan industri

industri yang prospektif dikembangkan di Kabupaten Pacitan adalah industri yang mendukung kegiatan pertanian (terutama di kawasan agropolitan), pariwisata, perikanan, pertambangan dan industri rumah tangga. Lokasi yang diperbolehkan untuk dibangun sebagai kawasan peruntukan industri adalah daerah yang memiliki kemiringan lereng sekitar 0-8% dari kecamatan-kecamatan berikut ini:

- a. Kecamatan Ngadirojo dan Sudimoro, dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang dan batik tulis.
- b. Kecamatan Donorojo dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang, produksi Batu Aji/Batu Mulia, dan industri gula merah, pengolahan hasil tambang.
- c. Kecamatan Punung dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang produksi mainan anak yang terbuat dari kayu jati, pengolahan hasil tambang.
- d. Kecamatan Kebonagung dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang, produksi keramik/gerabah seni dan industri gula merah
- e. Kecamatan Pacitan dan Ngadirojo dengan industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang, Batik Tulis, industri pengolahan ikan.

- f. Kecamatan Nawangan dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri pendukung hasil pertanian dan produksi sale pisang serta produksi anyaman bambu.
- g. Kecamatan Arjosari dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri pendukung hasil pertanian, pengolahan hasil tambang.

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan ini merupakan kawasan yang berpotensi wisata seperti obyek wisata pantai, goa, sejarah dan arkheologis, budaya, dan obyek wisata pemandian.

Rencana perwilayahan kawasan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah:

1. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) A

Pusat pelayanan terietak di Kecamatan Punung, dengan cakupan wiiayah Kecamatan Donorojo, Punung (bagian barat), Pringkuku (bagian barat). Dengan tema pengembangan wisata: "Kelautan dan Ekowisata Alam/Ekowisata Karst"

2. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) B

Pusat pelayanan terietak di Kecamatan Pacitan, dengan cakupan wilayah Kecamatan Pacitan, Punung (bagian timur), Pringkuku (bagian timur), Arjosari (bagian barat), Kebonagung (sebagian kecil wilayah barat).

Dengan tema pengembangan wisata "Kelautan, Budaya, dan Wisata Kota"

3. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) C

Pusat pelayanan terietak di Kecamatan Ngadirojo, dengan cakupan wiiayah Kecamatan Kebonagung, Sudimoro, Tegalombo (bagian selatan), Arjosari (bagian selatan dan timur), Tulakan, Ngadirojo, serta Pacitan (sebagian kecil wilayah timur). Dengan tema pengembangan wisata "Kelautan, Alam, dan Wisata Budaya".

4. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) D

Pusat pelayanan terietak di Kecamatan Nawangan, dengan cakupan wilayah Kecamatan Nawangan, Tegalombo (bagian utara), Bandar, dan Arjosari (bagian utara). Dengan tema pengembangan wisata "Benda-Benda Buatan Manusia, Wisata Sejarah, dan Agrowisata". Untuk jelasnya dapat dilihat peta Rencana Pengembangan Kawasan pariwisata.

8. Kawasan Peruntukan Permukiman

Rencana kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Pacitan saat ini berkembang mengikuti struktur jalan di Kabupaten Pacitan, dan diprediksikan akan tetap seperti itu permukiman dengan luas 16.253,31 ha (11,69% dari luas wiiayah Kabupaten Pacitan). Kawasan permukiman adalah suatu kawasan yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan kegiatan masyarakatnya. Arahan Pemilihan lokasi Kawasan Permukiman untuk Kabupaten Pacitan adalah memiliki bentuk wiiayah relatif datar (lereng<15%), tidak ada bahaya banjir, ada sumber air bersih dan terdapat sarana dan prasarana jalan.

Kecamatan yang diarahkan akan dikembangkan sebagai daerah permukiman hingga tahun 2028 adalah Kecamatan Pacitan, Kecamatan Sudimoro (dengan adanya kegiatan PLTU), serta lokasi sepanjang jalan Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Punung dan Kecamatan Ngadirojo. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pengembangan permukiman di sekitar permukiman yang telah ada.

Permukiman dibagi menjadi dua kelompok, yaitu permukiman pedesaan dan permukiman perkotaan. Permukiman perkotaan merupakan permukiman yang sebagian besar kegiatannya bukan pertanian dan ini terietak di Kecamatan Pacitan.

Permukiman lainnya selain Kecamatan Pacitan, saat ini merupakan permukiman pedesaan. Namun hingga tahun 2028 diperkirakan ada beberapa kecamatan yang permukimannya akan bergeser menjadi permukiman perkotaan, diantaranya adalah permukinan disepanjang jalur kolektor primer. Selain itu juga diperkirakan adanya desa-desa yang akan tumbuh pesat akibat adanya pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yaitu desa-desa yang dilalui oleh JLS.

Permukiman pedesaan sebagian besar tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan dengan pengelompokan skala kecil. Permukiman pedesaan yang tersebar di wiiayah Kabupaten Pacitan lokasinya menyebar yang disebabkan terbatasnya lahan di Kabupaten Pacitan yang dapat atau layak digunakan sebagai permukiman. Penyebaran lokasi permukiman pedesaan, juga menyebabkan permukiman pedesaan tidak dapat dilayani prasarana permukiman secara merata.

Pemenuhan pelayanan prasarana bagi permukiman pedesaan dilakukan dengan altematif penggunaan teknik yang lebih sederhana.

Hal lain yang perlu diperhatikan pada masa mendatang adalah, seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan, maka perlu penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal, terutama di kawasan perkotaan dan ibukota kecamatan.

9. Kawasan Peruntukan Lainnya

1. Kawasan Andalan

Merujuk pada RTRW Nasional, wilayah Madiun dan sekitarnya (termasuk didalamnya Kabupaten Pacitan) telah ditetapkan sebagai kawasan andalan nasional untuk Pertanian, Industri Pengolahan, Perikanan, Perkebunan, Pariwisata.

Dengan penetapan tersebut, maka berdasarkan potensi yang dimiliki dan peluang pengembangannya, kawasan andalan di Kabupaten Pacitan ditetapkan terdiri dari:

1. Kawasan andalan pertanian, meliputi kawasan peruntukan pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan dengan konsentrasi pada kawasan strategis ekonomi (kawasan agropolitan) di Kecamatan Nawangan dan Kecamatan Bandar. Kawasan andalan perikanan, meliputi kawasan peruntukan perikanan di Kecamatan Donorojo, Kecamatan Punung, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Bandar, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan Sudimoro dengan konsentrasi pada perikanan laut di Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan Sudimoro.
2. Kawasan andalan pariwisata, meliputi kawasan peruntukan pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi

KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) secara umum meliputi ruang udara di wilayah Kabupaten Pacitan. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan dijelaskan pada pasal 11, bahwa Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandar udara meliputi:

- a. kawasan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - f. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - g. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
- KKOP yang terkait dengan ruang wiiayah Kabupaten Pacitan yang dikemukakan tersebut akan mempengaruhi prinsip penetapan ketinggian bangunan maksimal di Kabupaten Pacitan.

c. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Samudera serta didominasi dengan perbukitan dan pegunungan, menyebabkan Kabupaten Pacitan menjadi salah satu kabupaten yang rawan terkena bencana alam baik banjir, tanah longsor, gempa bumi dan gelombang tsunami.

Kawasan lindung di Kabupaten Pacitan yang tergolong sebagai kawasan rawan bencana terbagi atas empat jenis kawasan yaitu : kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah, kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami, kawasan rawan banjir, dengan sebaran sebagai berikut :

1. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kabupaten Pacitan yang berada di atas lempeng India-Australia kondisinya saat ini sangat rapat karena mendapat tekanan dari lempeng Eropa-Asla. Berdasarkan kondisi tersebut maka seluruh wiiayah Kabupaten Pacitan termasuk kedalam kawasan rawan gempa bumi;

2. Kawasan Rawan Tanah Longsor/Gerakan Tanah

Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah di Kabupaten Pacitan merupakan daerah yang memiliki kemiringan lahan lebih dari 40% dan kawasan yang memiliki jenis tanah Redzina dan Litosol. Pada kawasan yang memiliki kriteria tersebut penggunaan lahan sedapat mungkin berupa hutan lindung/hutan rakyat

3. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Tsunami

Aapun kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana tsunami dan perlu diatur penggunaan lahannya adalah seluruh wiiayah pantai di bagian selatan Kabupaten Pacitan yang memiliki kemiringan landai dan juga

wilayah-wilayah yang dilalui oleh sungai-sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

4. Kawasan Rawan Banjir

Titik-titik rawan banjir di wilayah Kabupaten Pacitan sangat erat kaitannya dengan keberadaan sungai-sungai utama yang ada yaitu Sungai Baksoko, Sungai Lorog, Sungai Pagotan, Sungai Bawur dan terutama Sungai Grindulu. Daerah yang masuk kedalam kawasan rawan banjir adalah sebagian wilayah Kecamatan Arjosari, Pacitan dan Kebonagung.

Selama kurun waktu tahun 2006-2009 bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pacitan telah mengakibatkan berbagai kerusakan baik rumah penduduk maupun fasilitas umum. Secara lengkap bencana yang terjadi dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Bencana yang terjadi tahun 2006-2009

No	Tahun	Bencana Yang Terjadi	Kerusakan	Keterangan
1	2006	Gempa Bumi	Rumah dan Fasilitas Umum	
		Gempa bumi dan tsunami	Perahu nelayan milik warga dan 4 buah keramba ikan	Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo
		Tanah Longsor	- Rumah Rusak Berat : 26 buah - Rumah Rusak Ringan : 74 buah - Talud Jalan desa : 30 Lokasi	12 Kecamatan
		Kebakaran	- Rumah hangus terbakar (Rusak Berat) : 20 buah - Rumah terbakar sebagian (Rusak Ringan) : 1 buah.	Kab. Pacitan
		Kekeringan	Kekurangan air bersih	Sebagian Wilayah Kecamatan Pringkuku, Punung, dan Donorojo
2	2007	Tanah Longsor	- 385 rumah dan bangunan rusak - 1 bangunan masjid rusak - 1 talud pengamanan rumah roboh	
		Banjir	- 5 bangunan rumah rusak - 79 rumah rusak	Kecamatan Ngadirojo Kecamatan Arjosari
		Gempa Bumi	- 26 rumah dan 2 masjid rusak - 1 musholla dan 2 masjid rusak - 5 masjid dan 4 lokal kios pasar rusak	Kecamatan Tegalombo Kecamatan Bandar dan Nawangan Kecamatan Arjosari
		Angin puyuh/ hujan angin	kerusakan rumah dan bangunan masjid/musholla	Kecamatan Bandar, Nawangan, Tegalombo dan Punung
		Kebakaran	- Kerusakan pada rumah sebagian penduduk - Terbakarnya Pasar Baleharjo	12 Kecamatan
		Gelombang Pasang	- 1 tambak bandeng dan udang rusak - kerusakan 19 perahu dan jaring - tenggelamnya 5 kapal nelayan	Desa Hadiwamo Kecamatan Ngadirojo Kecamatan Sudimoro Kecamatan Punung
3	2008	Tanah Longsor	- 120 rumah dan bangunan rusak - 1 bangunan masjid rusak	
		Banjir	5 rumah rusak	Kecamatan Ngadirojo

No	Tahun	Bencana Yang Terjadi	Kerusakan	Keterangan
		Kebakaran	3 rumah penduduk rusak	Kecamatan Arjosari, Nawangan dan Kebonagung
		Angin puting bellung	74 rumah dan bangunan penduduk rusak	Kecamatan Tegalombo
4	2009	Tanah longsor	- 4 rumah dan bangunan rusak - 1 rumah dan bangunan rusak - 7 rumah dan bangunan rusak - 2 rumah dan bangunan rusak - 1 rumah dan bangunan rusak - 1 rumah dan bangunan rusak - 3 rumah dan bangunan rusak - 2 rumah dan bangunan rusak - 20 rumah dan bangunan rusak	Kec. Sudimoro Kec. Bandar Kec. Tulakan Kec. Pacitan Kec. Ngadirojo Kec. Punung Kec. Donorojo Kec. Kebonagung Kec. Tegalombo
		Kebakaran	- 2 rumah dan bangunan rusak - 2 rumah dan bangunan rusak - 1 rumah dan bangunan rusak - 1 rumah dan bangunan rusak - 1 rumah dan bangunan rusak - 2 rumah dan bangunan rusak	Kec. Bandar Kec. Tulakan Kec. Punung Kec. Arjosari Kec. Nawangan Kec. Kebonagung

Sumber : Bakesbangpolinmas Kab. Pacitan

d. Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan selama 4 Tahun terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006 - 2009

Usia (Tahun)	2006			2007			2008			2009 ^{*)}		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
0 - 4	11,010	15,358	27,286	17,588	17,435	35,024	17,813	18,238	34,101	18,240	10,148	35,394
5 - 9	18,344	21,028	37,370	24,082	10,482	42,544	20,263	10,884	40,127	23,917	20,211	44,128
10 - 14	28,815	28,825	51,940	22,907	21,811	44,208	22,688	22,358	45,054	28,400	20,430	88,830
0-14	53,966	63,000	118,578	64,248	67,520	121,774	60,774	58,508	118,282	64,568	58,788	128,858
%	26,71	21,53	21,18	28,81	28,86	21,83	22,18	20,88	21,81	85,48	20,80	22,86
15 - 19	22,283	21,304	46,647	10,203	10,788	36,088	23,884	18,987	39,671	17,840	16,827	34,373
20 - 24	17,088	17,441	34,837	15,030	14,908	30,838	13,058	13,275	26,373	13,192	12,988	28,750
25 - 29	17,842	18,208	36,047	16,770	16,432	35,202	12,401	18,340	30,831	14,513	20,838	35,045
30 - 34	17,082	21,402	38,844	14,881	16,470	31,531	15,247	17,248	32,408	15,578	20,374	35,050
35 - 39	21,410	27,133	48,543	22,188	24,321	48,508	21,913	24,368	48,978	21,187	28,802	46,968
40 - 44	21,518	22,870	44,007	20,883	22,803	43,408	21,400	24,408	45,808	21,904	21,108	43,013
45 - 49	22,244	24,083	46,327	22,014	22,301	44,408	21,044	18,508	30,983	20,824	22,122	42,950
50 - 54	18,282	18,033	33,108	17,185	18,787	33,022	17,803	21,128	34,928	18,453	18,008	33,462
55 - 59	15,150	12,903	28,083	18,088	18,447	30,840	18,187	17,801	34,088	18,588	18,008	31,803
60 - 64	8,827	10,371	10,998	13,513	10,077	24,400	10,873	13,004	23,987	8,882	16,020	25,381
15-64	180,854	102,534	373,008	177,718	101,080	354,788	175,850	184,841	358,981	186,068	185,414	354,510
%	88,79	68,84	67,88	89,04	44,21	64,62	84,13	88,18	84,63	88,69	38,17	88,44
65 ke atas	24,948	38,003	61,480	31,208	41,400	74,701	37,460	40,288	77,758	32,055	43,727	75,782
%	8,80	12,82	11,18	11,43	19,30	13,45	18,88	14,23	13,98	11,88	15,13	13,87
Jumlah	258,788	202,448	551,188	273,250	282,003	598,282	273,884	283,148	657,038	398,717	288,027	558,844
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

^{*)}Hasil estimasi

Berdasarkan data hasil estimasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, jumlah penduduk pertengahan tahun 2006 mencapai 551.155 jiwa dan pada tahun 2009 mencapai 558,644 jiwa atau mencatat rata-rata pertumbuhan sekitar 0,40% per tahun. Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) jumlahnya cenderung meningkat, dari sekitar 11,16 % dari total penduduk pada tahun 2006 menjadi sekitar 13,57 % pada tahun 2009. Hal serupa juga tampak pada penduduk kelompok umur anak-anak (0-14 tahun), proporsinya meningkat dari 21,15% dari total penduduk pada tahun 2006 menjadi sekitar 22,98 % pada tahun 2009.

Struktur penduduk menurut ketenagakerjaan dapat digolongkan berdasarkan pada penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat).

Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006 – 2009

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Pertanian (%)	194,347 61.87	256,875 69.82	238,402 65.01	223,601 59.92
2	industri (%)	52,761 16.80	20,939 5.69	36,423 9.93	45,500 12.19
3	Perdagangan, Hotel dan Restoran (%)	25,104 7.99	36,800 10.00	37,016 10.09	41,351 11.08
4	Jasa - jasa (%)	22,608 7.20	30,875 8.39	28,681 7.82	33,596 9.00
5	Lainnya **) (%)	19,285 6.14	22,401 6.09	26,214 7.15	29,094 7.80
	Jumlah (%)	314,105 100.00	367,890 100.00	366,736 100.00	373,142 100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian adalah yang terbesar, lebih dari dari separuh penduduk yang bekerja bertumpu pada sektor ini. Jika dibandingkan dengan lapangan usaha atau sektor ekonomi lain (seperti sektor Industri, Perdagangan dan Jasa-jasa), penduduk yang bekerja di sektor pertanian proporsinya cenderung sedikit menurun.

Sementara itu komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2006 – 2009

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Tidak/ Belum Sekolah, Tidak/ Belum Tamat SD/ MI (%)	168,495	214,602	237,847	230,601
		32.16	38.66	42.70	41.28
2	Tamat SD/ MI (%)	192,802	179,135	156,546	180,487
		36.80	32.27	28.10	32.31
3	SLTP (SMP/ MTs) (%)	99,202	86,575	83,004	87,880
		18.94	15.60	14.90	15.73
4	SLTA (SMU/ SMK/ MA) (%)	51,248	55,139	62,760	43,354
		9.78	9.93	11.27	7.76
5	D1 ke atas (D1/ O2/ O3/ O4/ PT) (%)	12,140	19,629	16,872	16,322
		2.32	3.54	3.03	2.92
Jumlah (%)		523,887 100.00	555,080 100.00	557,029 100.00	558,644 100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan PDRB Perkapita.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Dalam rentang waktu tahun 2001 sampai dengan 2006 terjadi trend penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan. Pada tahun 2001 tingkat kemiskinan mencapai 31,16% (164.638 jiwa) dan pada tahun 2006 turun menjadi 26,94% (148.097 jiwa), meskipun pada tahun 2004 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan yang signifikan yaitu mencapai 32,55% (176.190 jiwa). Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan pada tahun-tahun selanjutnya yaitu mencapai 24,01 % pada tahun 2005, pada tahun 2006 mencapai 26,94 %, terus menurun sampai 19,01 % pada tahun 2009. Sementara itu apabila dibandingkan dengan prosesntase penduduk miskin di tingkat Provinsi Jawa Timur maka tingkat kemiskinan Kabupaten Pacitan lebih tinggi dari tingkat kemiskinan di Jawa

Timur, dimana sebagian besar penduduk miskin berpusat pada sektor pertanian.

Perkembangan prosentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Perkembangan dan Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pacitan dan Jawa Timur Tahun 2002-2009

No	Tahun	Kabupaten Pacitan (%)	Jawa Timur (%)
1	2001	31,16	20,73
2	2002	30,65	20,34
3	2003	28,69	19,52
4	2004	32,55	19,10
5	2005	27,01	22,51
6	2006	26,94	19,89
7	2007	24,74	18,89
8	2008	21,17	18,51
9	2009	19,01	16,68

Sumber : BPS Kabupaten Pacitan dan BPS Propinsi Jawa Timur

Sementara itu apabila dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), maka sebenarnya TPT di Kabupaten Pacitan relatif rendah. Pada tahun 2002, TPT sebesar 3,58 (12.031 jiwa) dan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 trend TPT mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2007, TPT kembali turun dari pada tahun 2006, yaitu menjadi 6,91%. Untuk tahun-tahun selanjutnya TPT terus mengalami penurunan yaitu sebesar 2,72 % pada tahun 2007, 3,10 % pada tahun 2008 dan 1,32 % pada tahun 2009. Secara umum TPT di Kabupaten Pacitan lebih rendah daripada Jawa Timur. Salah satu faktornya adalah sebagian besar penduduk di Pacitan bekerja di sektor pertanian, sehingga TPT akan sulit untuk dihitung/tidak nampak secara jelas. Selain itu, TPT ini dihitung berdasarkan data pencari kerja saja. Sehingga belum sepenuhnya menggambarkan keadaan TPT yang sebenarnya.

Tabel 2.8
Perkembangan dan Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pacitan dan Jawa Timur Tahun 2002-2009

No	Tahun	Kabupaten Pacitan (%)	Jawa Timur (%)
1	2002	3,58	6,43
2	2003	4,95	8,68
3	2004	4,09	7,69
4	2005	5,53	8,51
5	2006	6,91	8,19
6	2007	2,72	6,79
7	2008	3,10	6,42
8	2009	1,32	5,08

Sumber : Pacitan Dalam Angka dan RPJMD Propinsi Jawa Timur 2009-2014

Sedangkan apabila diamati dari PDRB per-kapitanya, maka PDRB per Kapita Kabupaten Pacitan masih jauh tertinggal dari PDRB per kapita Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pacitan masih rendah dan termasuk dalam wilayah yang tertinggal di Jawa Timur. Meskipun selama tujuh tahun terakhir terjadi peningkatan PDRB per kapita yang signifikan, namun PDRB per kapita Kabupaten Pacitan masih jauh di bawah PDRB perkapita Jawa Timur. Pada tahun 2006, PDRB per kapita Pacitan sebesar Rp. 3.660.704,00, sedangkan PDRB per kapita Jawa Timur sudah mencapai Rp. 12.557.190,00, sedangkan pada tahun 2008 PDRB perkapita Pacitan mencapai 4.724.665,00 sedangkan PDRB Jawa Timur 16.760.000.00. Perkembangan dan perbandingan PDRB perkapita Kabupaten Pacitan dengan Provinsi Jawa Timur dapat diketahui dari tabel berikut :

Tabel 2.9
PDRB Perkapita Kabupaten Pacitan dan Jawa Timur
Tahun 2002-2008

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp.)	
		Kabupaten Pacitan	Jawa Timur
1	2002	2.600.100	7.435.410
2	2003	2.885.360	8.302.750
3	2004	3.142.520	9.301.340
4	2005	3.689.350	10.881.690
5	2006	3.660.704	12.803.000
6	2007	4.105.800	14.500.000
7	2008	4.724.665	16.760.000

Sumber : Pacitan Dalam Angka dan RPJMD Propinsi Jawa Timur 2009-2014

b. Pertumbuhan PDRB

Struktur perekonomian Kabupaten Pacitan pada dasarnya adalah berbasis agribisnis. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi Sektor Pertanian yang besar terhadap PDRB, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB. Selama kurun waktu delapan tahun terakhir terjadi fluktuasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, pada Tahun 2002 kontribusi sebesar 38,95% dan pada Tahun 2003 sedikit mengalami penurunan menjadi 38,49%. Akan tetapi, pada Tahun 2004 kontribusinya mengalami peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 42,49%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan produksi di seluruh sub sektor pertanian, namun pada tahun-tahun berikutnya mulai tahun 2005 sampai dengan 2009, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Distribusi Sektoral PDRB Kabupaten Pacitan
Tahun 2002 – 2009(%)

Uraian	Tahun							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1. Pertanian	38,95	38,49	42,49	41,94	41,26	40,48	39,34	39,93
2. Pertambangan dan Penggalian	3,54	3,54	4,66	4,67	4,67	4,70	4,64	4,65
3. Industri Pengolahan	3,72	3,78	3,71	3,79	3,90	4,02	4,05	3,91
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,67	0,78	0,73	0,83	0,95	1,01	1,04	1,07
5. Bangunan	7,48	7,43	7,56	7,74	7,89	8,09	8,41	8,69
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,83	10,88	10,15	10,15	10,25	10,52	10,88	11,14
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,14	6,16	5,92	5,79	5,67	5,57	5,68	5,70
8. Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan	8,46	8,43	8,42	8,38	8,34	8,37	8,34	8,25
9. Jasa-jasa	20,21	20,51	16,36	16,69	17,05	17,24	17,61	17,67

Sumber : Kabupaten Pacitan Dalam Angka, diolah

Pada urutan kedua sektor penyumbang PDRB terbesar adalah jasa-jasa. Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, sektor ini memiliki trend penurunan kontribusi terhadap PDRB. Pada tahun 2002 kontribusinya sebesar 20,21% dan pada Tahun 2006 kontribusinya sebesar 17,05%. Penurunan kontribusi ini salah satu penyebabnya adalah lambannya pertumbuhan sektor jasa-jasa. Minimnya investasi yang ada di Kabupaten Pacitan menyebabkan terhambatnya akselerasi kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Namun mulai tahun 2005 kontribusi sektor ini terhadap PDRB menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan sejalan dengan semakin meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Pacitan, berkembangnya industri kecil dan menengah serta UMKM.

Pada posisi ketiga penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Kontribusi sektor ini relatif stabil, yaitu pada kisaran 10% dan menembus angka 11, 14 % pada tahun 2009. Selain itu, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Bangunan juga memiliki kontribusi yang relatif stabil, yaitu pada kisaran 8% dan 7% dan menembus angka 8 % pada tahun 2009.

Jika diamati lebih lanjut, perekonomian Kabupaten Pacitan didominasi oleh sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian). Kontribusi sektor primer ini rata-rata kontribusinya terhadap PDRB selama delapan tahun terakhir 45%. Kemudian diikuti sektor tersier yang meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran, Sektor Pengangkutan dan komunikasi, Sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-

jasa. Sektor tersier ini dalam kurun waktu delapan tahun terakhir kontribusi rata-ratanya sekitar 41%. Sementara sektor sekunder memiliki kontribusi yang kecil. Belum berperannya sektor industri sebagai penopang sektor pertanian disebabkan terbatasnya investasi yang masuk ke Kabupaten Pacitan. Selain itu, kondisi infrastruktur penunjang seperti jalan dan system transportasi yang masih kurang mengakibatkan perekonomian Kabupaten Pacitan sulit berkembang.

Sedangkan kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan selama 8 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Kontribusi per Sektor PDRB terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2002-2009 (%)

Sektor	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
1. Pertanian	1,17	1,50	1,97	2,32	2,59	3,16	2,61	4,97
2. Tambang dan Penggalian	2,06	2,85	3,97	4,05	4,21	5,84	4,22	6,17
3. Industri Pengolahan	2,83	4,28	4,65	5,81	7,25	8,40	6,36	2,43
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	11,92	20,22	19,59	20,30	18,07	11,31	9,01	8,81
5. Bangunan	1,70	2,13	6,93	6,13	6,33	7,79	9,78	9,5
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,22	3,15	3,90	3,64	5,25	7,95	9,21	8,56
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2,62	2,94	3,20	1,44	2,15	3,18	7,80	6,38
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,89	2,37	2,78	3,14	3,79	5,51	5,15	4,99
9. Jasa-Jasa	2,42	4,24	5,16	5,73	6,57	6,33	7,82	6,41
Pertumbuhan Ekonomi	1,88	2,72	3,46	3,49	4,27	5,16	5,16	5,57

Sumber: Kabupaten Pacitan Dalam Angka, diolah

*) Angka Diperbaiki

***) Angka Sementara

Secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan masih di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Selama delapan tahun terakhir (2002-2009) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonominya sebesar 1,88% dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 4,27% dan pada tahun 2009 mencapai 5,57%. Sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi adalah Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih meskipun tingkat pertumbuhan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2002 tingkat pertumbuhannya sebesar 11,92% dan pada tahun 2008 tingkat pertumbuhannya sebesar 9,01%. Pertumbuhan yang tinggi di sektor ini dapat dijadikan penopang bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi sub sektor lainnya.

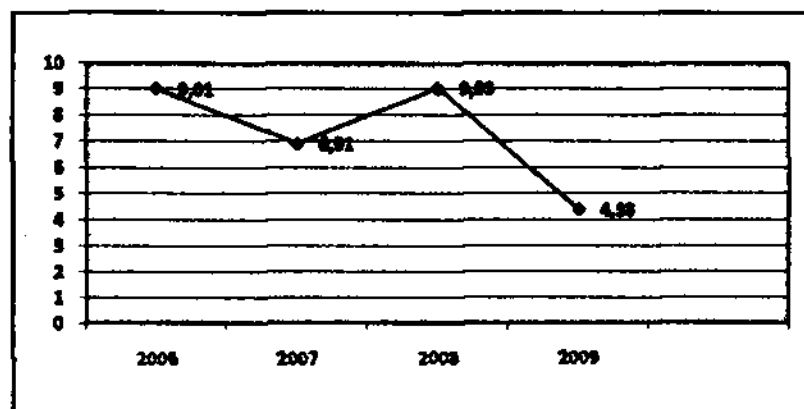
Ketersediaan energi (listrik & gas) dan air bersih merupakan salah satu syarat mutiak dalam menarik investor.

Sektor lainnya yang juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang relatif tinggi adalah Sektor Bangunan, Industri Pengolahan, dan Sektor Jasa-jasa. Sementara itu, Sektor pertanian yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB, laju pertumbuhannya masih lamban. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan pertumbuhannya yang masih di bawah 3% selama delapan tahun terakhir.

b. Laju Inflasi

Laju Inflasi dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK) dimana hanya harga barang dan jasa yang di konsumsi yang dihitung, indeks inflasi menggambarkan perubahan di tingkat produsen dengan menghilangkan faktor margin dan transportasi. Pada tahun 2008 angka laju inflasi mencapai angka tertinggi selama kurun waktu 4 (empat) tahun, hal ini disebabkan oleh krisis keuangan global sehingga mempengaruhi faktor-faktor ekonomi daerah. Berikut disajikan perkembangan laju inflasi tahun 2006 s.d 2009 sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.1
Perkembangan Laju Inflasi PDRBTahun 2006-2009



Sumber : BPS Kab. Pacitan

c. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf menurut kecamatan mulai tahun 2002-2007 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel. 2.12
Angka Melek Huruf per Kecamatan Tahun 2002-2007

No	Kecamatan	Tahun					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Donorojo	85,30	85,90	87,00	87,50	91,00	93,39
2	Punung	84,60	85,30	86,40	87,10	90,60	92,98
3	Pringkuku	84,00	84,60	85,70	86,10	89,60	91,95
4	Pacitan	90,50	91,50	92,70	93,50	97,30	99,85
5	Kebonagung	84,80	85,50	86,60	87,00	90,50	92,87

6	Arjosari	84,40	85,10	86,10	86,50	90,00	92,36
7	Nawangan	82,50	83,20	84,30	84,70	88,10	90,41
8	Bandar	81,70	82,30	83,30	83,60	87,00	89,28
9	Tegalombo	81,70	82,30	83,40	83,70	87,10	89,38
10	Tulakan	82,70	83,60	84,60	85,30	88,80	91,13
11	Ngadirojo	85,00	86,00	87,10	87,90	91,50	93,90
12	Sudimoro	81,00	81,60	82,60	82,90	86,30	88,56
Jml	Pacitan	83,70	81,60	82,60	85,70	89,20	91,54
	Jawa Timur		85,00	84,50	85,80	87,10	87,42

Sumber : BPS Kab. Pacitan

Sedangkan angka melek huruf Kabupaten Pacitan pada tahun 2008 adalah 91,54 dan pada tahun 2009 adalah 91,56. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur maka pada tahun 2003 sampai dengan 2005 angka melek huruf Kabupaten Pacitan lebih rendah dari angka melek huruf di Jawa Timur, sedangkan pada tahun 2006 sampai dengan 2007 angka melek huruf Pacitan lebih tinggi dari angka melek huruf Jawa Timur.

d. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menurut kecamatan muiai tahun 2002-2007 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Rata-rata Lama Sekolah per Kecamatan Tahun 2002-2007

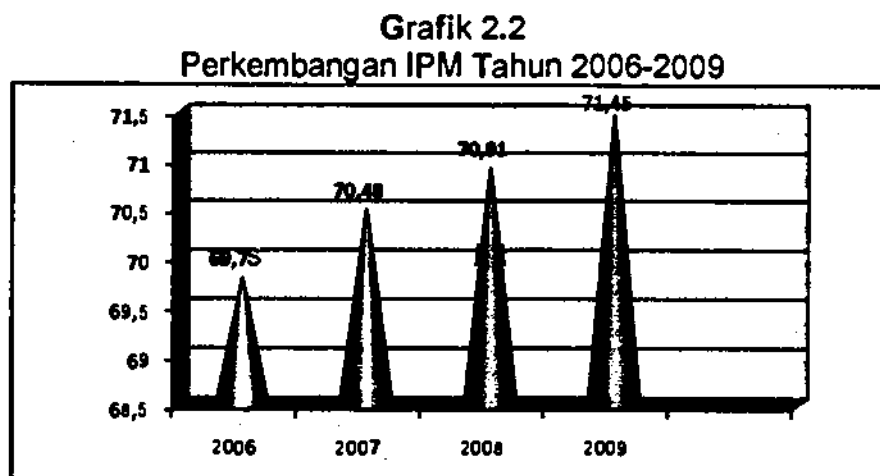
No	Kecamatan	Tahun					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Donorojo	6,00	6,10	6,50	6,80	7,40	7,43
2	Punung	5,80	5,90	6,10	6,30	6,80	6,83
3	Pringkuku	5,70	5,80	5,90	6,00	6,50	6,53
4	Pacitan	6,20	6,40	6,60	6,90	7,40	7,43
5	Kebonagung	5,70	5,80	6,00	6,20	6,70	6,73
6	Arjosari	5,60	5,80	5,90	6,20	6,70	6,73
7	Nawangan	5,40	5,50	5,60	5,70	6,20	6,23
8	Bandar	5,40	5,50	5,70	5,90	6,40	6,43
9	Tegalombo	5,50	5,60	5,70	5,80	6,30	6,33
10	Tulakan	5,70	5,80	6,10	6,50	7,00	7,03
11	Ngadirojo	5,80	6,10	6,50	6,80	7,40	7,43
12	Sudimoro	5,40	5,60	5,70	6,90	6,40	6,43
Jmi	Pacitan	6,00	6,20	6,20	6,10	6,00	6,63
	Jawa Timur		6,50	6,60	6,80	6,90	6,90

Sumber : BPS Kab. Pacitan

Sedangkan angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2008 adalah 6,63 tahun dan pada tahun 2009 adalah 6,71 tahun. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur maka pada tahun 2003 sampai dengan 2007 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pacitan lebih rendah dari angka melek huruf di Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih keras untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pacitan.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Pacitan terus mengalami kenaikan yang signifikan, hal tersebut tentunya semakin memberi gambaran bahwa kualitas pembangunan manusia semakin tahun semakin baik. Ini dapat dilihat dari data tahun 2006 yaitu sebesar 69.78, tahun 2007 meningkat menjadi 70.48, tahun 2008 meningkat lagi sebesar 70.91 dan di tahun 2009 kembali meningkat sebesar 71.45. Berikut perkembangan IPM Kabupaten Pacitan sebagaimana grafik dibawah ini :



Sumber : BPS Kab. Pacitan

f. Ketahanan Pangan

Kondisi ketahanan pangan disamping dapat dilihat dari aspek ketersediaan bahan pangan melalui data neraca bahan makanan, juga dapat dilihat dari aspek kecukupan energi yang menunjukkan kondisi Pola Pangan Harapan di suatu daerah.

Kondisi ketersediaan bahan pangan beserta konsumsinya pada tahun 2006-2009 dapat diketahui pada tabel Neraca Bahan Makanan (NBM) berikut :

Tabel 2.14
Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2006 - 2009

No	Komoditas	Tahun 2006			Tahun 2007			Tahun 2008			Tahun 2009		
		Ket	Kons	±	Ket	Kons	±	Ket	Kons	±	Ket	Kons	±
1	Beras	84,623	52,058	32,563	84,214	52,001	32,212	84,507	52,380	32,118	89,007	52,556	36,451
2	Jagung	80,465	3,553	82,901	00,720	3,548	87,170	123,080	3,570	120,404	106,984	3,587	103,307
3	Ubi jala	1,038	111	027	638	111	627	1,052	112	040	658	1,192	-636
4	Ubi kayu	400,038	8,590	401,430	520,018	8,502	523,327	578,523	0,841	571,882	540,808	8,882	534,146
5	Gula merah	10,850	171	10,070	10,860	171	10,680	10,871	172	10,608	11,083	172	10,801
6	Kacang tanah	12,087	380	11,701	10,048	380	0,064	11,548	380	11,150	10,507	390	10,117
7	Kedelai	4,540	5,810	-1,270	4,228	5,304	-1,575	4,715	5,647	-1,132	5,154	5,866	-712
2	Daging	1,609	2,687	-1,078	1,584	2,584	-1,101	1,700	2,704	-800	1,758	2,713	-857
9	Tehr	327	2,001	-2,684	320	2,087	-2,607	350	3,010	-2,660	354	3,010	-2,665
10	Ikan	1,920	7,840	-5,020	2,078	7,837	-4,850	3,252	7,605	-4,644	3,932	7,621	-3,980

Sumber : Dinas terkait diolah Kantor Ketahanan Pangan

- Ket : - Ket = ketersediaan
 - Kons = konsumsi
 - +/- = surplus/minus
 - Jumlah penduduk Tahun 2006 = 551.759 jiwa, tahun 2007 = 551.155 jiwa, tahun 2008 = 555.262 jiwa, tahun 2009 = 557.029 jiwa
 - Angka ketersediaan berdasarkan angka produksi yang telah diolah
 - Angka konsumsi berdasarkan Susenas tahun 2006 dikalikan jumlah penduduk
 - Untuk komoditas yang ketersediaannya surplus diarahkan ke sektor agribisnis (dijual, pengolahan hasil, industri)
 - Untuk komoditas yang ketersediaannya minus, perlu ditingkatkan produksinya

Berdasarkan Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Pacitan tahun 2006–2009, diketahui bahwa ketersediaan produksi per tahun komoditas beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gula merah, dan kacang tanah dibandingkan dengan angka konsumsi per tahun masih mengalami surplus. Sedangkan ketersediaan produksi untuk komoditas kedelai, daging, telur dan ikan masih lebih rendah dibandingkan dengan angka konsumsi. Akan tetapi jumlah ketersediaan produksi dibandingkan dengan angka konsumsi pada komoditas kedelai, daging, telur dan ikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun belum memenuhi dari konsumsi penduduk terhadap komoditas tersebut.

Sedangkan dari aspek kecukupan energi, berdasarkan tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa pada dasarnya Angka Kecukupan Energi (AKE) Kabupaten Pacitan tahun 2006 – 2009 sudah lebih dari standar yang ditetapkan. Akan tetapi skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencukupi nilai 100 sebagaimana standar yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena tingkat konsumsi bahan pangan di Kabupaten Pacitan yang tidak seimbang. Porsi energi terbanyak didapat dari konsumsi padi-padian dan umbi-umbian, sedangkan konsumsi pangan hewani masih relatif rendah. Secara lengkap skor PPH di Kabupaten Pacitan dapat diketahui dari tabel berikut :

Tabel 2. 15
Skor PPH Kabupaten Pacitan Berdasarkan NBM Tahun 2006 - 2007

No	Kelompok Bahan Pangan	Standar *)				2006				2007			
		Gr/Kap/hari	Energi (Kkal)	% AKE	PPH	Gr/Kap/hari	Energi (Kkal)	% AKE	PPH	Gr/Kap/hari	Energi (Kkal)	% AKE	PPH
1	Padi-padian	300	1,100	50	25.0	373	1,349	61	25.0	366	1,334	61	25.0
2	Umbi-umbian	110	132	6	2.5	265	346	16	2.5	277	362	17	2.5
3	Pangan hewani	165	264	12	24.0	27	35	2	3.2	23	32	2	2.9
4	Lemak dan minyak	22	220	10	5.9	27	245	11	5.0	36	321	15	5.0
5	Buah-biji berminyak	11	66	3	1.0	10	18	1	0.4	23	45	2	1.0
6	Kacang-kacangan	23	110	5	10.0	23	89	4	8.1	66	282	13	10.0
7	Gula	33	110	6	2.5	57	210	10	2.5	57	209	10	2.5
8	Sayur dan buah	275	132	6	30.0	329	206	9	30.0	350	212	10	30.0
9	Lainnya	0	66	3	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
	Jumlah	944	2,200	100	100.0	1,110	2,498	113	76.7	1,200	2,797	127	78.9

Tabel 2. 16

Skor PPH Kabupaten Pacitan Berdasarkan NBM Tahun 2008 - 2009

No	Kelompok Bahan Pangan	Standar *)				2008				2009			
		Gr/Kap/hari	Energi (Kkal)	% AKE	PPH	Gr/Kap/hari	Energi (Kkal)	% AKE	PPH	Gr/Kap/hari	Energi (Kkal)	% AKE	PPH
1	Padi-padien	300	1,100	50	25.0	374	1,353	52	25.0	378	1,370	62	25.0
2	Umbi-umbian	110	132	6	2.5	352	460	21	2.5	274	359	16	2.5
3	Pangan hewani	165	264	12	24.0	29	37	2	3.4	33	40	2	3.6
4	Lemak dan minyak	22	220	10	5.0	29	257	12	5.0	32	284	13	5.0
5	Buah/biji berminyak	11	66	3	1.0	10	15	1	0.4	10	18	1	0.4
6	Kacang-kacangan	25	110	5	10.0	60	258	12	10.0	70	298	14	10.0
7	Gula	33	110	5	2.5	57	210	10	2.5	56	207	9	2.5
8	Sayur dan buah	275	132	8	30.0	268	148	7	30.0	287	160	7	30.0
9	Lainnya	0	66	3	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
	Jumlah	944	2,200	100	100.0	1,175	2,739	124	78.8	1,139	2,736	124	79.0

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan

Ket: *) : AKE 2.200 Kkal/Kap/Hari

PPH : Pola Pangan Harapan

g. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga

Kabupaten Pacitan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Wonogiri yang termasuk salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, memiliki beraneka ragam budaya yang bersumber dari masyarakat dan alamnya. Keanekaragaman budaya tersebut menjadi mempunyai daya tarik dan berpotensi bagi dunia kepariwisataan daerah. Kekayaan budaya dan wisata yang dimiliki Kabupaten Pacitan seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Jumlah dan Jenis Potensi Seni dan Budaya

No.	Jenis/Budaya Pariwisata	Jenis	Jumlah
A.	Seni Tradisional/Daerah		
	1. Seni Pertunjukan Rakyat	- Wayang Orang - Ketoprak - Sandiwara - Jaranan - Teater	1 Group 1 Group 1 Group 28 Group
	2. Sanggar Seni	- Tradisional/Modem - Seni Tari - Seni Karawitan - Seni Rupa/Lukis - Seni Etnik - Modeling dan Dekorasi - Rias Pengantin	12 Group 8 Buah 4 Buah 3 Buah 1 Buah 1 Buah 38 Buah
	3. Seni Pedalangan	- Dalang Wayang Kulit - Dalang Wayang Beber - Waranggono/Sinden	115 Orang 1 Orang 28 Orang
	4. Musik Tradisional	- Oglor - Slawatan - Hadrah - Campursari	41 Group 27 Group 8 Group 5 Group
B.	Seni Unggulan	- Upacara Adat - Tad Kethek Ogleng - Tari Eklek - Tari Senterewe	9 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok

C.	Kesenian Nasional	- Orkes Melayu/dangdut - Orker Keroncong - Band	6 group 5 group 24 group
D.	Kepurbakalaan	- Bangunan Museum - Situs/Prasejarah	1 buah 360 lokasi
E.	Himpunan Penghayat Kepercayaan	- Himpunan Penghayat Kepercayaan	3 kelompok
F.	Pariwisata	- Wisata alam/pantai - Wisata Goa - Wisata Spriritual - Wisata Sejarah - Wisata Budaya	9 Pantai 8 Goa 5 Makam 5 Buah 5 Buah

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Pacitan, diolah

Dibidang kepemudaan dan olah raga dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga di daerah. Pemuda sebagai generasi penerus harus mampu menunjukkan eksisitensinya melalui berbagai prestasi di semua bidang pengetahuan. Sedangkan untuk olah raga perlu digali olahragawan dan cabang olahraga daerah yang menonjol dan berprestasi untuk dikembangkan sehingga dapat mengangkat nama baik daerah. Untuk meningkatkan prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda melalui even seleksi pemuda berprestasi. Sedangkan untuk meningkatkan prestasi olah raga dilakukan melalui bekerja sama dengan KONI kabupaten dan organisasi persatuan olah raga yang ada di daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul olahragawan yang berprestasi di daerah.

f. Agama

Kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Pacitan sangat baik, hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya konflik antar pemeluk agama. Komposisi penduduk menurut agama pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : Islam 568.177 jiwa, Katolik 296 jiwa, Kristen 446 jiwa, Hindu 2 jiwa, dan Budha 1 jiwa dan lainnya 68 jiwa.

Perkembangan komposisi penduduk berdasarkan agamanya dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Perkembangan Penduduk Menurut Agamanya Tahun 2004-2009

No	Agama	Tahun					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Islam	548.623	551.235	554.780	549.416	578.337	568.177
2	Kristen	178	234	221	178	198	446
3	Katolik	241	285	308	246	291	296
4	Hindu	2	2	2	2	2	2
5	Budha	-	3	3	3	3	1
6	Lainnya	-	-	-	-	-	68

Sumber : Pacitan Dalam Angka, diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2009 mayoritas penduduk Kabupaten Pacitan memeluk agama Islam, di urutan kedua adalah pemeluk agama Kristen, dan yang ketiga adalah pemeluk agama Katolik.

Sedangkan perkembangan tempat ibadah selama kurun waktu tahun 2004-2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Perkembangan Tempat Peribadatan Tahun 2004-2009

No	Agama	Tahun					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Masjid	1.290	1.297	1.332	1.391	1.300	1.429
2	Langgar	1.033	1.054	949	947	949	1.049
3	Musholla	178	360	547	563	547	805
4	Gereja	6	7	8	8	8	8
5	Pura	-	-	-	-	-	-
6	Vihara	-	-	-	-	-	-

Sumber : Pacitan Dalam Angka, diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah tempat peribadatan pada tahun 2009 terdiri dari masjid 1.429 buah, Langgar 1.049 buah, Musholla 805 buah, dan gereja 8 buah.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

a. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan dapat diketahui dari beberapa indikator diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan dalam kelompok umur sesuai pendidikan tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umumnya.

Perkembangan APK dan APM dalam kurun waktu tahun 2006-2009 dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Perkembangan APK dan APM Tahun 2006-2009

No	APK/APM	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	APK PAUD	9,70	19,00	33,00	41,15
2	APK TK	27,52	36,24	37,76	38,55
3	APK SD/MI	105,00	103,99	102,02	103,52
4	APK SMP/MTs	91,97	95,88	95,82	96,90
5	APM SD/MI	93,85	95,01	97,83	98,67
6	APM SMP/MTs	72,67	74,20	76,06	81,44
7	APK SMA/MA/SMK/paket C	49,43	50,98	59,69	66,24
8	APM SMA/MA/SMK/paket C	35,63	36,91	40,70	52,57

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui perkembangan APK dan APM pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan APK yang paling besar terjadi pada jenjang PAUD dimana APK nya meningkat dari 9,70 pada tahun 2006 menjadi 41,15. Sedangkan peningkatan APM yang terbesar terjadi pada APM SMA/MA/SMK/Paket C yang meningkat dari 35,63 pada tahun 2006 menjadi 52,57 pada tahun 2009.

b. Rasio Murid/Guru, Rasio Siswa/Sekolah, Rasio Siswa/Kelas dan Rasio Kelas/Guru

Rasio Murid/Guru untuk jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Rasio Murid/Guru Tahun 2005-2009

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	SD	13:1	11:1	11:1	10:1	10:1
2	MI	11:1	9:1	8:1	8:1	7:1
3	SMP	13:1	12:1	12:1	13:1	13:1
4	MTS	8:1	9:1	8:1	8:1	7:1
5	SMA	11:1	12:1	11:1	11:1	11:1
6	SMK	11:1	11:1	11:1	10:1	10:1
7	MA	8:1	10:1	8:1	8:1	8:1

Sumber : Masterplan Pendidikan Kab. Pacitan, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio Murid/Guru untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA menunjukkan bahwa ketersediaan guru di Kabupaten Pacitan sudah cukup baik karena 1 orang guru berbanding dengan sekitar 7 – 12 orang murid.

Adapun kondisi rasio Siswa/Sekolah di Kabupaten Pacitan pada tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Rasio Siswa/Sekolah Tahun 2005-2009

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	SD	109:1	106:1	105:1	104:1	101:1
2	MI	73:1	70:1	68:1	69:1	66:1
3	SMP	346:1	347:1	348:1	335:1	320:1
4	MTS	170:1	163:1	168:1	162:1	161:1
5	SMA	315:1	413:1	377:1	383:1	380:1
6	SMK	427:1	428:1	364:1	376:1	382:1
7	MA	182:1	258:1	251:1	216:1	264:1

Sumber : Masterplan Pendidikan Kab. Pacitan, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio Siswa/Sekolah untuk jenjang pendidikan MI yang paling kecil dimana satu sekolah mempunyai 73 siswa pada tahun 2005 dan 66 siswa pada tahun 2009. Sedangkan rasio yang tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan SMK dimana satu sekolah mempunyai siswa 427 orang pada tahun 2005 dan 382 orang pada tahun 2009.

Sedangkan perkembangan Rasio Siswa/Kelas pada tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Rasio Siswa/Kelas Tahun 2005-2009

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	SD	14:1	18:1	19:1	12:1	18:1
2	MI	11:1	12:1	13:1	10:1	11:1
3	SMP	38:1	37:1	35:1	35:1	32:1
4	MTS	32:1	32:1	29:1	30:1	28:1
5	SMA	37:1	34:1	33:1	31:1	29:1
6	SMK	35:1	33:1	31:1	30:1	26:1
7	MA	31:1	36:1	21:1	30:1	23:1

Sumber : Masterplan Pendidikan Kab. Pacitan, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio Siswa/Kelas untuk jenjang pendidikan MI yang paling kecil dimana satu kelas mempunyai 11 siswa pada tahun 2005 dan 10 siswa pada tahun 2008. Sedangkan pada tingkat pendidikan SMP pada tahun 2005 rasionya adalah 38 siswa dalam satu kelas dan pada tahun 2009 adalah 32 siswa dalam satu kelas.

Sementara itu untuk perkembangan Rasio Kelas/Guru selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat diketahui dari tabel berikut :

Tabel 2.24
Rasio Kelas/Guru Tahun 2005-2009

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	SD	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	MI	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	SMP	1:3	1:3	1:3	1:3	1:2
4	MTS	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4
5	SMA	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3
6	SMK	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
7	MA	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Sumber : Masterplan Pendidikan Kab. Pacitan, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio Kelas/Guru untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah satu kelas dengan satu guru, jenjang SMP/MTS adalah satu kelas dengan 2 sampai dengan 4 guru, dan jenjang SMA/SMK/MA adalah satu kelas dengan 1 sampai 3 guru.

b. Kondisi Kesehatan

Derajat kesehatan merupakan salah satu modal keberhasilan pembangunan bangsa, karena dengan penduduk yang sehat pembangunan diharap dapat berjalan lancar, selain itu tingkat kesehatan masyarakat juga merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin baik kesehatan masyarakat, maka kesejahteraannya juga semakin baik, demikian pula sebaliknya. Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok, maupun masyarakat yang digambarkan dengan angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup), angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 persalinan dan angka harapan hidup).

Angka kematian Bayi atau Indeks Mortalitas Rate (IMR) di Kabupaten Pacitan pada tahun 2006 sebesar 9 yang berarti dari 1.000 kelahiran bayi terdapat 9 bayi yang meninggal, sedangkan pada tahun 2007 adalah 9, tahun 2008 sebesar 11 dan tahun 2009 sebesar 14,2. Banyaknya kematian bayi pada saat dilahirkan pada umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan ibu hamil, dan juga kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang sebagian besar merupakan pegunungan serta sarana transportasi yang relative masih sulit maka beberapa proses persalinan terpaksa tidak tertangani oleh tenaga kesehatan.

Tingkat kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu angka yang menyatakan rata-rata banyaknya ibu yang meninggal setiap 1000 persalinan. Angka Kematian Ibu selama kurun waktu tahun 2006-2009 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2006 sampai dengan 2008 mengalami penurunan, namun pada tahun 2009 mengalami kenaikan. Pada tahun 2006 AKI sebesar 122, menurun menjadi 63,66 pada tahun 2007, dan 44 pada tahun 2008, sementara pada tahun 2009 mencapai 100.

Perkembangan kinerja kesehatan balita dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Balita
Tahun 2006 – 2009

No	Indikator Kinerja Kesehatan	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (Permil)	9	9	11	14,2
2	Angka Kematian Ibu (%)	122	63,66	44	100
3	Balita Gizi Buruk (%)	0,29	0,16	0,37	0,43

Sumber :Dinas Kesehatan Kab. Pacitan

Sementara itu kondisi fasilitas kesehatan di Kabupaten Pacitan terus mengalami perkembangan dimana pada tahun 2009 fasilitas kesehatan terdiri atas : Rumah Sakit Umum 1 buah, Puskesmas 24 buah, Puskesmas Pembantu 53 buah, Praktek Dokter 52 buah, Balai Pengobatan 4 buah, Posyandu 786 buah.

Sedangkan jumlah tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan non Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : Tenaga Medis 50 orang, Perawat 160 orang, Bidan Puskesmas 55 orang, Bidan Desa 164 orang, Non paramedis 195 orang dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 212 orang. Secara umum, tenaga kesehatan telah memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pacitan.

Secara lengkap perkembangan sarana kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2002-2009 dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan
Tahun 2002 – 2009

Uraian	Tahun							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a. Rumah sakit Umum	1	1	1	1	1	1	1	1
b. Puskesmas	24	24	24	24	24	24	24	24
c. Puskesmas Pembantu	53	53	53	53	53	53	53	55
d. Praktek Dokter	45	20	39	39	63	63	61	52
e. Balai Pengobatan	3	3	3	3	4	4	4	4
t. Posyandu	745	745	745	753	762	786	786	786
g. Tenaga Medis	41	49	39	36	40	40	40	50
h. Perawat	118	110	110	104	145	128	146	160
i. Bidan Puskesmas	56	51	33	27	29	31	48	55
j. Bidan Desa	59	67	88	108	115	134	160	164
k. Non Paramedis	83	112	217	97	94	336	389	211
t. Lainnya	234	236	152	371	212	-	-	195

Sumber : Kabupaten Pacitan Dalam Angka, diolah

d. Perkembangan Koperasi, UMKM, Industri dan Investasi

Perkembangan koperasi di Kabupaten Pacitan mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dari segi jumlah lembaganya menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, sementara itu apabila dilihat dari aspek jumlah anggota dan permodalan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dimana pada tahun 2006 jumlah permodalan sebesar Rp. 88.448.422.000,00 dan meningkat menjadi Rp. 175.377.098.000,00 pada tahun 2009, secara lengkap kondisi koperasi pada tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2005-2009

No	Jenis koperasi	Tahun 2005			Tahun 2007			Tahun 2008			Tahun 2009		
		Jml	Angl (Org)	Modal (Rp.000)	Jml	Angl (Org)	Modal (Rp.000)	Jml	Angl (Org)	Modal (Rp.000)	Jml	Angl (Org)	Modal (Rp.000)
1	KUD	13	31.814	56.795.283	13	34.238	40.748.049	13	48.889	38.528.338	13	46.233	32.403.551
2	Kop. Pertanian	19	823	410.284	19	943	1.016.758	23	736	1.845.859	19	844	1.906.618
3	Kopli	1	685	137.898	1	426	1.408.585	1	661	1.282.626	1	661	
4	Kopnira	4	813	177.984	4	608	49.024	4	713	69.223	4	532	485.447
5	Kopporitan	6	233	234.220	8	198	709.388	8	202	2.371.087	6	347	3.536.004
6	Kopkikar	10	154	508.344	10	186	558.817	10	186	2.488.913	10	176	3.162.182
7	Kop. Angkatan Darat	1	277	521.522	1	278	388.383	1	277	3.531.329	1	277	4.037.294
8	Kop. Kapasitas	1	512	843.734	1	457	1.246.140	1	521	2.953.088	1	534	10.379.787
9	Kop. Sastra Usaha	30	1.404	488.958	32	1.388	572.759	32	1.724	3.782.708	32	1.481	12.237.793
10	Kop. Pasar	2			2			2			2		
11	Kop. Simpan Pinjam	12	549	4.134.357	13	523	4.567.568	13	633	10.711.378	13	631	13.014.651
12	Kop. Angkutan Laut	2			2			2			2		
13	K.B.P.R.	1	26	1.827.964	1	26	2.553.988	1	26	2.978.924	1	26	2.877.270
14	Kop. Peg. Negeri (KPRI)	58	5.758	20.819.148	58	5.755	33.144.759	68	5.682	44.597.858	58	5.313	81.635.311
15	Kop. Wanita	1			9			9			10		2.153.468
16	Kop. Veteran	1	59	12.978	1	59	39.085	1	59	80.458	1	59	55.731
17	Kop. Wredatama	4	547	480.133	4	654	858.479	4	554	1.048.248	4	562	829.480
18	Kop. Pemuda	1	388	285.941	1	401	355.486	1	401	388.538	1	418	892.932
19	Kop. Pemuda	4	62	18.580	4	62		4	62		4	62	
20	Kop. Pertambangan	2			2			2			2		
21	Kop. Lainnya	15	579	873.117	15	779	1.037.323	15	877	4.377.854	14	15	3.558.477
	JUMLAH	188	44.385	88.448.422	188	48.777	88.288.568	203	62.541	118.983.485	188	58.125	91.231.883
22	Koperasi Samudra	1			1			1			1	1	2.510.104
	TOTAL	189	44.385	88.448.422	200	48.777	88.288.568	204	62.541	118.983.485	200	58.126	175.377.098

Sumber : Dinas Koperindag Kab. Pacitan, diolah

Sementara itu kondisi UMKM di Kabupaten Pacitan pada tahun 2009 sejumlah 11.126 lembaga yang terdiri dari 6.536 lembaga bergerak dibidang perdagangan, 3.256 lembaga di bidang industri, 1.306 lembaga di bidang jasa dan 28 lembaga di bidang lainnya, secara lengkap dapat diketahui dari tabel berikut :

Tabel 2.28
Jumlah UMKM Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2009

No	Kecamatan	Bidang usaha				Jumlah
		Perdagangan	Industri	Jasa	Lainnya	
1	Pacitan	2.253	959	432	28	3.672
2	Pringkuku	514	40	89	-	643
3	Punung	290	241	20	-	551
4	Donorojo	266	180	51		497
5	Kebonagung	290	326	57		673
6	Arjosari	213	240	71		524
7	Tegalombo	298	50	69		417
8	Nawangan	324	95	32		451
9	Bandar	598	141	64		803

10	Tulakan	655	291	183		1.129
11	Ngadirojo	507	310	135		952
12	Sudimoro	328	383	103		814
	JUMLAH	6.536	3.256	1.306	28	11.126

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan, diolah

Adapun perkembangan industri di Kabupaten Pacitan selama periode tahun 2006 sampai dengan 2009, masih didominasi oleh industri kecil dimana jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah industri, jumlah tenaga kerja dan izin usaha yang diterbitkan dari tahun 2006-2009 dapat diketahui dari tabel berikut :

Tabel 2.29
Perkembangan Industri Tahun 2006-2009

No	Jenis Industri	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Pengolahan Kayu (Meubel+Ukir Kayu)				
	- Jumlah (unit)	145	163	181	191
	- Tenaga Kerja (orang)	365	456	466	541
2	Gula Merah				
	- Jumlah (unit)	6.732	4.132	7.410	7.146
	- Tenaga Kerja (orang)	14.105	14.137	14.259	14.271
3	Batik Tulis / Cap				
	- Jumlah (unit)	116	117	120	123
	- Tenaga Kerja (orang)	287	328	338	347
4	Gerabah Seni				
	- Jumlah (unit)	80	80	84	84
	- Tenaga Kerja (orang)	130	130	144	144
5	Batu Mulia				
	- Jumlah (unit)	201	202	204	205
	- Tenaga Kerja (orang)	596	621	618	620
6	Batu Bata				
	- Jumlah (unit)	1.425	1.440	1.476	1.480
	- Tenaga Kerja (orang)	2.240	2.255	2.270	2.278
7	Pekakanan dan Kelautan				
	- Jumlah (unit)	43	47	53	56
	- Tenaga Kerja (orang)	80	85	98	106
8	Anyaman Bambu dan Rotan				
	- Jumlah (unit)	860	877	873	886
	- Tenaga Kerja (orang)	1.145	1.593	1.226	1.256
9	Makanan Ringan				
	- Jumlah (unit)	587	621	632	636
	- Tenaga Kerja (orang)	1.104	1.169	1.204	1.231
10	Konveksi dan Penjahit				
	- Jumlah (unit)	310	315	318	335
	- Tenaga Kerja (orang)	674	679	686	706
11	Jumlah Industri Kecil dan Menengah				
	- Jumlah (unit)	14.008	14.393	14.473	14.759
	- Tenaga Kerja (orang)	28.631	29.275	29.485	30.264
12	Izin Usaha yang diterbitkan	81	101	142	180

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2006-2006 jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pacitan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 jumlah industri kecil dan menengah sejumlah 14.008 unit dan meningkat menjadi 14.759 pada tahun 2009. Peningkatan jumlah industri tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, dimana pada tahun 2006 industri kecil dan menengah mampu menyerap tenaga kerja sejumlah 28.631 orang dan meningkat menjadi 30.264 orang pada tahun 2009.

Berdasarkan jenis produksinya Industri kecil yang dominan di Kabupaten Pacitan adalah industri gula merah, batu akik, batik tulis, keramik/gerabah seni, batu mulia, anyaman bambu dan, industri kecil yang bergerak di bidang makanan, serta industri kecil lainnya.

Sementara itu perkembangan investasi di Kabupaten Pacitan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2006 sampai tahun 2009. Perkembangan jumlah investasi di Kabupaten Pacitan dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Perkembangan Investasi Tahun 2004-2009

No	Jenis Investasi	Tahun					
		2004	2003	2006	2007	2008	2009
1	Investasi Non PMDN/PMA	32.677.430	61.546.495	74.926.166	77.479.355	54.493.692	53.650.916
2	Investasi PMDN/PMA		13.360.000	35.750.000	25.185.000	35.330.000	69.293.000
3	- APBO Kabupaten	99.525.000	123.433.610	166.260.130	123.460.289	139.476.198	102.363.000
	- APBD Propinsi	20.701.232	29.673.480	27.870.600	3.678.858	4.120.000	23.314.164
	- APBN	34.333.657	36.794.760	9.019.590	60.553.105	1.462.012.792	1.477.229.125
	Jumlah	147.237.719	261.708.645	315.426.466	290.456.604	1.713.532.862	1.823.650.225

Sumber : Bappeda dan PM Kab. Pacitan, diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa investasi di Kabupaten Pacitan didukung oleh tiga jenis investasi yaitu investasi non PMA/PMDN (usaha kecil non fasilitas fiskal), investasi PMA/PMDN dan investasi pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Perkembangan investasi non PMA/PMDN sebagai penggerak ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan pada tahun 2004 sampai dengan 2007, namun pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan. Sementara itu untuk investasi PMA/PMDN perkembangannya juga bersifat fluktuatif. Sementara itu investasi pemerintah terutama pemerintah pusat masih mendominasi realisasi investasi di Kabupaten Pacitan. Peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2008

dan 2009 dimana direalisasikannya proyek-proyek berskala besar di Kabupaten Pacitan seperti JLS dan PLTU telah mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Pacitan.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Aparatur

Aparatur yang profesional merupakan salah satu pilar pendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, dimana dalam rangka mewujudkan hal tersebut harus diawali dengan penataan aparatur guna mendapatkan aparatur yang memiliki kemampuan (*knowledge and skill*) dan sikap mental (*attitude*) yang baik ditindaklanjuti dengan penataan kelembagaan agar terbentuk kelembagaan yang mantap dengan prinsip miskin struktur dan kaya fungsi. Demikian halnya dengan penataan perangkat hukum/peraturan daerah, telah dilakukan pengembangan penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah sehingga menghasilkan produk hukum dan mencerminkan aspirasi masyarakat yang sesuai kebutuhan pembangunan dalam rangka memantapkan otonomi daerah, serta dilakukan upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum sebagai upaya membangun budaya hukum baik bagi aparat maupun masyarakat

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 161 desa dan 5 Kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Kabupaten Pacitan didukung oleh aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan struktur pegawai menurut golongan secara rinci sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.31
Struktur Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Golongan I	107	81	100	245	268
2	Golongan II	1.366	1.108	1.381	2.289	2.487
3	Golongan III	3.757	3.105	3.432	3.611	3.727
4	Golongan IV	2.397	2.655	2.786	3.066	3.214
	Jumlah	7.627	7.394	7.699	9.211	9.696

Sumber : Kabupaten Pacitan Dalam Angka , diolah

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Pacitan didukung oleh unsur staf yang memiliki kualitas SDM yang cukup memadai. Berdasarkan tingkat pendidikannya, PNS di Kabupaten Pacitan sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut:

Tabel 2.32
Struktur Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	SD	140	120	109	119	106
2	SLTP	245	239	240	306	306
3	SLTA	1.864	1.846	1.765	2.196	2.191
4	D1	203	196	182	189	157
5	D2	1.919	1.961	1.925	2.242	2.169
6	D3	605	625	627	666	690
7	S1	2.519	2.599	2.610	3.313	3.867
8	S2	132	127	151	180	210
9	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		7.627	7.713	7.699	9.211	9.696

Sumber : Kabupaten Pacitan Dalam Angka, diolah

Pegawai di Pemerintah Kabupaten Pacitan banyak didominasi lulusan Strata Satu (S1), dan kemudian lulusan dari Diploma Dua (D2) dan Diploma Satu (D1). Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan harus terus ditingkatkan baik sehingga dapat menjadi aparatur yang berkualitas yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat.

2. Kelembagaan

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah ditentukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan wajib sejumlah 26 urusan pemerintahan daerah dan urusan pilihan sejumlah 8 urusan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut Pemerintah Kabupaten Pacitan telah, menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan Daerah ada 26 Urusan pemerintahan wajib dan 8 urusan pilihan di Kabupaten Pacitan. Urusan pemerintahan daerah tersebut harus diwadahi dalam kelembagaan perangkat daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Penataan kembali kelembagaan perangkat daerah yang sudah terbentuk dan pada tahun 2007 telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah

tentang kelembagaan perangkat daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah.

Kewenangan daerah yang terdiri dari 26 Urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi urusan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pacitan sebagai pelaksanaannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.33
Organisasi Perangkat Daerah
Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana
	WAJIB	
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah
3	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga Dan Pengairan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan
4	Perumahan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan
5	Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan
6	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal, Setda (Bagian Kerjasama dan Perbatasan)
7	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Setda (Bagian Humas Dan Protokol)
8	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
9	Pertanahan	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
10	Kependudukan & Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
11	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
12	Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
13	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
16	Penanaman Modal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal, Kantor Pelayanan Perijinan
17	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
18	Kepemudaan & Olah Raga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, Kecamatan
21	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan

22	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Setda (Bag Administrasi Pemerintahan Umum)
23	Statistik	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
24	Kearsipan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
25	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Setda (Bagian Humas dan Protokol)
26	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
	PILIHAN	
1	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3	Energi & Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
4	Parwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olah Raga
5	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustriuan dan Perdagangan
7	Industri	Dinas Koperasi, Perindustriuan dan Perdagangan
8	Ketransmigrasian	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Pacitan, diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa mulai tahun 2007, kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Pacitan sebagai pelaksana urusan pemerintahan wajib dan pilihan terdiri atas : Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan, 14 Dinas Daerah, 14 Lembaga Teknis Daerah yaitu 1 Inspektorat, 6 Badan, 5 Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja serta RSUD Pacitan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Potensi Daerah

1. Potensi Pertanian

Luas areal sawah di Kabupaten Pacitan mencapai ±13.015 Ha atau sekitar 9,36% dari seluruh luas wilayah, dan selebihnya adalah areal tanah kering yang mencapai 90,64%. Areal sawah yang ada terdiri dari sawah irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, tadah hujan.

Pada tahun 2000, sawah dengan irigasi teknis mencapai 1.602 Ha atau sekitar 12,26%, namun pada tahun 2001-2006 dan tahun 2007-2009 sawah irigasi teknis mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana luasnya tinggal 864 Ha atau 6,64% dari total luas sawah yang ada. Penurunan ini tidak lepas dari ketersediaan air di Kabupaten Pacitan yang sangat terbatas, baik untuk pertanian, industri maupun untuk konsumsi rumah tangga. Dengan keterbatasan sumber air tersebut, sawah irigasi teknis bergeser ke sawah irigasi setengah teknis. Komposisi sawah berdasarkan jenis irigasinya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Luas Sawah Berdasarkan Jenis Irigasi

Uraian	Tahun 2000		Tahun 2001-2006		Tahun 2007-2009	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
a. Irigasi teknis	1.602	12,26	864	6,64	864	6,64
b. Irigasi setengah teknis	1.178	9,01	2.130	16,37	2.130	16,37
c. Irigasi sederhana	4.062	31,07	3.314	25,46	3.314	25,46
d. Tadah hujan	6.230	47,66	6.707	51,53	6.707	51,53
e. Lainnya	0	0	0	0	0	0
Jumlah	13.072	100	13.015	100	13.015	100

Sumber: Kabupaten Pacitan Dalam Angka, diolah

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dengan keterbatasan sumber air yang dimiliki, sebagian besar sawah yang ada di Kabupaten Pacitan mengandalkan hujan, dimana sekitar 51,53% sawah di Kabupaten Pacitan merupakan sawah tadah hujan. Pada masa yang akan datang dengan semakin menurunnya daya dukung lahan pertanian dapat menyebabkan penurunan produksi komoditi pangan.

Salah satu komoditi pertanian yang merupakan bahan pangan andalan di Kabupaten Pacitan adalah padi, dimana perkembangan luas areal, luas panen, produktivitas dan produksi padi selama tahun 2002-2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Perkembangan Luas Areal, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2002-2009

Uraian	Tahun							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a. Luas Areal (Ha)	34.757	31.856	33.998	34.410	35.498	35.030	35.528	34.884
b. Luas Panen (Ha)	32.304	29.243	31.531	31.780	32.861	32.540	32.929	31.515
c. Produktivitas (Kw/Ha)	41,91	38,33	39,56	40,60	44,54	44,75	44,97	48,81
d. Produksi (Ton)	135.401	112.095	124.732	129.031	146.351	145.631	148.078	153.814

Sumber : Kabupaten Pacitan Dalam Angka, diolah

Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir (2002-2009) terjadi fluktuasi luas areal tanaman padi. Pada tahun 2002 luas areal yang ditanami padi sebesar 34,757 Ha dan pada tahun 2003 terjadi penurunan areal tanam. Namun, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 terdapat kecenderungan kenaikan areal luas tanam, dimana sampai dengan tahun 2008 luas tanam sebesar 35,528 Ha dan menurun menjadi 34,884 Ha pada tahun 2009. Peningkatan luas tanam menyebabkan kenaikan pada luas panen, dan pada akhirnya adalah terjadi kenaikan produksi padi.

Pada tahun 2002 produksi padi sebesar 135,401 ton dan pada tahun 2006 produksi naik menjadi 146,351 ton dan meningkat menjadi 153.814 pada

tahun 2009. Selain terjadi kenaikan luas tanam dan luas panen, kenaikan produksi ini juga disebabkan oleh peningkatan produktivitas yang signifikan, dimana produktivitas lahan pada tahun 2002 sebesar 41,91 Kw/Ha dan pada Tahun 2006 meningkat menjadi 44,54 Kw/Ha meskipun pada tahun 2003 sempat terjadi penurunan produktifitas dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 48,81 Kw/Ha. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang berkaitan dengan peningkatan usaha pertanian mulai menampakkan hasil, yaitu peningkatan produksi padi. Namun, secara keseluruhan produktivitas lahan padi di Kabupaten Pacitan masih dibawah rata-rata produktivitas padi tingkat nasional yang mencapai 46,9 Kw/Ha dan tingkat Jawa Timur yang mencapai sekitar 53 Kw/Ha.

Komoditas pertanian lain yang juga merupakan salah satu komoditas pangan adalah jagung. Perkembangan luas produktivitas tanaman jagung dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produksi Jagung Tahun 2002-2009

Uraian	Tahun							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Luas Areal (Ha)	22.018	23.496	25.324	24.849	25.873	25.718	24.651	25.685
Luas Panen (Ha)	22.008	23.142	25.102	24.465	25.369	25.370	23.998	25.588
Produktivitas (Kw/Ha)	2,20	3,63	3,87	2,82	3,86	40,52	45,65	47,29
Produksi (Ton)	48.441	83.934	97.142	69.093	97.954	102.793	109.542	121.015

Sumber : Kabupaten Pacitan Dalam Angka, diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk komoditi jagung, selama delapan tahun terakhir (2002-2009) terjadi trend peningkatan luas lahan tanaman jagung. Pada tahun 2002 luas tanam jagung sebesar 22.018 Ha dan pada tahun 2006 luas tanam meningkat menjadi 25.873 Ha, meskipun pada tahun 2005 sempat mengalami penurunan luas tanam dan pada tahun 2009 mencapai 25.685 Ha. Luas tanam yang meningkat berdampak pada kenaikan produksi jagung. Dalam kurun waktu 2002 sampai dengan 2006 terjadi peningkatan produksi yang signifikan, dimana peningkatannya lebih dari 100%. Pada tahun 2002 produksi jagung sebesar 48.441 ton dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 97.954 ton dan mencapai 121.015 ton pada tahun 2009. Peningkatan ini juga disebabkan oleh peningkatan produktivitas tanaman jagung, dimana sampai dengan tahun 2006 produktivitas mencapai 3,86 kw/th dan meningkat menjadi 47,29 kw/th pada tahun 2009.

Selanjutnya komoditi pertanian lain yang dapat diunggulkan di Kabupaten Pacitan adalah Ubi Kayu, dimana perkembangan produksi ubi kayu selama delapan tahun terakhir dapat diketahui dari tabel berikut :

Tabel 2.37
Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2002-2009

Uraian	Tahun								Rata-rata
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
a. Luas Tanah (Ha)	36.649	41.203	35.366	40.331	36.022	36.396	36.129	35.378	37.184
b. Luas Panen (Ha)	36.649	35.732	33.946	39.782	35.259	34.909	35.055	33.764	35.637
c. Produktifitas(Kw/Ha)	138	139	177	164	166	178	225	188	171
d. Produksi (Ton)	507.468	494.887	601.355	650.432	585.927	623.434	792.115	636.245	611.482

Sumber: Kabupaten Pacitan Dalam Angka, diolah

Produksi Ubi kayu di Kabupaten Pacitan merupakan salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Rata-rata produksi ubi kayu selama delapan tahun terakhir sebesar 611.482 ton dengan produktivitas sebesar 171 Kw/Ha. Ubi kayu juga menjadi salah satu bahan pangan utama masyarakat Pacitan. Selama ini ubi kayu belum sepenuhnya mendapatkan sentuhan teknologi untuk diproses menjadi barang yang lebih ekonomis sehingga nilai tambah yang didapat dari potensi ubi kayu ini masih relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya perkembangan agroindustri di Kabupaten Pacitan. Selain padi, jagung, dan ubi kayu, di Kabupaten Pacitan juga terdapat beberapa komoditi pertanian lainnya seperti kedelai dan ubi jalar, namun produksinya relatif kecil.

2. Potensi Perkebunan

Komoditi perkebunan yang besar di Kabupaten Pacitan adalah kelapa, dimana produksi kelapa di Kabupaten Pacitan menempati urutan terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep dan Banyuwangi. Kontribusi produksi kelapa Pacitan sekitar 11% dari total produksi kelapa di Jawa Timur. Luas tanam kelapa dan produksi gula merah di Kabupaten Pacitan selama tahun 2002-2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Luas Lahan dan Produksi Kelapa Tahun 2002-2009

Uraian	Tahun								Rata-rata
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
a. Luas (Ha)	23.245	23.340	23.558	23.714	24.027	24.229	24.421	24.617	23.893
b. Produksi (1000 kg)	18.190	18.317	18.319	22.382	24.038	18.760	19.128	19.582	19.839

Sumber : Pacitan Dalam Angka, diolah

Produksi kelapa di Pacitan selama delapan tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2002 produksi kelapa sebesar 18.190 ton dan pada tahun 2006 produksinya meningkat menjadi 24.038 ton, sedangkan pada tahun 2009 mencapai 19.582 ton, atau rata-rata produksinya selama kurun waktu 2002 – 2009 mencapai 19.839 ton. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan produksi adalah terjadinya peningkatan produksi luas lahan kelapa dimana pada tahun 2002 luas lahan kelapa sebesar 23.245 Ha dan pada tahun 2006 menjadi 24.247 Ha dan meningkat menjadi 24.617 Ha pada tahun 2009. Sebagian besar produksi kelapa dipergunakan sebagai bahan pembuatan gula merah, dimana gula merah yang dihasilkan masih diproses secara sederhana sehingga belum dapat memberikan nilai tambah yang signifikan.

Komoditas perkebunan lainnya yang cukup diandalkan di Kabupaten Pacitan adalah cengkeh. Perkembangan luas lahan dan produksi cengkeh di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Luas Areal dan Produksi Cengkeh Tahun 2002-2009

Uraian	Tahun								Rata-rata
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
a. Luas (Ha)	23.245	23.340	23.658	23.714	24.027	7.177	7.614	7.763	17.554
b. Produksi Cengkeh(kg)	18.190	18.317	18.319	22.382	24.038	74.195	58.570	66.541	37.569

Sumber : BPS Jawa Timur, diolah

Untuk komoditi cengkeh di Kabupaten Pacitan produksinya pada tahun 2002 sampai dengan 2009 menunjukkan perkembangan yang cukup baik dimana pada tahun 2002 produksinya mencapai 18.190 kg/th dan meningkat menjadi 66.541 kg/th pada tahun 2009. Peningkatan produksi cengkeh ini dipicu oleh meningkatnya harga cengkeh di pasaran sehingga cengkeh menjadi salah satu komoditi yang menjanjikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain kelapa dan cengkeh, komoditi perkebunan di Kabupaten Pacitan adalah kopi, tebu, kapuk randu, kapas dan kakao. Produksi komoditi-komoditi perkebunan ini relatif kecil dibandingkan dengan komoditi kelapa dan cengkeh.

3. Potensi Peternakan

Secara umum komoditi peternakan terdiri dari daging, telur ayam petelur dan susu (sapi perah). Daging bersumber dari temak sapi potong, kerbau, domba, kambing, dan unggas (ayam potong, itik dan sejenisnya). Sejauh

ini populasi ternak yang perkembangannya terbanyak adalah kambing, domba, dan sapi.

Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Populasi Ternak Tahun 2006-2009

No	Jenis Ternak	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Sapi potong	44.957	46.025	46.850	47.787
2	Kerbau	314	358	357	378
3	Kuda	144	155	154	155
4	Kambing	77.057	78.234	80.008	81.836
5	Domba	31.723	32.339	33.076	33.830
6	Ayam Buras	1.006.375	970.138	978.873	988.694
7	Ayam Broiler	48.478	60.946	56.496	67.402
8	Ayam Ras Petelur	1.870	4.450	4.450	4.500
9	Itik/Entok	13.379	15.078	15.463	15.685
10	Kelinci	2.014	2.900	2.953	3.014

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan, diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa populasi sapi potong pada tahun 2006 sebesar 44.957 ekor dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 47.787 ekor. Sedangkan untuk populasi kambing pada tahun 2002 sebesar 77.057 ekor dan pada tahun 2009 terjadi peningkatan populasi kambing yang signifikan yaitu menjadi 81.836 ekor. Sementara itu untuk populasi domba dalam kurun waktu tahun 2006 – 2009 terjadi peningkatan populasi yang sangat tinggi dimana pada tahun 2006 populasi domba sejumlah 31.723 ekor dan meningkat menjadi 33.830 ekor pada tahun 2006.

Sementara itu untuk populasi ternak lainnya yang menonjol adalah ternak ayam buras yang populasinya pada tahun 2006 mencapai 1.006.375 dan selama periode tahun 2006-2009 mengalami penurunan akibat flu burung sehingga pada tahun 2009 populasinya menjadi 988.694.

4. Potensi Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Pacitan didominasi oleh perikanan laut, dimana hal ini ditunjang oleh keberadaan tempat pendaratan ikan (TPI) serta Pelabuhan Pendaratan Pantai (PPP) yang berada di Teluk Pacitan. Perkembangan produksi perikanan laut mulai tahun 2006-2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Perkembangan Produksi Laut Tahun 2006-2009

No	Produksi Ikan (Kg) dan Nilainya (Rp)	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Produksi Laut Kab. Pacitan (Kg)	1.871.600	3.114.661	3.438.472	4.555.143
	a. Kec. Donorojo	1.748	32.803	1.533	18.279
	b. Kec. Pringkuku	308.484	326.685	374.561	406.560
	c. Kec. Pacitan	489.827	2.155.665	2.434.137	3.671.989
	d. Kec. Kebonagung	430.186	210.771	84.779	128.611
	e. Kec. Tulakan	159.358	65.607	117.185	96.906
	f. Kec. Ngadirojo	264.089	222.100	307.616	216.301
	g. Kec. Sudimoro	217.908	101.030	118.661	16.497
2	Nilai Produksi Laut Kab. Pacitan (Rp.)	17.850.120.000	29.569.279.500	48.138.608.000	33.475.119.000
	a. Kec. Donorojo	69.920.000	311.628.500	21.462.000	505.245.000
	b. Kec. Pringkuku	2.930.598.000	3.103.607.500	5.243.854.000	3.022.170.000
	c. Kec. Pacitan	4.653.356.500	20.478.817.500	34.077.918.000	24.989.764.000
	d. Kec. Kebonagung	4.086.767.000	2.002.324.500	1.186.906.000	1.655.411.000
	e. Kec. Tulakan	1.513.901.000	623.266.500	1.640.590.000	1.136.594.000
	f. Kec. Ngadirojo	2.508.845.500	2.109.950.000	4.306.624.000	1.822.991.000
	g. Kec. Sudimoro	2.086.732.000	959.785.000	1.661.254.000	342.944.000

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan, diolah

Dari tabel di atas diketahui bahwa produksi ikan laut selama tahun 2006-2009 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dimana pada tahun 2006 produksinya mencapai 1.871.600 kg/th, meningkat menjadi 4.555.143 kg/th, sementara itu apabila dilihat dari nilainya juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2006 senilai Rp. 17.850.120.000,00 meningkat menjadi Rp. 33.475.119.000,00 pada tahun 2009.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan potensi lestari yang dimiliki laut Pacitan yaitu sebesar 34.483 ton/tahun, maka pemanfaatannya sampai saat ini masih sekitar 6 % per tahun dan dilakukan nelayan secara singkat (one day fishing), dimana jangkauannya masih di sekitar pantai. Untuk meningkatkan hasil tangkapan diperlukan dukungan sarana prasarana yang memadai seperti peralatan tangkap, kapal berkapasitas besar, serta perlunya meningkatkan SDM para nelayan sehingga kemampuan nelayan melaut menjadi lebih lama.

Untuk mengetahui lebih jauh jumlah nelayan beserta alat tangkapnya selama kurun waktu tahun 2006 - 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Jumlah Nelayan dan Alat Tangkap
Tahun 2006-2009

No	Uraian	Tahun			
		2006	2007	2009	2009
1	Jumlah Nelayan Kab. Pacitan (orang)	3.346	3.746	3.794	4.169
	a. Kec. Donorojo	123	123	126	125
	b. Kec. Pringkuku	619	619	619	673
	c. Kec. Pacitan	1.027	1.427	1.427	1.765
	d. Kec. Kebonagung	742	742	742	746
	e. Kec. Tulekan	118	118	164	164
	f. Kec. Ngadirojo	447	447	447	460
	g. Kec. Sudimcro	270	270	270	236
2	Jumlah Kapal Kab. Pacitan (buah)	983	1.016	1.268	1.524
	a. Kec. Donorojo	-	1	4	6
	b. Kec. Pringkuku	98	108	182	215
	c. Kec. Pacitan	306	265	309	435
	d. Kec. Kebonagung	298	280	280	326
	e. Kec. Tulakan	53	57	57	100
	f. Kec. Ngadirojo	161	214	315	346
	g. Kec. Sudimoro	67	91	121	96
3	Jumlah Pemilik Perahu (unit)	932	934	945	982
	a. Kec. Donorojo	-	0	4	4
	b. Kec. Pringkuku	115	82	82	82
	c. Kec. Pacitan	279	304	304	263
	d. Kec. Kebonagung	238	290	290	300
	e. Kec. Tulakan	53	32	32	100
	f. Kec. Ngadirojo	154	135	142	142
	g. Kec. Sudimoro	93	91	91	91
4	Jumlah Alat Tangkap Kab. Pacitan (unit)	10.283	12.472	63.614	62.972
	a. Parel	5.020	5.080	4.875	3.475
	b. Gillinet	109	195	239	659
	c. Gondrong	-	-	488	1.327
	d. Purse Seine	-	6	65	15
	e. Payang	213	192	185	44
	f. Pancing	1.681	4.264	5.457	12.639
	g. Pukat Pantal	-	-	2	2
	h. Krendet	3.260	2.735	45.140	44.813

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan, diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah nelayan beserta alat tangkapnya selama kurun waktu tahun 2006-2009 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan potensi kelautan juga semakin meningkat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya nelayan dan peningkatan perekonomian daerah.

5. Potensi Kehutanan

Kabupaten Pacitan dengan luas wilayah 1.389,87 km², memiliki luas hutan 71.447,5 Ha yang terdiri dari hutan rakyat seluas 69.441 Ha (97,1%) dan hutan negara seluas 2.006,5 Ha (2,9 %). Sedangkan luas lahan kritis di Kabupaten Pacitan pada tahun 2006 seluas 27.170,10 Ha dan pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi seluas 25.965 Ha. Kondisi tegakan hutan rakyat dan penanganan lahan kritis pada tahun 2006-2009 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 43
Data Luas Tegakan Hutan Rakyat dan Lahan Kritis di Kabupaten Pacitan
2006 - 2009

No	Uralan	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Luas Areal Tegakan Hutan (Ha)	64.053,00	64.360,00	65.951,00	67.324,04
2	Lahan Kritis Tahun Sebelumnya (Ha)	27.770,10	27.170,10	26.860,00	25.965,00
3	Luas Ditangani (Ha)	2.465,00	2.540,00	1.515,00	1.655,00
4	Penambahan Lahan Kritis (Ha)	1.865,00	2.229,90	620,00	578,00
5	Luas Lahan Kritis (Ha)	27.170,10	26.860,00	25.965,00	24.888,00

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, diolah

Jenis tanaman hutan yang cukup besar di Kabupaten Pacitan adalah Jati (seluas 15.998 Ha), mahoni (14.310 Ha), sengon (15.984), Akasia (11.750 Ha), Pinus (2.675 Ha), Bambu (2.020 Ha), sono dan tanaman lainnya.

Sedangkan potensi kehutanan di Kabupaten Pacitan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.44
Potensi Kehutanan Tahun 2006 – 2009

No	Uralan	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1.	Luas Areal (Ha)				
	Jati	16.115,00	16.197,00	16.954	17.107,00
	Mahoni	14.350,00	14.352,00	13.576	13.347,00
	Sengon	16.184,00	16.461,00	18.254	19.360,54
	Akasia	11.700,00	11.587,00	11.088	10.714,00
	Pinus	2.745,00	2.819,00	3.070	3.291,50
	Sono	280	285	248	253,50
	Bambu	2.035,00	1.996,00	1.946	1.896,00
	Gmelina	-	128,5	275	629,50
	Tan. Kayu Lainnya	644	534,5	542	618,50
2.	Produksi				
	Jati (M3)	71.700,68	41.143,39	40.616	74.959,59
	Mahoni (M3)	1.621,50	5.658,00	6.287	9.807,72
	Sengon (M3)	11.698,20	118.110,00	120.012	127.212,30
	Akasia (M3)	4.320,16	14.684,48	19.181	30.497,31
	Pinus (M3)	11.430,10	10.941,10	16.517	19.964,23
	Sono (M3)	210	1.474,16	1.620	2.267,30
	Bambu (M3)	24.609,11	19.475,00	17.307	18.239,00

No	Uraian	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
	Gmelina (M3)	-	-	21	22,70
	Tan. Kayu Lainnya (M3)	159,96	2.552,19	903,30	1.115,02
3.	Produksi Lebah Madu (lt)	866	916	1.023	1.037
4.	Getah Pinus (Ton)	55,631	46,276	58,000	115,500

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, diolah

6. Potensi Pariwisata

Di Kabupaten Pacitan terdapat beberapa obyek wisata yang sudah terkenal antara lain : Pantai Teleng Ria, Pantai Srau, Pantai Klayar, Pantai Sidomulyo/Taman, Goa Gong, Goa Tabuhan, Goa Putri, Pemandian Air Hangat "Tirto Husodo", dan wisata budaya "Upacara ceprotan". Kabupaten Pacitan juga dikenal dengan Kabupaten 1001 goa karena banyak memiliki goa-goa, dan sebagian besar belum tereksplorasi yang baik.

Potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Pacitan terdiri dari wisata pantai, wisata goa, wisata sejarah/budaya, wisata spiritual dan wisata rekreasi yang secara lengkap tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.45
Potensi Pariwisata

No.	Jenis Wisata	Lokasi	Jarak dari Pusat Kota
1.	Wisata Pantai	Pantai Klayar	53 Km
		Pantai Srau	20 Km
		Pantai Watukarung	15 Km
		Pantai Sidomulyo	50 Km
		Pantai Teleng Ria	2,5 Km
2.	Wisata Goa	Goa Gong	30 Km
		Goa Tabuhan	31 Km
		Goa Putri	28 Km
		Luweng Jaran	33 Km
3.	Wisata Sejarah / Budaya	Monumen Panglima Besar Jendral Soedirman	50 Km
		Monumen Tumpak Rinjing	9,5 Km
4.	Wisata Spiritual	Makam Kanjeng Jimat	0,5 Km
		Padepokan Gunung Umo	20 Km
5.	Wisata Rekreasi	Pemandian Air Hangat	15 Km

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Pacitan, diolah

Sedangkan dilihat dari kunjungan wisatawan, selama delapan tahun terakhir, angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Pacitan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Perkembangan Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Retribusi Pariwisata
Tahun 2002-2009

Urutan	Tahun							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Domestik (org)	515.041	427.799	395.856	291.626	313.374	301.328	401.983	475.260
Mancanegara (Org)	534	547	593	334	151	306	402	352
Nilai Retribusi (Rp)	880.918.150	597.218.000	715.888.100	622.112.600	506.713.700	762.642.500	813.487.500	705.236.000

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Pacitan, diolah

Dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan 2007 terjadi kecenderungan penurunan jumlah wisatawan khususnya wisatawan domestik yang disebabkan karena situasi perekonomian nasional yang masih belum stabil, sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, TDL dan harga bahan pangan. Disamping itu penurunan kunjungan wisatawan juga dipengaruhi oleh isu-isu teroris pasca kasus bom Bali serta terjadinya bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh, Pangandaran dan Yogyakarta. Selain itu, infrastruktur penunjang pariwisata yang belum memadai berpengaruh pada minat wisatawan berkunjung ke Pacitan. Namun pada tahun 2008 dan 2009 secara perlahan terjadi kenaikan kunjungan wisatawan, dimana pada tahun 2002 terdapat 515.041 wisatawan domestik dan 534 wisatawan mancanegara, pada tahun 2009 jumlah wisatawan domestik sebesar 475.260 orang dan 352 wisatawan mancanegara.

Dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, berpengaruh pula pada penurunan penerimaan retribusi dari sektor pariwisata. Dimana selama periode tahun 2002 sampai dengan 2009 penerimaan daerah dari retribusi wisata cenderung fluktuatif. Pada tahun 2002 penerimaan retribusi dari sektor pariwisata sebesar Rp.880.918.150,00 menjadi Rp. 622.122.500,00 pada tahun 2005, dan Rp. 705.236.000,00 pada tahun 2009. Dengan potensi pariwisata yang dimiliki, Kabupaten Pacitan ke depan dapat menjadi salah satu tujuan utama wisata di Jawa Timur apabila potensi yang ada dapat dikelola dengan optimal serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.

7. Potensi Pertambangan

Kabupaten Pacitan memiliki berbagai macam bahan tambang, diantaranya adalah bahan galian yang menjadi bahan baku industri galian. Bahan galian tersebut antara lain :

- 1) Batu Gamping;
- 2) Dolomit (kegunaan atau tungku pencair, bahan pupuk (unsur Mg) dan pengatur PH tanah, pengembangan dan pengisi cat, plastik, kertas);
- 3) Kalsit (kegunaan : bahan pemutih dan pengisi cat , gelas, karet, penetral keasaman tanah, bahan pelapis kertas);
- 4) Trass (kegunaan: bahan pembuat Portland puzzoland cement (PRC), pembuat semen trass kapur untuk batu cetak (batako) campuran pembuat beton, campuran plester dan tanah urug);
- 5) Ball clay/tanah lempung (kegunaan: bahan industri keramik dan refraktori , pellet, makanan temak dan pengisi);
- 6) Feldspar (kegunaan : sebagai fluks dalam industri keramik, gelas dan kaca);
- 7) Bentonit (kegunaan: Sebagai bahan lumpur pemboran , pencegah kebocoran pada bangunan sipil basah, campuran pembuatan cat, lateks dan tinta cetak, bahan penyerap, zat perekat, pellet makanan temak);
- 8) Zeolit (kegunaan: untuk bahan kimia dan amomen, bahan agregat ringan, bahan pengembang dan pengisi pasta gigi, bahan penjernih air limbah dan kolam ikan , makanan ternak , pemukiman gas metan / gas alam /gas mumi, penyerap zat / logam beracun);
- 9) Koalin (kegunaan : Untuk industry keramik , kertas,cat, kosmetik dan farmasi, bahan pembuat karet /pestisida);
- 10) Phiropilit (kegunaan : sebagai bahan industri keramik , refraktori, kosmetik, kertas, bahan campuran cat dan plastik);
- 11) Fosfat (kegunaan: Sebagai pupuk alam dan buatan).

Selain jenis bahan galian di atas, di Kabupaten Pacitan juga memiliki potensi tambang jenis emas. Selain itu beberapa jenis bahan tambang yaitu jenis Chert (Rijang), Opal kuarsit dan Jasper, Kalsedon, dan Amethyst yang semuanya sebagai bahan perhiasan, hanya dimiliki oleh Kabupaten Pacitan dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Selain ini bahan galian logam, batu mulia dan sejenisnya masih sebatas eksplorasi saja sehingga nilai tambahannya masih relative kecil.

Disamping emas, Kabupaten pacitan juga memiliki potensi bahan tambang antara lain : batu bara, Timah putih, Uranium, Nikel, Timah Hitam, Tembaga, Seng, dan Mangan. Secara detail potensi tambang yang terdapat di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47
Penggolongan Potensi Tambang
Tahun 2006 - 2009

No.	Jenis Tambang	Lokasi Desa (Kecamatan)	Luas Sebaran	Ket.
Golongan A (Strategis)				
1.	Batu Bara	Jatigunung, Mendolo Kidut, Ketepung, Gasang	Belum diketahui	Bahan Bakar Industri, Listrik dan Kereta Api
2.	Timah Putih	Tanjung Lor, Pagerejo	Indikasi	Bahan Pembuatan cat dan dempul
3.	Uranium	Kluwih (Tulakan)	Belum diketahui	Bahan Pembuatan Nuklir PLTN
4.	Nikel	Pagerejo (Ngadirojo)	Indikasi	Bahan Pembuatan Pesawat
Golongan B (Vital)				
1.	Timah Hitam	G. Kluwih, G. Yileng (Ngadirojo)	Akumulasi Endapan	Bahan Panduan pembuatan/ percetakan dan timbel Huruf
2.	Emas	Kebonsari, Pagerejo, Kasihan, G. Gembes (Bandar)	Cukup luas	Dijumpai di Nase Metal, Kualitas belum diketahui
3.	Tembaga	Kasihan (Glagah), Kluwih (Pinggir)	Cukup luas	Dijumpai dalam bentuk pyrile.
4.	Seng	Pagerejo, Gemaharjo, Kasihan (Glagah)	Belum diketahui	Bahan Pembuat Kawat, Perluk, dan Uang
5.	Mangaan	Kledung (Ngerjo), Kemuning (Glagah), Mujing	Belum diketahui	Bahan pembuatan besi yang tidak bermagnetik
6.	Batu Besi	Kasihan, Kembang, Plumbungan	Belum diketahui	
7.	Pasir Best	P. Pucung Sldomulyo Ngadirojo, Sendang Donorojo	2.847 Ha 11,02 Ha	
Golongan C (Galian Industri)				
1.	Dolomit,	Dadapan, Pelem, Tameran	1000 ha	Digunakan untuk Pupuk, Batu Tahah api klas 2, Keramik (Coklat, Kemerahmerahan dan Putih)
2.	Batu Gamping	Dadpan, Sedeng, Tulakan, Ngadirojo, Punung	7,372 ha 1.474.565. 765 m2	Industri Semen, Kapur rlnjar, kapur pertanian, pengeras logam, dan bahan bangunan.
3.	Fosfat	Gua Kendi, Gua Tabuhan, Niambangan	150 ha	Bahan pupuk alam dan buatan
4.	Batu Bintang (Kalsit)	G. Gede, G. Kenong, G. Buwungan Jlubang, Plton, Cemeng, Belah	443.700 m2	Industri karet, industri cat, campuran adonan keramik terutama dalam pembuatan gelasur
5.	Zeolit	G. Glatik (Bandar), Lunggur Gede, G. Somopuro, G. Bajango, G. Galian II, G. Jumbleng 3, Bangunsari	59.100/565 T 4.555 T 375 T 21.190 T 520 T 2.549 T 3.318 T	Batu Hias untuk pelapis dinding warna hijau dan cukup keras
6.	Gypsum	Donorojo, Pringkuku, Ngadirojo	3.318 ton	Bahan semen pertanian, pigmen warna, omamen, isolasi suara, industri farmasi, kosmetik

No.	Jenis Tambang	Lokasi Desa (Kecamatan)	Luas Sebaran	Ket.
7.	Bentonit	Tamanasri (Krajan) Klepu, Wareng, Mantren (Nglarangan), Sumberrejo, Jajar, Gemaharjo	Cukup luas 1,3 Ha 382 Ha 45,9 Ha	Refraktori, Lumpur Pengebcran, Menambah kekuatan dinding diafragma, bahan campuran cetak logam.
8.	Oker	Kasih, Bandar, Gemaharjo	3 Ha 4 Ha	Bahan wama pembuatan cat, tinta, Industri karet, kertas
9.	Batu Pasir	Tersebar		Omament dinding rumah
Golongan C (Galian Keramik)				
1.	Lempung	Pucangsewu, Gemaharjo, Bungur	Belum diketahui	Bahan baku keramik, Batu Bata, Semen, Gerabah dan bahan peralatan tahan api
2.	Toseki	Mloko, Temon, Gondang	Belum diketahui	Bahan Keramik halus, Industri Porselin
3.	Piroplitt	Gondang, Karanggede	29 ha	Kosmetik dan ubin
4.	Feldspar	Wonosidi, Wonokarto, Temon (Krajan Kidul), Gembong (Tenggaran), Bolosingo, Gawang	950 ha	Pelebur pembuatan keramik halus pecah belah, Isolator dan gelas
5.	Caolin	Karangrejo, Gondosari, Bangunsari, Jajar, Kasihan, Pucangsewu	80 ha	Industri Keramik, cat, karet, gelas, kertas, gelasar, saniter
6.	Tanah Liat Plasts	Gondosari, Wonogomdo, Bungur, Kasihan, Ngadirojo	Terbatas	Keramik Halus, porselen, da kerajinan
7.	Pasir Kuarsa	Tahunan, Cokrokembang, Sumberejo	Sangat luas	gelas kaca, silikon, Industri karet, sabun, wama kekuningan, butir kasar
Golongan C (Bahan Bangunan)				
1.	Batu Beku	Pacitan, Nawangan, Ngadirojo, Tulakan	10 juta m ²	Bahan bangunan, omament dan batu hias
2.	Sirtu	S. Grindulu, S. Lorok, S. Goyangan, S. Brongkah, S. Tumpak	Tidak terbatas	Bahan Bangunan
3.	Trass	Ketepung, Bungur	Terbatas	Pembuatan semen, Batako, urug
4.	Marmor	Nglaran, Wonoanti, Sanggrahan, Gembuk, Jetak	> 325 ha > 325 ha	Batu hias, omament dan kerajinan
Golongan C (Batu Setengah Mulla)				
1.	Fosil Kayu	Sepanjang dasar sungai	Terbatas	Batu hias taman, kerajinan, perhiasan
2.	Kalsedon (Agat)	Sepanjang alur sungai	Cukup luas	Industri kerajinan tangan, dan Batu perhiasan
3.	Batu Rijang (Batu Api)	Soko, Wiyoro	Cukup luas	Batu hias taman, perhiasan, peralatan rumah tangga, wama putih, kuning dan kemerahan
4.	Jasper	Sukodono, Kasihan, Sambong	Cukup luas	bahan hiasan batu akik, diusahakan UBIBAM
5.	Crstal Kuarsa	Jeruk	Terbatas	Batu perhiasan konsumsi lokal

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pacitan

b. Kinerja Keuangan

Untuk mengetahui kinerja keuangan pada suatu daerah, maka salah satu indikator yang dapat dilihat adalah kondisi APBDnya. Untuk mengetahui perkembangan APBD Kabupaten Pacitan selama 4 tahun terakhir maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2006 - 2009

No	Pendapatan	Tahun							
		2006		2007		2008		2009	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16,808,457,228	3.93	21,969,783,871	4.38	23,892,306,074	4.26	27,666,707,833	4.65
	- Pajak Daerah	3,166,946,809	0.74	3,677,694,217	0.73	4,170,577,618	0.75	4,676,459,117	0.82
	- Retribusi Daerah	4,003,662,474	0.94	11,156,655,423	2.22	12,365,333,135	2.22	16,731,637,493	2.61
	- Hasil Perusa & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	466,559,573	0.11	639,116,602	0.17	1,222,258,104	0.22	1,605,284,804	0.30
	- Lain-lain PAD yang Sah	8,167,086,372	2.14	6,316,315,627	1.26	5,934,137,216	1.07	4,253,446,418	0.71
2	DANA PERIMBANGAN	391,721,295,108	91.61	448,341,653,466	89.24	500,978,538,258	90.01	520,650,372,632	87.43
	- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24,636,295,108	6.76	27,232,853,465	5.42	32,864,274,258	5.90	30,306,732,632	5.09
	- DAU	338,655,000,000	79.20	371,997,000,000	74.04	406,718,314,000	73.07	429,136,640,000	72.06
	- DAK	28,430,000,000	6.65	49,112,000,000	9.78	61,396,000,000	11.03	61,207,000,000	10.28
3	LAIN LAIN PENDAPATAN YG SAH	19,065,545,341	4.46	32,075,313,050	6.38	31,907,503,899	5.73	47,186,826,576	7.92
	- Hibah			10,122,365,231	2.01	4,482,424,068	1.52	86,818,730	0.01
	- Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	15,719,868,919	3.86	18,856,380,218	3.77	18,860,728,613	3.35	22,074,862,848	3.71
	- Dana Penyelenggaraan Otonomi Khusus	3,345,656,422	0.00	2,998,567,600	0.00	4,195,651,198	0.75	18,351,031,000	3.08
	- Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya					668,500,000	0.10	6,070,135,000	1.12
	Jumlah	427,593,297,676	100	502,406,950,387	100	556,578,398,231	100	595,505,909,241	100

Sumber : DPPKA Kab. Pacitan, diolah

Keterangan : Data setelah audit BPK

% : Proporsi Terhadap Total Pendapatan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama periode tahun 2006 sampai 2009, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil dimana pada tahun 2006 kontribusi PAD baru mencapai 3,93 %, tahun 2007 sebesar 4,38 %, tahun 2008 sebesar 4,26 % dan tahun 2009 mencapai 4,65%.

Pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat, dimana persentasenya mencapai 91,61 % pada tahun 2006 dan pada tahun 2009 mencapai 87,43 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Pacitan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, sehingga dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah masih bertumpu pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Selain itu kontribusi

PAD yang masih kecil terhadap penerimaan APBD mengindikasikan bahwa Kabupaten Pacitan masih jauh dari kemandirian dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Sementara itu komposisi belanja APBD selama kurun empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Target dan Realisasi Belanja APBD
Tahun Anggaran 2006 - 2009

No	JENIS BELANJA	2006		2007		2008		2009	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Belanja Tidak Langsung	272.474.059.877	238.285.629.270	304.895.793.963	277.261.840.703	336.856.832.847	361.202.676.400	426.304.828.869	405.015.785.902
F	Belanja Pegawai	214.791.339.821	189.277.629.824	246.300.593.237	226.526.864.423	306.307.730.347	286.461.433.420	358.008.728.326	346.064.175.149
G	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
D	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065.000,00	6.338.771.220	3.632.000,00	3.076.000,00
F	Belanja Bantuan Sosial	6,60	0,00	12.162.880,00	10.758.464,340	4.587.180,00	4.097.328.750	6.362.163,00	6.690.057,940
F	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	48.065.633.542	48.748.368.302	2.081.043.700	1.833.171.800	1.820.311,700	1.703.808.854	2.502.958,043	2.454.612.613
O	Belanja Bantuan Keuangan Keas ke Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	38.026.920,500	37.844.294.140	38.429.110,000	37.738.498.800	46.801.060,000	46.414.070,000
H	Belanja Tidak Terserap	6.817.068.314	3.259.430.144	6.948.456.444	1.778.544,000	4.628.000,000	1.848.138,750	2.000.083,000	96.670,000
2	Belanja Langsung	170.959.625.289	162.953.632.912	221.756.305.118	201.834.564,988	252.051.143,645	286.732.208,811	304.208.874,950	108.704.081,820
E	Belanja Pegawai	19.463.549,849	15.842.297,420	26.842.465,300	24.898.761,846	25.728.217,550	23.444.582,887	22.968.632,300	21.212.228,404
B	Belanja Barang Dan Jasa	77.369.023.398	72.060.796,020	78.786.620,370	70.056.164,461	88.278.728,740	83.167.000,832	78.860.312,500	76.301.462,851
C	Belanja Modal	78.737.052,319	74.541.539,063	116.127.269,438	106.919.678,656	138.046.197,656	129.100.543,612	162.382.930,150	97.189.050,565
D	Jumlah Belanja	443.033.684,943	400.239.261,762	526.652.109,081	479.106.405,691	618.918.476,892	687.918.184,711	824.614.000,810	806.718.817,723

Sumber : DPPKA Kab. Pacitan, diolah

Keterangan : Data setelah audit BPK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa belanja APBD Kabupaten Pacitan masih didominasi oleh belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai dimana pada tahun 2007 prosentase belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah sebesar 52 %, meningkat menjadi 59 % pada tahun 2008, dan 67% pada tahun 2009. Sementara itu prosentase belanja tidak langsung terhadap total belanja APBD menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2007 prosentasenya mencapai 42% menurun menjadi 41 % pada tahun 2008, dan 33 % pada tahun 2009. Terbatasnya anggaran belanja langsung tersebut semakin menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan akselerasi pembangunan, sehingga ke depan perlu digali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

c. Kondisi Infrastruktur

1. Permukiman

Kondisi lingkungan permukiman di Kabupaten Pacitan pada 5 (lima) tahun terakhir ini menunjukkan kondisi yang semakin baik, diindikasikan dengan meningkatnya jumlah rumah layak huni sebesar 2.20%, dan peningkatan

rumah bersanitasi dimana hal ini didukung dengan peningkatan kondisi jalan lingkungan. Kondisi luasan lingkungan permukiman kumuh mengalami penurunan rata-rata 10 ha per tahun. Berikut disajikan kondisi permukiman di Kabupaten Pacitan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.50
Perkembangan Kondisi Permukiman Tahun 2006-2009

No	Uraian	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Rumah Layak Huni	90.189	92.647	95.196	97.667
2	Rumah Bersanitasi	104.917	109.289	112.786	116.759
3	Jalan Lingk yang dibangun	1.296.786	1.302.393	1.332.664	1.344.381
4	Luasan lingk permukiman kumuh	169	159	149,13	138,99

Sumber : Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan, diolah

Sedangkan dari aspek cakupan layanan kebersihan di Kabupaten Pacitan mengalami kondisi yang stagnan hal ini disebabkan perkembangan penduduk di Kabupaten Pacitan yang sangat pesat sehingga perkembangan infrastruktur persampahan tidak dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kebersihan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepan diperlukan perencanaan dengan menggunakan pendekatan proyeksi antara peningkatan penduduk dan kebutuhan infrastruktur sehingga kebutuhan layanan kebersihan dapat tercukupi. Dibawah ini disajikan parameter kebersihan di Kabupaten Pacitan :

Tabel 2.51
Perkembangan Kondisi Parameter Kebersihan di Kabupaten Pacitan

NO	Uraian	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Luas daerah layanan kebersihan (Ha)	3.471	3.471	3.471	3.471
2	Luas Hutan Kota (Ha)	0,5	2,5	2,5	2,5
3	Sampah terangkut ke TPA (m ³ /hari)	106	104	100,15	97,6
4	Individual septic tank (KK)	81.523	81.523	94.339	99.631
5	Luas tutupan terumbu karang (Ha)	10,97	10,97	10,97	10,97

Sumber : Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan, diolah

2. Jaringan Sumber Daya Air

Infrastruktur sumber daya air meliputi aspek, drainase, irigasi dan air bersih. Sistem drainasi di Kabupaten Pacitan meliputi drainase primer, drainase sekunder dan drainase tersier. Drainase primer merupakan drainase alami yaitu sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Pacitan, sedangkan drainase

sekunder dan tersier merupakan drainase buatan yang rencananya akan dikembangkan di sepanjang ruas jalan di kawasan perkotaan.

Kondisi saluran drainase pada tahun 2009 dari panjang saluran 497.109 meter, terdiri dari 136.034 meter jenis saluran pasangan, 11.068 meter jenis saluran tertutup, dan 344.338 meter berupa jenis saluran tanah. Sedangkan kondisi saluran drainase dari 497.109 meter panjang saluran, 129.089 meter dalam kondisi baik, 18.295 meter dalam kondisi sedang, dan 15.956 meter dalam kondisi rusak.

Sedangkan untuk infrastruktur irigasi selama ini mengandalkan keberadaan embung dimana pembangunan dan pengembangan embung disamping untuk memenuhi kebutuhan air bersih, juga dapat dimanfaatkan untuk sarana irigasi lahan pertanian.

Sistem irigasi di Kabupaten Pacitan pada tahun 2009 terdiri dari Bendung sebanyak 410 unit, dengan kondisi : baik 28,29%, rusak ringan 8,78%, rusak sedang 12,44% dan rusak berat 60,49%. Sedangkan saluran air sebagai penghubung aliran irigasi ke sawah-sawah memiliki panjang total 550,535 km, dengan kondisi : baik 28,78%, rusak ringan 18,78%, rusak sedang 22,93% dan rusak berat 29,51%.

Kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Pacitan banyak mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam. Untuk mengoptimalkan pertanian di wilayah Pacitan yang merupakan daerah tandus, perlu adanya peningkatan pada kualitas dan kuantitas jaringan irigasi mengingat sebagian besar sawah di Pacitan masih merupakan sawah tadah hujan. Peningkatan sarana irigasi diharapkan akan dapat meningkatkan produktifitas pertanian. Keberadaan embung yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan dimanfaatkan untuk sarana irigasi lahan pertanian, meliputi :

- 37 embung di Kecamatan Donorojo dalam DAS Baksoko
- 3 embung di Kecamatan Ngadirojo dalam DAS Lorog
- 2 embung di Kecamatan Ngadirojo dalam DAS Pagotan
- 29 embung di Kecamatan Pringkuku dalam DAS Baksoko
- 7 embung di Kecamatan Pringkuku dalam DAS Baksoko
- 1 embung di Kecamatan Sudimoro dalam DAS Bawur
- 2 embung di Kecamatan Sudimoro dalam DAS Lorog
- 1 embung di Kecamatan Tulakan dalam DAS Grindulu
- 7 embung di Kecamatan Tulakan dalam DAS Pagotan

Sementara itu untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Pacitan untuk wilayah perkotaan selama ini didukung oleh jaringan PDAM sedangkan

untuk wilayah perdesaan didukung oleh jaringan perpipaan yang dikelola HIPPAM dan air bersih yang bersumber dari sumur dangkal .

Cakupan pelayanan prasarana air bersih di Kabupaten Pacitan tiap tahun mengalami peningkatan demikian juga jumlah desa yang terlayani air bersih. Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Pacitan meningkat rata-rata 6,25% tiap tahunnya. Jaringan perpipaan di wilayah-wilayah yang dulu merupakan daerah rawan air bersih kini sudah dapat menikmati air bersih dengan penambahan jaringan pipa ke wilayah yang terpencil sampai tahun 2009 sepanjang 170.859,3 meter, secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.52
Kondisi Keterlayanan Air Bersih di Kabupaten Pacitan

No	Uraian	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Penduduk Terlayani Air Bersih (Jlwa)	145.663	156.106	162.234	165.506
2	Desa Terlayani Air Bersih (Desa)	101	103	106	107
3	Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih (RT)	32.201	34.679	36.574	37.927
4	Perpipaan (meter)	102.202	126.767	157.512,3	170.859,3

Sumber : Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan, diolah

Selanjutnya untuk penyediaan air bersih melalui jaringan PDAM, jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Peningkatan jumlah pelanggan air bersih tersebut tidak terlepas dari peningkatan produksi air bersih yang dihasilkan PDAM karena adanya penemuan sumber-sumber air baru dan penambahan jaringan perpipaan. Secara rinci perkembangan jumlah rumah tangga pelanggan PDAM beserta produksi air bersih dapat diketahui dari tabel berikut :

Tabel 2.53
Jumlah Pelanggan, Produksi dan Nilai Produksi PDAM
Tahun 2003-2008

No	Uraian	Tahun						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pelanggan (Unit)	7.589	6.500	6.888	7.875	8.695	9.578	10.039
2	Produksi (M ³)	874.760	1.555.553	1.236.590	1.992.627	1.844.822	2.007.568	2.190.876
3	Nilai Produksi (Rp)	1.260.165.840	1.680.830.400	2.132.228.260	2.537.114.760	3.044.199.860	3.134.552.200	4.040.751.160

Sumber : Pacitan Dalam Angka, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggan PDAM tahun 2003 sejumlah 7.589 meningkat menjadi 9.578 unit pada tahun 2009.

Sementara itu produksi air bersih meningkat dari 874.760 M³ pada tahun 2006 menjadi 2.007.568 M³.

Namun apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Pacitan, jumlah pelanggan PDAM tersebut masih sangat kecil, dimana dari 142.031 rumah tangga pada tahun 2008 baru 8.695 yang menjadi pelanggan PDAM atau hanya 6,12%. Minimnya masyarakat yang menggunakan air bersih PDAM utamanya disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan sumber air di Kabupaten Pacitan. Masyarakat Pacitan lebih banyak menggunakan sumber air dari sumur dan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangganya.

Secara keseluruhan cakupan pelayanan air bersih baik yang dilayani oleh jaringan PDAM, maupun melalui perpipaan HIPPAM dan sumur dangkal pada tahun 2009 dari 159.098 jiwa (28,72%) berada di wilayah cukup air bersih, dan 394.918 jiwa (71,28%) berada di wilayah rawan air bersih. Adapun cakupan pelayanan air bersih melalui jaringan PDAM mencapai 36.826 jiwa (6,65%), melalui perpipaan HIPPAM mencapai 48.709 jiwa (8,79%), melalui sumur dangkal mencapai 121.319 jiwa (21,9%), dan penduduk yang belum terlayani air bersih mencapai 347.162 jiwa (62,66%).

3. Jaringan Transportasi

Salah satu daya tarik masuknya investasi adalah infrastruktur yang memadai, baik itu infrastruktur jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi.

Selama ini akses jalan ke Kabupaten Pacitan masih terbatas dan kondisinya masih belum nyaman, sehingga hal ini menyebabkan tingkat perkembangan investasi di Pacitan menjadi stagnan. Kondisi jalan berdasarkan status jalan di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54
Panjang Jalan di Kabupaten Pacitan

Jalan Negara	99,166	12,38
Jalan Propinsi	97,270	12,15
Jalan Kabupaten	604,127	75,47
Jumlah	800,563	100

Sumber : Kabupaten Pacitan Dalam Angka, diolah

Dari tabel di atas diketahui bahwa panjang jalan di Kabupaten Pacitan sepanjang 800,563 Km, dengan persentase 12,38% (99,166 Km) merupakan jalan Negara, 12,15% (97,270 Km) jalan propinsi, dan 75,47% (604,127 Km). Dengan dilaksanakannya program pembangunan JLS di

kawasan selatan Jawa Timur, termasuk wilayah Kabupaten Pacitan, maka ditahun mendatang akan terjadi penambahan jalan propinsi.

Sedangkan kondisi jalan kabupaten dan jalan poros desa di Kabupaten Pacitan dapat diketahui dari tabel berikut :

Tabel 2.55
Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Poros Desa Tahun 2006-2009

No	Kondisi Jalan	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Panjang Jalan Kabupaten (Meter)	604.127	798.000	798.000	798.000
	- Jalan kondisi Aspal baik (M/%)	237.849 (39,37%)	287.354 (36,01 %)	393.630 (49,33%)	376.840 (47,22%)
	- Jalan kondisi aspai rusak ringan (M/%)	148.978 (24,66%)	123.185 (15,44 %)	139.961 (17,54%)	192.762 (24,16%)
	- Jalan kondisi aspal rusak berat (M/%)	160.540 (26,57%)	341.181 (42,75 %)	223.098 (27,96%)	169.464 (21,24%)
	- Jalan Macadam (M/%)	56.760 (9,39%)	46.280 (5,80 %)	41.311 (5,18%)	58.934 (7,39%)
	- Jalan Tanah (M/%)	-	-	-	-
2	Panjang Jalan Poros desa	421.800	227.927	227.927	229.317
	- Jalan Aspal (M/%)	129.450 (30,08%)	107.470 (47,15%)	125.986 (55,24%)	137.146 (60%)
	- Jalan Batu (M/%)	256.000 (61,49%)	64.107 (36,90%)	68.281 (29,96%)	57.122 (24,91%)
	- Jalan Tanah (M/%)	36.350 (8,61%)	36.350 (15,95%)	35.050 (15,4%)	35.050 (15,28%)

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan, diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kondisi jalan di Kabupaten Pacitan untuk jalan kabupaten masih perlu peningkatan secara berkesinambungan karena masih terdapat jalan kondisi aspai rusak berat dengan prosentase yang cukup besar yaitu 26,57 % pada tahun 2006, 42,75 % pada tahun 2007, 27,96 % pada tahun 2008 dan 21,24 % pada tahun 2009. Sementara itu untuk jalan kabupaten masih terdapat jalan makadam yang pada tahun 2009 prosentasenya mencapai 7,39 %.

Dengan kondisi jalan seperti diuraikan di atas maka akan menghambat distribusi dan pergerakan barang dan jasa dari wilayah pedesaan (pertanian) menuju kota dan daerah di sekitarnya, karena jalan merupakan fasilitas utama yang mendukung kegiatan ekonomi di suatu daerah.

Dari aspek jaringan angkutan transportasi di Kabupaten Pacitan dibagi menjadi dua, yaitu transportasi dalam kota dan antar kota. Untuk transportasi dalam kota selain kendaraan pribadi, tersedia juga angkutan umum bermotor antara lain, seperti bus, minibus, dan ojek (roda dua); serta angkutan tak bermotor (becak dan dokar). Dari keseluruhan aspek pelayanan transportasi di Kabupaten Pacitan, hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pacitan telah terjangkau pelayanan angkutan

umum roda empat. Sedang pada kawasan pedesaan yang jauh dari jaringan angkutan umum masih dilayani oleh ojek (roda dua).

Pada masa yang akan datang Kabupaten Pacitan yang dilalui jalur transportasi lintas selatan Jawa akan memiliki posisi strategis sebagai kota penghubung antar kota – kota bagian selatan pulau Jawa antara lain Malang – Jogjakarta – Purwokerto dan Bandung. Pelayanan jaringan transportasi antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi serta angkutan pedesaan di wilayah Kabupaten Pacitan telah tersedia 1 (satu) terminal induk, 5 (lima) sub terminal, dan 1 (satu) terminal angkutan kabupaten.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan transportasi adalah belum terbentuknya sistem jaringan dan moda transportasi yang efisien, dimana masih terjadinya percampuran pelayanan transportasi regional dengan pelayanan transportasi kota serta belum adanya pelayanan angkutan umum yang menghubungkan antara pusat - pusat pelayanan fasilitas transportasi yang mendukung bagi pengembangan perekonomian daerah. Permasalahan yang klasik bagi Kabupaten Pacitan yang lain dari bidang transportasi adalah belum sinerginya perencanaan transportasi dengan rencana pengembangan dan pembangunan pusat – pusat pertumbuhan yang ada dan akan muncul di Kabupaten Pacitan. Bila ditinjau dari data jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Pacitan sebagai sarana angkutan orang dan barang pada tahun 2009 terdapat 49.292 kendaraan pribadi (122 buah sedan, 72 buah jeep, 1.323 station, 291 bus, 2006 truk dan 45.473 sepeda motor), 1.443 kendaraan umum (102 station, 400 bus, 941 truk) dan 1.288 kendaraan dinas (4 sedan, 4 jeep, 135 station, 4 bus, 18 truk, 1.123 sepeda motor)

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Pacitan semakin hari semakin kompiek dan perlu penanganan segera, mulai dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, pusat perdagangan, industri dan lain-lain) hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat dan dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Jumlah sarana prasarana persampahan yang ada pada saat ini rata-rata umur teknisnya sudah diatas 5 (lima) tahun. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.56
Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan
Tahun 2006-2009

NO	URAIAN	2006	2007	2008	2009
1.	Tpa (buah)	1	1	1	1
2.	Tempat sampah permanent (buah)	10	10	10	7
3.	Amroll truck (buah)	3	3	3	3
4.	Truck sampah (buah)	2	2	2	2
5.	Container (buah)	14	14	15	21
6.	Gerobak sampah (buah)	60	60	79	76
7.	Mobil tangga	1	1	1	1
8.	Kendaraan roda tiga	2	3	3	6
9.	Truck tangki	1	1	1	2
10.	Mobil pick up	2	2	2	2
11.	Diesel air	3	3	3	2
12.	Mesin pemotong rumput dorong	5	5	6	8
13.	Mesin pemotong rumput gendong	5	5	6	9
14.	Jalur hijau yang tertata (m ³)	6.542	6.642	8.828	10.324
15.	Luas taman (m ²)	14.691,94	14.622,39	15.222,39	15.222,9
16.	Penanganan sampah	8,30	10,42	15,02	21,00
17.	Pengangkutan sampah	70,00	74,00	81,49	86,4
18.	Daya tampung tps	82,70	106,70	147,00	130,68

Sumber : Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan, diolah

5. Jaringan Listrik

Perkembangan jaringan listrik di Kabupaten Pacitan tahun 2006-2009 sebagaimana nampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.57
Perkembangan Jaringan Listrik Tahun 2006-2009

NO	URAIAN	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Desa/Kel. bedlistrik	164	164	164	164
2	Distribusi JTM	563,03	563,03	618,72	618,72
3	Distribusi JTR	848,049	848,049	780,72	780,72
4	GRD	574	574	574	574
5	Transmisi	124	124	124	124
6	Gardu Induk	1	1	1	1
7	Sambungan Rumah	67.211	69.344	71.730	71.730
8	PLTS	-	-	84	93

Sumber : Pacitan Dalam Angka, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Pacitan telah memperoleh aliran listrik. Namun demikian ada beberapa wilayah dusun yang belum mendapatkan sambungan listrik PLN, dilayani melalui pengembangan energi alternatif yaitu, PLTS dan PLTD.

Selanjutnya perkembangan jumlah pelanggan listrik menurut jenis tarif dapat diketahui dari tabel berikut :

Tabel 2.58
Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Jenis Tarif Tahun 2003-2009

No	Jenis Tarif	Tahun						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Usaha	820	843	861	895	955	1.013	1.061
2	RT	63.109	64.375	66.123	67.211	69.344	71.730	73.569
3	Sosial	1.195	1.218	1.272	1.279	1.294	1.339	1.520
4	Kantor	264	269	272	272	273	270	287
5	Industri	21	24	26	28	32	36	35
6	Hotel	-	-	8	8	8	8	8
7	PPJ	393	462	470	481	501	526	527
	Jumlah	65.802	67.192	69.032	70.173	72.407	74.922	77.006

Sumber : Pacitan Dalam Angka, diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelanggan PLN menurut jenis tarifnya dari tahun 2003 sampai dengan 2009 menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2003 jumlah pelanggan sejumlah 65.802 unit, meningkat menjadi 74.006 unit pada tahun 2009.

Masih belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat seperti air dan ketersediaan listrik tidak bisa lepas dari kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang berbukit-bukit sehingga daerah-daerah terpencil sulit terjangkau oleh infrastruktur dasar tersebut, dan diperlukan investasi yang sangat besar untuk dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Pacitan.

Kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan menjadi salah satu penyebab belum seluruh dusun terjangkau jaringan listrik sebagaimana data pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Data Dusun Yang Belum Terjangkau Jaringan Listrik

No	Kecamatan	Desa	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Kondisi Daerah	Jarak dg Jaringan Listrik Tertekat (Km)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	Pringsuku	1. Darsono	1. Sumur	61	305	Perbukitan	1		
			2. Pipir	48	245		1		
			2. Demang Malang	31	201		8		
			2. Sugihwerit	1. Ngasem	27		87	Perbukitan	1,8
		2. Ngemplak	34	70	1				
		3. Tlogo Duntir	18	02	0,5				
		3. Glinggengan	1. Palahan	38	114	Perbukitan	0,5		
		Jumlah		3	7	348	1.080		11,8
		II.	Ngadirojo	1. Wonoharto	1. Sipea	300	1.300	Perbukitan	2,5
					2. Sebo	206	800	Perbukitan	2
2. Sidomulyo	1. Tamaneeri			78	280	Perbukitan	1,5		
	2. Ngalo (Jetak)			30	00	Perbukitan	0		
3. Wonodadi Wetan	1. Setang-Katir			100	-	Perbukitan	0,3		
	2. Ngobel			118	543	Perbukitan	1		
Jumlah				3	6	833	3.013		12,8

III.	Tulakan	1. Pacil	1. Klesem	205	908	Perbukitan	5
	Jumlah	1	1	264	998		6
IV.	Sudimoro	2. Ketanggung	1. Beras	179	627	Perbukitan	2,5
			2. Godan	200	700	Perbukitan	2,5
		2. Klepu	1. Samhwa Watan	04	328	Perbukitan	3,5
	Jumlah	2	3	473	1.666		8,6
V.	Donoroja	1. Donoroja	1. Jaten	67	276	Perbukitan	1
			2. Nganben	53	762		3
		2. Sekar	1. Tritis	24	96	Perbukitan	2
			2. Karat	11	40		2
			3. Klumpit	8	26		2
			4. Golek	20	80		2
			5. Gondengmanis	31	124		2
			6. Sobo	10	38		2
			7. Tukul	12	52		2
		3. Sendang	1. Gedangan	34	138	Perbukitan	2
		4. Kalek	1. Samengg	11	46	Perbukitan	2
		5. Klepu	1. Palan	38	164	Perbukitan	3
		6. Gadompol	1. Jukubang	36	144	Perbukitan	2
	Jumlah	6	18	386	1.484		27
VI.	Arjosari	1. Mlati	1. Watudepo	45	135	Perbukitan	3
		2. Sedayu	1. Jambu	92	277	Perbukitan	3,5
			2. Sugihwasa	147	509		3,5
		3. Gunungpati	1. Tleken	84	348	Perbukitan	2
		4. Pegutan	1. Pule	103	283	Perbukitan	2
		5. Gembong	1. Papingan	10	37	Perbukitan	5
		6. Boreng	1. Wani	124	424	Perbukitan	5
			2. Brangkal	147	449		5
		7. Gegeran	1. Prithi	47	125	Perbukitan	4
			2. Ngeong	97	203		4
		8. Kedungbendo	1. Jati	98	295	Perbukitan	5
		9. Mangunharja	1. Tegel	59	168	Perbukitan	5
			2. Medungan	29	87		5
			3. Euku	45	147		5
			4. Nglekok	29	103		5
		10. Jatisidikul	1. Tumpak	76	268	Perbukitan	4,5
		11. Tamoe	1. Gunungagung	150	420	Perbukitan	4
			2. Geding	30	74		4
			3. Krajed	30	107		4
			4. Tanggar	20	50		4
		12. Keranggede	Selu Gese	664	-	Perbukitan	0
		13. Kerangrejo	1. Ringinputih	71	273	Perbukitan	3
	Jumlah	13	33	2.333	4.313		98,0
VII.	Pacitan	1. Widom	1. Krajan	23	59	Dataran	5
			2. Kerang	13	37		5
			3. Ngatal	36	81		5
		2. Tambakreja	1. Klisat	184	749	Pegunungan	5
		3. Ponggok	1. Banaran	55	178	Perbukitan	1,5
			2. Sumber	21	69		1
			3. Shwalen	25	88		1
			4. Gemping	64	327		1,5
		4. Sembang	1. Pegunungan	112	369	Perbukitan	7
			2. Tukul	32	128		2
			3. Wani	05	328		3
		5. Simcbaya	1. Ngemplak	21	84	Dataran	6
			2. Sunhae	18	71		8
			2. Meadole	8	32		8
			4. Krajan	17	68		5

		8. Banjarsari	1. Karangasri	14	45	Lereng Pegunungan	1
		7. Sidoharjo	1. Baran	40	187	Pinggir Pantai	0,5
		8. Sukoharjo	1. Nitikan	16	53	Perbukitan	5
		9. Sedang	1. Krajan III	00	240	Perbukitan	2
		10. Sunarsmarjo	1. Cikan	28	87	Perbukitan	5
			2. Cikan	26	75		
		11. Bokusingo	1. Bedayu	44	252	Perbukitan	0,5
		12. Purwasnja	1. Jelli	18	62	Perbukitan	1
			2. Krajan	7	28	Dataran	0,5
			2. Demaling	10	28	Dataran	0,2
		13. Karnaeng	1. Karang (Santran)	8	24	Perbukitan	2
	Jumlah	13	28	1.602	3.758		68,7
VII	Bandar	1. Sandu	1. Trates	118	566	Perbukitan	2,5
			2. Panjing	213	650		1
			3. Kaliwungu	205	625		1
			4. Seren	148	698		2
			5. Siam	284	875		2,5
			5. Ngapak	384	780		1
		2. Kledung	1. Ngarjo	80	261	Perbukitan	1,8
			2. Jetis	100	338		1
			2. Ngrandu	123	524		2
			4. Banyudpeb	148	582		2,6
			5. Klatang	112	334		2,5
		2. Bangunad	1. Sono	212	300	Perbukitan	2,5
			2. Sapring	223	650		2,5
			5. Pmdedi	248	840		1
			4. Semil	231	895		1,5
			5. Tanjung	247	700		1,5
	Jumlah	9	18	3.047	0.228		24,8
IX	Purung	1. Boma	1. Nense	24	92	Perbukitan	3
			2. Pucung	33	150		2,5
			5. Tanggung	50	188		1
		2. Sooka	1. Sooka	12	34	Perbukitan	0,5
			2. Thekl	0	30		0,5
			5. Kadungmanjangan	18	56		0,5
		2. Pilon	1. Crabek	61	204	Perbukitan	1,5
			2. Buki	33	131		5
		4. Kendal	1. Krajan	-	-	Perbukitan	5
			2. Gunung	-	-		5
			3. Ngartan	-	-		5
			4. Padangan	-	-		5
		5. Marban	1. Suruhan	01	310	Perbukitan	1,5
			2. Ngjarangan Rt 04	24	120		0,5
		5. Tinatar	1. Ngemplak	154	596	Perbukitan	2
			2. Pakis	107	385		4,5
			5. Pakung	105	387		8,5
		7. Keboneari	1. Kabanagung	-	-		1,5
	Jumlah	7	18	739	2.710		61
X	Tagelombo	1. Tahunan	1. Gmgol	154	854	Perbukitan	2,6
			2. Sendang dan Mbarat	150	507		2,5
		2. Kemuning	1. Grigek	210	885	Perbukitan	3,5
		3. Ploso	1. Weni	255	881	Perbukitan	0,5
			2. Sambunan	307	1.358		3,1
		4. Gemahajo	1. Keligondeng	285	912	Perbukitan	2,5

		8. Pucangombo	1. Pager	885	1.513	Perbukitan	4
			8. Kaliogen	801	1.407		8,3
		8. Ngraco	1. Ngodo	885	1.808	Perbukitan	1,3
		7. Gedengen	1. Gebang	130	483	Perbukitan	3
		8. Kebondalem	1. Pangkol	174	599	Perbukitan	1,5
	Jumlah	8	11	8.874	11.500		28,2
XI.	Kabonegung	1. Sidomulyo	1. Weweran	27	112	Perbukitan	0,3
		2. Ketipugal	1. Klurih	20	80	Perbukitan	1,5
			2. Pniwo	16	58	Perbukitan	1
		3. Karangnongko	1. Jatan	30	115	Perbukitan	1,5
		4. Sangrehen	1. Katanggung	30	118	Perbukitan	1,5
		5. Plumbungan	1. Nyemono	30	115	Perbukitan	1
			8. Tengger	40	138	Perbukitan	1,5
		8. Punjung	1. Wonojoyo	80	200	Perbukitan	3
			2. Ngunut	40	120	Perbukitan	2
		7. Kaba	1. Klepu	20	78	Perbukitan	1
			2. Wonojoyo	30	120	Perbukitan	0,5
			3. Krajan	30	120	Perbukitan	1
	Jumlah	7	12	373	1.380		16,8
XII	Newangen	1. Gondang	1. Joao	700	2.800	Pegunungan	2
		2. Mujing	1. Blebeg Pakel	215	880	Pegunungan	1
		8. Newangen	1. Kasihan	435	1.740	Pegunungan	2
		4. Sempu	1. Tanggung	350	1.400	Pegunungan	1,5
		8. Jeba Lor	2. Dewuhan & Pakung	335	1.340	Pegunungan	1,5
		8. Tokewi	2. Bedut dan Jelok	305	1.220	Pegunungan	1,5
		7. Punggung	1. Burebenyu	210	840	Pegunungan	2
			2. Pegarsari	200	800	Perbukitan	1
		8. Pakisberu	1. Tempel	225	000	Pegunungan	0,5
		9. Ngromo	1. Buku	170	880	Pegunungan	0,5
		8	12	3.145	12.688		13,5
	Jumlah	78	188	18.318	84.112		370,8

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan, diolah
Data Sampai Dengan Desember 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun 2010, dari 171 Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan, masih terdapat 75 desa yang sebagian dusunnya belum terjangkau jaringan listrik. Jumlah dusun yang belum terjangkau jaringan listrik sebanyak 153 dusun. Untuk menjangkau dusun-dusun terpencil yang kondisi geografisnya berupa pegunungan dan perbukitan tersebut, perlu dikembangkan PLTS dan PLTD sebagai sumber energi alternatif, selain perlunya upaya secara terus menerus untuk penambahan jaringan listrik PLN.

5. Jaringan Telekomunikasi

Infrastuktur lain yang terus menerus harus dikembangkan adalah teknologi informasi dan komunikasi. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi pada dasawarsa terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat pesat sehingga membuat masyarakat semakin sadar pentingnya komunikasi dan informasi yang cepat. Untuk penyediaan sarana komunikasi terjadi peningkatan sambungan pesawat telepon selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, namun seiring dengan berkembangnya telepon seluler maka pada tahun 2008 dan 2009 terjadi penurunan jumlah sambungan telepon sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.60
Banyaknya Satuan Sambungan Telepon (SST) dan Wartel
Tahun 2003-2008

No	Jenis Tarif	Tahun						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	SST	6.603	7.966	7.938	8.385	8.538	7.762	7.681
2	Wartel	298	315	261	175	119	72	65
	Jumlah	7.101	8281	8199	8560	8657	7834	7746

Sumber : Pacitan Dalam Angka, diolah

Dengan semakin berkembangnya teknologi telekomunikasi seluler sampai saat ini sebagian besar wilayah Kabupaten Pacitan sudah tercover berbagai operator seluler yang semakin menjamur. Seiring hal tersebut pemerintah Kabupaten Pacitan telah menyiapkan sistem penataan tower dengan Sistem Menara Bersama, hal ini disamping untuk memenuhi cakupan seluruh coverage wilayah Kabupaten Pacitan juga untuk meminimalisir jumlah BTS (Tower Telekomunikasi) yang akan bermuara pada hutan tower.

d. Angka Kriminalitas dan Jumlah Demonstrasi

Kondisi keamanan suatu daerah merupakan salah satu aspek terciptanya iklim investasi yang kondusif, selain aspek pelayanan publik serta kondisi infrastruktur. Selama ini kondisi keamanan di Kabupaten Pacitan cukup baik, walaupun terjadi kasus-kasus gangguan keamanan namun tidak menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat.

Adapun gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2009 dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 2.61
Daftar Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaporkan
Tahun 2006-2009

No.	Jenis Gangguan Trantibum	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1	Pencurian	35	43	57	80
2	Perampokan	-	-	-	-
3	Pembunuhan	2	2	2	2
4	Penganlayaan	7	4	12	18
5	Penipuan	1	5	9	17
6	Pemerasan	-	-	-	-
7	Pelanggaran lalu lintas	-	4867	3224	3764
8	Kebakaran	-	-	-	-
9	Sengketa tanah	-	-	-	-
10	Demontrasi	-	-	14	10
11	Gangguan lain / laka lintas	86	132	200	190
12	Gantung diri				
Jumlah		131	5053	3518	4081

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pacitan, diolah

e. Pelayanan Perizinan

Ikiim investasi yang kondusif merupakan salah satu daya trik masuknya Investasi di suatu daerah. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan agar tercipta ikiim Investasi yang kondusif adalah penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk didalamnya pelayanan perijinan. Dalam rangka mendukung hal tersebut maka Kabupaten Pacitan telah menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), serta Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan sebagai SKPD yang melaksanakan PTSP.

Adapun jenis-jenis Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perijinan adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.62
Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	NO	URAIAN
1	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	41	Izin Kolam renang/Pemandian Umum Laik Sehat
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	42	Izin Pemeriksaan Kualitas Air Pada Depot Air Minum Isi Ulang
3	Izin Jasa Kontruksi	43	Izin Pengobatan Tradisional
4	Izin Penggunaan Jalan Kabupaten	44	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah
5	Izin Penggalian Jalan Kabupaten	45	Izin Tanda Daftar Gudang

6	Penggunaan Klos Pasar	46	Izin Tanda Daftar Perusahaan
7	Penggunaan Tanah di Kawasan Pasar	47	Izin Usaha Industri
8	Izin Trayek	48	Izin Tanda Daftar Industri
9	Izin Penyimpangan Trayek (Incidental)	49	Izin Usaha Perdagangan
10	Pamakaian Klos Terminal	50	Izin Usaha Pertambangan Umum
11	Izin Usaha Perparkiran (Penitipan)	51	Izin Usaha Pengelolaan Pemondokan
12	Izin Usaha Bengkel	52	Izin Migas
13	Izin Usaha Angkutan	53	Izin Kelistrikan
14	Penggunaan Tanah Daerah	54	Izin Reklame
15	Penggunaan Gedung	55	Izin Gangguan (HO)
16	Penggunaan Rumah Dinas	56	Penggunaan Tanah di Kawasan Pariwisata
17	Penggunaan Alun-alun	57	Penggunaan Klos di Kawasan Pariwisata
18	Penggunaan Tempat Olah Raga	58	Izin Usaha Jasa Pramuwisata
19	Izin Apotek	59	Izin Usaha Jasa Pariwisata
20	Izin Kerja Apoteker	60	Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
21	Izin Kerja Asisten Apoteker	61	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi
22	Izin Balak Pengobatan	62	Izin Usaha Penyediaan air Minum
23	Izin Rumah Bersalin	63	Izin Usaha Penyediaan Angkutan Pariwisata
24	Izin Tempat Praktek Dokter	64	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta
25	Izin Praktek Dokter	65	Izin Usaha Kawasan Pariwisata
26	Izin Tempat Praktek Bidan Dan Perawat	66	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
27	Izin Praktek Bidan	67	Pemberian Nomor Induk Kesenian
28	Izin Praktek Perawat Gigi	68	Rekomendasi Seni Pertunjukan
29	Izin Praktek Perawat	69	Izin Usaha Perikanan
30	Izin Tempat Rumah Sakit Swasta	70	Izin Kepemilikan Kapal
31	Izin Laboratorium	71	Izin Usaha Peternakan
32	Izin Optik Izin	72	Izin Usaha Pemotongan Hewan
33	Kerja Refraksionis	73	Izin Usaha Penyalur Jasa Tenaga Kerja
34	Izin Praktek Fisioterapi	74	Izin Penggunaan Instalasi Penyalur Petir
35	Izin Rumah Makan/Restoran Laik Sehat	75	Rekomendasi Paspor
36	Izin Usaha Jasa Boga Laik Sehat	76	Izin Usaha Pelatihan Kerja Lembaga Swasta
37	Izin Produk Pangan Industri Rumah Tangga Layak Sehat	77	Pengesahan Peraturan Perusahaan
38	Izin Hotel/Motel/Penginapan	78	Izin Penggunaan Ketel
39	Izin Pantil Pijat	79	Izin penggunaan Instalasi Kebakaran
40	Izin Pusat Kebugaran	80	Izin Tempat Perjualan Minuman Beralkohol

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Kab. Pacitan

Upaya peningkatan pelayanan masyarakat dilakukan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana penerapan SPM ini pada dasarnya

adalah upaya untuk memberikan jaminan/kepastian dari pelayanan administrasi pemerintahan kepada penerima pelayanan yang meliputi standar mekanisme pelayanan, standar biaya, standar waktu penyelesaian, baik proses permintaan/pengajuan atau pengusulan maupun proses pengaduan, standar produk pelayanan, standar sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam pelayanan umum, standar kompetensi petugas pemberi pelayanan.

f. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan antara penduduk usia produktif dan penduduk usia tidak produktif selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63
Rasio Ketergantungan Tahun 2005 s/d 2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	137.236	116.578	121.776	119.282	128.352
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	53.071	61.489	74.701	77.756	75.782
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	190.307	178.067	196.477	197.038	204.134
4	Jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun	361.452	373.088	358.785	359.991	354.510
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,53	0,48	0,55	0,55	0,58

Sumber : Pacitan Dalam Angka, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk tidak produktif, dimana pada tahun 2005, dari 100 orang penduduk usia produktif menanggung 53 orang penduduk usia tidak produktif dan pada tahun 2009, dari 100 orang penduduk usia produktif menanggung 58 orang penduduk usia tidak produktif.

2.5 Gambaran Tata Ruang Wilayah

Kedudukan Kabupaten Pacitan dalam kerangka wilayah secara Nasional dan Provinsi Jawa Timur dapat diketahui dari dokumen RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2023, dimana Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan terdiri dari :
 - a. Kebijakan dan strategi sistem perkotaan

Kebijakan sistem perkotaan di Kabupaten Pacitan adalah Kawasan perkotaan dengan kegiatan utama bukan pertanian diarahkan untuk memiliki pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, pelayanan perekonomian, pelayanan infrastruktur dengan skala perkotaan.

Adapun strategi bagi sistem perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kawasan perkotaan memiliki rencana tata ruang yang terpadu, sehingga tidak terjadi ketimpangan perkembangan wilayah.
2. Meningkatkan pelayanan sistem prasarana wilayah di kawasan perkotaan dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah.
3. Pengembangan kawasan perkotaan diarahkan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya kawasan perdesaan sebagai daerah penyangga sesuai dengan fungsi/tipologi kawasan perdesaan.

b. Kebijakan dan strategi sistem pedesaan

Kebijakan sistem pedesaan di Kabupaten Pacitan adalah Kawasan pedesaan dengan kegiatan utama pertanian, diarahkan untuk memiliki pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, pelayanan perekonomian, pelayanan infrastruktur dengan skala pedesaan yang diharapkan dapat mendukung kegiatan utama di kawasannya.

Adapun strategi bagi sistem pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan semua kawasan pedesaan memiliki rencana tata ruang yang terpadu, sehingga tidak terjadi ketimpangan perkembangan wilayah.
2. Meningkatkan pelayanan sistem prasarana wilayah di kawasan pedesaan dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi yang kondusif dengan kawasan perkotaan.
3. Pengembangan kawasan pedesaan diarahkan untuk menunjang dan mendukung pengembangan kawasan perkotaan.

c. Kebijakan dan strategi sistem jaringan prasarana wilayah

Kebijakan penataan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi :

1. Pembangunan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dilakukan secara terpadu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan, pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pembangunan prasarana harus mampu mendukung perkembangan kawasan strategis agropolitan dengan fungsi didalamnya sebagai

sentra produksi dan pusat pengumpul, kemudian juga mendukung perkembangan kawasan strategis pariwisata dan kawasan strategis teknologi tinggi.

3. Meningkatkan pelayanan publik yang kondusif serta mengalokasikan berbagai fasilitas dan sarana kegiatan pelayanan kota ke seluruh wilayah kabupaten secara terstruktur.

Strategi penataan sistem jaringan prasarana wiiayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemudahan hubungan antar lokasi, kawasan, dan antar wiiayah dengan membangun jalan, meningkatkan fungsi dan peran jalan, kuantitas, kualitas, dan tingkat pelayanan jalan, penyediaan pedestrian, fasilitas terminal , pelabuhan laut dan penyediaan sarana angkutan umum.
2. Menyediakan fasilitas pelayanan dan fasilitas penunjang kegiatan budidaya di wilayah laut, seperti pelabuhan pendaratan ikan (PPI), tempat pelelangan ikan (TPI), stasiun bahan bakar, sarana pelayanan industri kelautan, dan sarana wisata bahari.
3. Menyediakan fasilitas pelayanan fasilitas penunjang pariwisata pada masing-masing Obyek wisata guna mendukung perkembangan objek wisata yang ada.
4. Mengembangkan Jalan Lintas Selatan Selatan (JLSS) guna menghubungkan system perdesaan antar wiiayah dan mendorong pertumbuhan wiiayah.
5. Menyediakan dan meningkatkan pengembangan fasilitas penunjang kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, mencakup fasilitas perbelanjaan/pasar, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olahraga dan lain-lain.
6. Meningkatkan pengembangan sumber-sumber air bersih, kapasitas instalasi pengolahan, sistem distribusi pelayanan, dan mewujudkan sistem produksi air bersih siap minum untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
7. Menjaga kelestarian badan-badan air serta mata air-mata air dan meningkatkan sediaan air tanah melalui pemantapan perlindungan kawasan-kawasan resapan air bagi pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan perdesaan, serta kawasan-kawasan lain yang belum atau tidak terlayani oleh sistem perpipaan.

8. Pengembangan sistem jaringan drainase air hujan, sistem pembuangan limbah domestik, limbah industri, dan persampahan secara terpadu, terencana dan terprogram untuk seluruh wilayah Kabupaten Pacitan dalam rangka penanggulangan banjir dan penyehatan lingkungan permukiman kota.
9. Peningkatan pengembangan sistem pelayanan energi listrik dengan, perluasan jaringan distribusi pelayanan, dan peningkatan kualitas pelayanan.
10. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sistem telekomunikasi dan informasi dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi dan informasi.

2. Kebijakan dan Strategi Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan meliputi :

a. Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung

Kebijakan pengelolaan bagi kawasan lindung adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan lindung secara terpadu dengan memperhatikan hubungan keterkaitan dan dampak kegiatan di ruang darat, ruang bumi, ruang laut, dan ruang udara terhadap ekosistem.
2. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kawasan lindung, baik permasalahan yang menyangkut status hukum kawasan maupun pemantapan fungsi kawasan.

Strategi pengelolaan bagi kawasan lindung adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan status hukum dan penegasan batas kawasan lindung.
2. Mengembangkan ruang hijau kota untuk menunjang fungsi lindung, mencakup hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, taman lingkungan, dan zona penyangga hijau kota (buffer zone).
3. Menekan seoptimal mungkin dampak negatif pembangunan dan perkembangan kawasan terhadap lingkungan.
4. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang mengalami kerusakan melalui kegiatan reboisasi, konservasi tanah dan air, serta upaya-upaya pemulihan lainnya.

b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Pacitan meliputi :

1. Menciptakan, menjaga, memupuk dan mengoptimalkan manfaat dan kesempatan yang ada dari keunggulan lokal yang dimiliki Kabupaten Pacitan.
2. Pengembangan secara terpadu di permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, kawasan strategis di wilayah darat, bawah tanah, udara, pesisir, dan di wilayah laut untuk menunjang perkembangan seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana dasar, untuk meningkatkan pengembangan potensi kawasan.
4. Meningkatkan laju pertumbuhan sektor/sub-sektor ekonomi yang produk-produknya telah mampu bersaing dan mengisi pasar diluar Kabupaten Pacitan serta mengamankan dan memantapkan pasar domestik untuk meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah kota.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah agar dapat mengisi peluang usaha.

Strategi pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengembangan segenap potensi yang ada dengan menekankan pengembangan pada sektor/subsektor unggulan dan sektor strategis, baik pariwisata, pertanian, pertambangan maupun industri, yang mampu memberi nilai tambah ekonomi yang tinggi tanpa harus merusak lingkungan
 2. Menyiapkan pembangunan kawasan strategis dengan menyediakan prasarana dan sarana pelayanan dasar.
 3. Meningkatkan keterkaitan kawasan permukiman perkotaan dengan kawasan permukiman perdesaan, terutama antara sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan pelayanan kota.
 4. Mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan potensi perekonomian daerah dengan mengkaitkan ekonomi antara pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterland*-nya.
 5. Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pacitan, Masyarakat dan Swasta dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Kebijakan dan strategi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dari tahap perencanaan, pengelolaan hingga pengawasan dan pengendalian.

Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

1. Strategi Perencanaan dilakukan dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, dengan arah menuju pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan, dengan memadukan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya pesisir.
2. Strategi Pengelolaan dilaksanakan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) bagi kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum.

Strategi pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan laut diarahkan untuk:

- meningkatkan pelestarian fungsi ekosistem pantai dan laut,
- mengendalikan kerusakan lingkungan pantai dan laut dan
- meningkatkan kemampuan masyarakat pantai dalam pengelolaan pantai dan laut.

Strategi Pengelolaan lingkungan wilayah pesisir, pantai dan laut ditujukan untuk:

- mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan secara terpadu dengan mengembangkan infrastruktur, kemampuan SDM,
- pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan,
- peningkatan produktifitas tambak melalui budidaya tumpangsari, dan rehabilitasi kawasan mangrove.

3. Strategi pengawasan dan pengendalian dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan rencana dan implikasinya terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir. Didalam pelaksanaannya, strategi pengawasan dan pengendalian meliputi penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi.

d. Kebijakan dan strategi kawasan strategis

Kawasan strategis di Kabupaten Pacitan, terdiri atas kawasan strategis sosio-kultural (kawasan pariwisata), kawasan strategis ekonomi (kawasan agropolitan) dan kawasan strategis teknologi tinggi. Adapun kebijakan dan strategi untuk masing-masing kawasan strategis adalah sebagai berikut:

Kebijakan bagi kawasan strategis sosio-kultural (kawasan pariwisata) terdiri atas:

1. Pengembangan sistem keruangan wisata terpadu melalui pembentukan kawasan pengembangan pariwisata dengan tema-tema khusus.
2. Pengembangan fasilitas layanan wisata terpadu dalam rangka pembentukan simpul-simpul pusat pelayanan skala regional dan local.
3. Pengembangan produk kepariwisataan mengacu pada pendekatan koridor wisata terpadu lintas batas wilayah (*borderless tourism*).
4. Pengembangan sistem dan jaringan aksesibilitas yang handal antar wilayah.

Strategi bagi kawasan strategis sosio-kultural (kawasan pariwisata) terdiri atas:

1. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pacitan melalui pengembangan dan peran objek wisata unggulan sebagai sumbu atau poros pengembangan dan objek potensial sebagai jaring-jaring pengembangan.
2. Pengembangan produk kepariwisataan Kabupaten Pacitan melalui strategi pengembangan tematik kepariwisataan terpadu dalam satu kesatuan kawasan pengembangan pariwisata.
3. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pacitan berbasis wisata alam dan wisata budaya melalui pengembangan paket-paket wisata yang kreatif dan inovatif.
4. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pacitan yang berwawasan lingkungan melalui sinergi pengelolaan lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan.

Kebijakan kawasan strategis ekonomi (kawasan agropolitan) yang terletak di Kecamatan Nawangan dan Bandar, adalah peningkatan pelayanan kebutuhan dasar untuk mendukung kegiatan pertanian namun dengan prinsip utama mengarah pada pelestarian lingkungan hidup.

Strategi kawasan strategis ekonomi (kawasan agropolitan) yang terletak di Kecamatan Nawangan dan Bandar, meliputi:

1. Pengembangan potensi pertanian dan industri yang mendukung dengan pendekatan agrobisnis.
2. Penyediaan infrastruktur yang memadai.

Kebijakan kawasan strategis teknologi tinggi saat ini dikembangkan di Kecamatan Sudimoro yaitu pengembangan kawasan PLTU. Kebijakan kawasan strategis teknologi tinggi diarahkan untuk memanfaatkan

sumber-sumber alam yang tersedia serta mengembangkan kegiatan-kegiatan didalamnya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Strategi kawasan strategis teknologi tinggi meliputi:

1. Menciptakan kondisi/bentuk lingkungan yang baik agar ekosistem setempat tidak terganggu dengan adanya kegiatan perkotaan dan PLTU.
2. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana yang lengkap, yang mampu menunjang seluruh kegiatan di Kecamatan Sudimoro.

3. Kebijakan dan Strategi Ruang Darat, Ruang Laut, Ruang Udara, dan Ruang Dalam Bumi

Strategi arahan penataan ruang darat dilakukan melalui upaya kelestarian lingkungan, termasuk melestarikan sumberdaya air, sumberdaya hutan dan suaka alam. Kegiatan yang perlu ditata agar ruang darat tetap terjaga kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik adalah dengan melakukan perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan yang terpadu bagi kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan, kegiatan industri dan kegiatan lainnya.

Strategi arahan penataan ruang laut dilakukan melalui upaya pelestarian ekosistem laut dan pesisir. Kegiatan yang perlu dikendalikan agar tidak terjadi penurunan daya dukung lingkungan adalah pengaturan kegiatan penangkapan hasil laut, pengaturan kegiatan wisata bahari, serta perlindungan lingkungan sekitar laut seperti dengan tanaman bakau pencegah abrasi.

Strategi arahan penataan ruang udara dilakukan terkait dengan penggunaan ruang udara sebagai ruang publik dan ruang udara Kabupaten Pacitan sebagai ruang latihan militer. Pengembangan penggunaan ruang yang terkait dengan saluran tegangan listrik, telekomunikasi dan ketinggian bangunan memiliki batasan ruang akibat adanya penggunaan ruang udara sebagai ruang latihan tempur udara TNI.

Strategi arahan penataan ruang dalam bumi dilakukan melalui pembatasan kelayakan wiiayah di Kabupaten Pacitan untuk dijadikan wiiayah pertambangan dan galian. Selain itu pengaturan pengolahan sumber daya dalam bumi diatur sesuai dengan pemeliharaan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan penatagunaan sumber daya alam yang mencakup bentang alam bukit dan perbukitan serta penambangan pasir laut bagi pengembangan pantai dan keperluan lainnya

perlu dilakukan kegiatan inventarisasi bentang alam bukit dan perbukitan, inventarisasi zona-zona layak tambang, dan menyusun pedoman teknis penatagunaannya.

4. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan berdasarkan Kebijakan Makro

- a. Berdasarkan RTRWN 2008-2027 : Kabupaten Pacitan termasuk dalam ordo kota dengan kategori II/C/2 yang berarti pada Tahap Pengembangan II yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wiyayah (PKW) Pengembangan Baru di sistem kota-kota di Indonesia. Dengan penetapan Kabupaten Pacitan sebagai PKW, maka perlu adanya revitalisasi dan percepatan pengembangan Kabupaten Pacitan sebagai salah satu kota pusat pertumbuhan skala nasional.
- b. Berdasarkan RTRW Jawa – Bali : merupakan bagian dari sub Koridor Pantai Selatan Jawa (Segmen Tengah) yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Pantai Selatan Jawa.
- c. Berdasarkan RTR Koridor Pantai Selatan Jawa : merupakan salah satu Kabupaten yang terpilih sebagai kawasan Prioritas yang akan ditangani;
- d. Berdasarkan RTRW Jawa Timur :
 - Merupakan bagian dari SWP Madiun dan sekitarnya yang memiliki rencana fungsi wiyayah sebagai pemerintahan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.
 - Berdasarkan pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatannya, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan kawasan utara dengan mengembangkan wilayah Selatan Jawa Timur dan Kabupaten Pacitan merupakan wiyayah yang harus diprioritaskan pengembangannya melalui Konsep Pengembangan Selatan-Selatan yaitu jalur Pacitan – Trenggalek – Tulungagung – Banyuwangi
 - Kedudukan Kabupaten Pacitan dalam konstelasi wiyayah Koridor Pantai Selatan Jawa tidak lepas dari sistem kota-kota yang ada, dimana Kota Pacitan merupakan pusat kegiatan lokal bagi daerah-daerah lain di sekitarnya yang menjadi wiyayah penghubung antar kota-kota sekitar baik di wilayah Jawa Timur (Citragung) maupun Jawa Tengah dan DIY (Pawonsari). Letak Kabupaten Pacitan yang berada di wiyayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadikan peran Pacitan sebagai pintu masuk Jawa Timur di wilayah pantai

Selatan Jawa. Pengembangan koridor pantai selatan akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan di wilayah Kabupaten Pacitan.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan gambaran kondisi umum daerah yang telah disajikan pada Bab II, maka dapat diketahui beberapa permasalahan yang di hadapi Kabupaten Pacitan, antara lain :

1. Tingginya Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih tergolong tinggi dikarenakan masih berada di atas angka kemiskinan nasional. Namun demikian selama 4 (empat) tahun terakhir jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 mencapai 26,94% menurun menjadi 24,74% di tahun 2007. Pada tahun 2008 sebesar 21,17%, dan pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 19,01%.

2. Tingginya Angka Pengangguran

Secara umum terjadinya pengangguran dapat disebabkan beberapa faktor antara lain terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia, pertumbuhan penduduk yang relatif cepat, iklim usaha yang kurang kondusif, terjadinya pemulangan tenaga kerja dari luar negeri (TKI), kualitas SDM yang tidak linier dengan tingkat pendidikan yang dicapai maka lebih memilih menjadi *urban oriented* dibanding *rural oriented*. Sementara akibat dari tingginya tingkat pengangguran adalah ketidakstabilan sosial ekonomi. Selama 4 (empat) tahun terakhir angka pengangguran mengalami penurunan, pada tahun 2006 sebanyak 6,91% menurun menjadi 2,72% di tahun 2007. Pada tahun 2008 sempat mengalami kenaikan sebesar 3,1% dan pada tahun 2009 kembali menurun menjadi 1,32%.

3. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam

Karena terbatasnya kemampuan SDM serta kuantitas maupun kualitas infrastruktur yang dimiliki, maka potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pacitan belum dapat dikelola secara optimal. Selama ini potensi sumber daya alam lebih banyak dijual ke luar daerah dalam bentuk bahan baku (*raw material*) sehingga belum memberikan nilai tambah yang tinggi bagi perekonomian daerah. Oleh karenanya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi sumber daya alam diperlukan investasi dalam berbagai bidang dengan tetap bertumpu pada

pengembangan potensi lokal dan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

4. Rendahnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM adalah pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. PBB telah menetapkan Milenium Development Goals (MDGs)/tujuan pembangunan milenium yang salah satunya adalah semangat untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak serta peningkatan daya beli.

5. Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Dan Pelayanan Publik

Kondisi pelayanan publik sampai saat ini masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), yang semuanya merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik. Pada dasarnya pemerintah melalui regulasi yang ada telah melakukan berbagai upaya agar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak diskriminatif, dan transparan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik maka diharapkan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat disamping itu mampu mengantisipasi perubahan lingkungan, paradigma dan kemajuan teknologi.

6. Kurang Memadainya Kondisi Infrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik mutiak sangat diperlukan dalam pembangunan daerah, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Disamping itu dukungan infrastruktur daerah yang berkualitas juga menjadi salah satu

daya tarik masuknya investasi. Dimana infrastruktur daerah tidak hanya terbatas infrastruktur transportasi khususnya jalan dan jembatan, namun juga meliputi infrastruktur lainnya seperti perumahan dan permukiman, air bersih, kebersihan, listrik, dan telekomunikasi.

7. Masih Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih

Kondisi geografis Pacitan yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan, serta pegunungan karst menyebabkan terbatasnya sumber air khususnya air bawah tanah. Akibatnya pada musim kemarau banyak terjadi kekeringan yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan air adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan air permukaan yang berasal dari air hujan, baik yang terkumpul di sungai maupun embung serta instalasi penampungan air hujan. Untuk mengantisipasi kebutuhan air yang semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk dan peningkatan aktifitas perekonomian, maka diperlukan keseriusan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air bersih di Kabupaten Pacitan.

8. Terdapatnya Kawasan Rawan Bencana Alam

Bencana alam merupakan kejadian luar biasa yang biasanya sulit untuk diramalkan terjadinya. Namun demikian, sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah untuk secara dini mampu mencegah dan menanggulangnya. Kondisi geografis Kabupaten yang sebagian besar terdiri dari perbukitan dan pegunungan, menyebabkan Kabupaten Pacitan menjadi salah satu kabupaten yang rawan terkena bencana alam. Dimana kawasan lindung di Kabupaten Pacitan yang tergolong sebagai kawasan rawan bencana terbagi atas empat jenis kawasan yaitu : kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah, kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami, serta kawasan rawan banjir.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana maka diperlukan standar penanganan bencana yang diatur dalam peraturan bupati atau peraturan daerah, sehingga penanganan bencana dapat lebih efektif dan efisien melalui dukungan dengan sumber daya manusia di bidang penanganan bencana yang berkualitas serta metode yang efektif.

3.2 Isu Strategis

1. Kemiskinan dan Kesenjangan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan umum yang dihadapi hampir seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Pacitan. Kemiskinan dengan segala problematikanya memerlukan keseriusan seluruh pihak dalam upaya pengentasannya, karena dari waktu ke waktu persoalan kemiskinan kian sulit dicarikan solusinya. Faktor penyebab kemiskinan bukan sekedar karena dan bersumber pada kelemahan dari masyarakat miskin itu sendiri, akan tetapi lebih karena faktor-faktor struktural di luar kemampuan si miskin yang cenderung semakin membuat masyarakat miskin tidak berdaya.

Di Kabupaten Pacitan pengaruh dari kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis tahun 1998 serta dampak terjadinya krisis keuangan global tahun 2009 telah menyebabkan semakin sulitnya kondisi masyarakat miskin karena meningkatnya harga kebutuhan hidup sehingga menurunkan daya beli masyarakat.

Sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan terus berupaya menurunkan jumlah masyarakat miskin melalui berbagai program-program pembangunan, dan hasilnya selama kurun tahun 2001 sampai dengan 2006 terjadi trend penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan. Pada tahun 2001 tingkat kemiskinan mencapai 31,16% (164.638 jiwa) terus menurun menjadi sampai 19,01 % pada tahun 2009.

2. Pengangguran dan Kualitas SDM

Isu pengangguran dan rendahnya kualitas SDM juga merupakan Isu sentral yang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan. Walaupun dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ada di Kabupaten Pacitan menunjukkan angka yang relatif rendah, dimana pada tahun 2002 TPT sebesar 3,58 (12.031 jiwa) dan mencapai 3,10 % pada tahun 2009. Angka tersebut secara umum lebih rendah dari tingkat pengangguran di Jawa Timur, hal tersebut salah satu faktornya adalah sebagian besar penduduk di Pacitan bekerja di sektor pertanian, sehingga TPT akan sulit untuk dihitung/tidak nampak secara jelas. Selain itu, TPT ini dihitung berdasarkan data pencari kerja saja. Sehingga belum sepenuhnya menggambarkan keadaan TPT yang sebenarnya.

Sementara itu dari aspek kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Pacitan, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah baru mencapai 6,6 tahun pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 6.71 tahun pada tahun 2009. Seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Pacitan harus terus berupaya keras untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Karena pada masa yang akan datang kualitas SDM masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis untuk mendukung keberhasilan suatu bangsa. Tingkat produktifitas dan kompetensi seseorang sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang cerdas dan terampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif. Sedangkan masalah mendasar dalam bidang pendidikan di Kabupaten Pacitan saat ini antara lain adalah angka putus sekolah yang masih cukup tinggi dan kualitas pendidikan yang belum memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang semakin kompetitif.

3. Ancaman Krisis Pangan

Ancaman krisis pangan berkaitan erat dengan penurunan ketersediaan pangan sebagai akibat semakin berkembangnya jumlah penduduk, berkurangnya lahan produktif, serta rendahnya nilai tukar petani sehingga profesi sebagai petani semakin tidak menarik.

Rendahnya nilai tukar petani disebabkan karena berbagai persoalan seperti kenaikan biaya produksi dan perolehan keuntungan yang semakin kecil karena rendahnya nilai jual produk pertanian.

Beberapa penyebab yang memungkinkan terjadinya penurunan dan krisis pangan di masa yang akan datang diantaranya adalah :(1) terjadinya alih fungsi lahan pertanian, (2) rendahnya nilai tukar produk pertanian, (3) belum terstandarnya produk pertanian serta kemasan produk yang tidak mendukung kebutuhan pasar, (4) penggunaan bibit, benih dan teknologi pertanian yang belum berkualitas, (5) menurunnya kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan, dan (6) perubahan iklim yang menyebabkan terbatasnya waktu tanam.

4. Penurunan Ketersediaan Energi

Penurunan ketersediaan energi khususnya energi tak terbarukan (minyak dan gas bumi) sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduk dan pertumbuhan industri yang memerlukan ketersediaan energi dalam jumlah besar. Keterbatasan energi yang tersedia selama satu dekade terakhir telah

menyebabkan harga energi menjadi semakin mahal, yang dampak berantainya adalah pada peningkatan harga kebutuhan masyarakat lainnya. Dalam rangka mengatasi keterbatasan ketersediaan energi, Pemerintah terus berupaya melalui penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan yang bersumber dari tanaman. Namun hal itu menimbulkan permasalahan baru karena bahan baku yang digunakan sebagian besar berasal bahan pangan sehingga berdampak pada peningkatan harga komoditi pangan seperti jagung, ubi kayu dan tebu sebagai bahan baku bio etanol.

Upaya lain untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan energi adalah melalui pemanfaatan energi alternatif yang ada di alam yaitu energi matahari, energi air, angin dan panas bumi.

5. Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

Pemanasan global dan perubahan iklim pada saat ini telah terjadi dan menimbulkan dampak serius seperti bencana banjir, longsor, badai tropis dan kekeringan yang terjadi hampir di seluruh belahan bumi.

Perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir ini menimbulkan dampak terhadap penurunan produksi pangan karena lahan pertanian terendam banjir di musim penghujan dan terancam kekeringan pada musim kemarau, sementara para nelayan tidak bisa melaut karena gelombang besar.

Pada saat ini dan di masa yang akan datang arah kebijakan pembangunan harus mampu mengantisipasi resiko pemanasan global dan perubahan iklim, disamping terus dilakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan sehingga meminimalkan dampak yang lebih ekstrim.

3.3 Prediksi Kondisi Umum Daerah

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, prediksi kondisi umum Kabupaten Pacitan untuk kurun waktu pada 20 tahun adalah sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan secara umum Kabupaten Pacitan akan mengalami perubahan geomorfologi dan lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup karena terjadinya pencemaran udara, air dan tanah akibat kemajuan pembangunan dan pola hidup masyarakat perlu diantisipasi.
2. Kondisi geomorfologi yang bervariasi di Kabupaten Pacitan disamping menyebabkan aksesibilitas daerah yang cenderung rendah, juga terdapat

potensi bencana alam yang bervariasi, seperti tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan (ketersediaan sumberdaya air), maka diperlukan perencanaan dan antisipasi yang baik sehingga potensi masalah yang akan terjadi dapat diminimalisir.

3. Wilayah kabupaten Pacitan yang cukup luas menghadapi potensi masalah dalam upaya pengendalian fungsi lingkungan hidup akibat cara eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan aspek konservasi, sehingga akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu Kabupaten Pacitan juga masih menghadapi masalah penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat.
4. Kawasan perbukitan Karst harus dapat dipertahankan kelestariannya dengan berbagai budaya karst dan terbangunnya laboratorium karst, sehingga dapat mendukung kemajuan sektor pariwisata, baik wisata alam maupun wisata pendidikan yang pada gilirannya akan dapat mendukung pendapatan masyarakat dan perkembangan perekonomian daerah.
5. Dengan program Keluarga Berencana yang didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, diperkirakan pertumbuhan penduduk akan semakin menurun. Pada tahun 2011 pertumbuhan penduduk Kabupaten Pacitan diperkirakan sebesar 0,028%, tahun 2016 sebesar 0,030%, tahun 2021 sebesar 0,032% dan tahun 2026 sebesar 0,035%.
6. Untuk 20 tahun mendatang, jumlah penduduk Kabupaten Pacitan akan semakin besar. Pada tahun 2011 jumlah penduduk diperkirakan sebesar 555.650 jiwa, tahun 2016 sebesar 639.163 jiwa, tahun 2021 sebesar 742.403 jiwa, dan tahun 2026 sebesar 869.037 jiwa.
7. Angkatan kerja di masa mendatang akan semakin bertambah, tetapi persentase terhadap total penduduk semakin menurun. Hal ini berarti terjadi struktur penduduk yang semakin menua, semakin meningkatnya usia harapan hidup, maka rasio penduduk tua terhadap usia produktif (15-64 tahun) akan semakin meningkat. Pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja diperkirakan 344.492 jiwa (62 % dari total jumlah penduduk), tahun 2016 sebesar 349.213 jiwa (54,63% dari total jumlah penduduk), tahun 2021 sebesar 350.810 jiwa (47,25% dari total jumlah penduduk), dan tahun 2026 sebesar 352.414 jiwa (40,55% dari total jumlah penduduk).

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro dan Kondisi Makro Kabupaten Pacitan
Tahun 2011-2026

NO	URAIAN	TAHUN PROYEKSI			
		2011	2016	2021	2026
1	Pertumbuhan Penduduk (%)	0,028	0,030	0,032	0,035
2	Jumlah Penduduk	555.650	639.163	742.403	869.037
3	Angkatan Kerja (orang)	344.492	349.213	350.810	352.414
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,87	0,75	0,63	0,54
5	Tingkat Kemiskinan (%)	18,20	14,25	10,5	6,75
6	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,52	7,38	8,24	9,10
7	Pendapatan Perkapita (Rp. Juta)	5,7	6,3	6,8	7,3
8	Pendapatan Asli Daerah (Rp. Milyar)	34	45	65	94

Sumber : Bappeda dan PM, Data diolah

8. Dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas, potensi sumberdaya alam yang besar, dan sumberdaya manusia yang berkualitas, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan akan semakin meningkat. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,52%, tahun 2016 sebesar 7,38%, tahun 2021 sebesar 8,24% dan tahun 2026 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 9,10%.
9. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan semakin gencarnya pelaksanaan program-program pembangunan daerah, maka diharapkan akan dapat mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pacitan. Pada tahun 2011, TPT diperkirakan mencapai 0,87%, tahun 2016 TPT turun menjadi 0,75%, tahun 2021 TPT turun menjadi 0,63%, dan tahun 2026 TPT turun menjadi 0,54%.
10. Permasalahan makro yang diperkirakan di masa mendatang akan juga mengalami penurunan adalah masalah kemiskinan. Di masa mendatang tingkat kemiskinan diperkirakan akan semakin turun. Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan diperkirakan mencapai 18,20%, tahun 2016 tingkat kemiskinan turun menjadi 14,25%, tahun 2021 tingkat kemiskinan turun menjadi 10,5%, dan tahun 2026 tingkat kemiskinan turun menjadi 6,75%.
11. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan volume perekonomian Kabupaten Pacitan, maka diperkirakan akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikatornya dapat dilihat melalui peningkatan PDRB per kapita. PDRB per kapita di Kabupaten Pacitan diperkirakan akan mengalami kenaikan. PDRB per kapita tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp. 5,7 juta, tahun 2011 sebesar

Rp. 6,3 juta, tahun 2021 sebesar Rp. 6,8 juta, dan pada tahun 2026 sebesar Rp. 7,3 juta.

12. Semakin berkembangnya pariwisata dan perekonomian secara keseluruhan, diharapkan akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan. PAD Pacitan tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp. 34 Milyar, tahun 2016 sebesar Rp. 45 Milyar, pada tahun 2021 sebesar Rp. 65 Milyar, dan tahun 2026 sebesar Rp. 94 Milyar.
13. Terjadinya perubahan tata ruang Kabupaten Pacitan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya industri, dapat menyebabkan peningkatan konversi lahan, sehingga berpengaruh pada penyempitan kawasan konservasi alam, ketersediaan air tanah dan menyempitnya lahan pertanian.
14. Sektor pertanian akan tetap menjadi primadona jika didukung oleh sektor industri yang berbasis pada pertanian (agroindustri dan agrobisnis).
15. Tuntutan masyarakat (termasuk perempuan) akan semakin tinggi untuk dilibatkan dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan pembangunan.
16. Adanya berbagai alternatif sumber pembangunan yang tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga dari masyarakat maupun swasta melalui berbagai skema pembiayaan.
17. Masyarakat Pacitan dengan nilai-nilai budaya yang positif yaitu gotong royong, kerja keras, dan tidak kenal menyerah harus dipertahankan dalam jangka panjang dan merupakan "modal sosial" sebagai peluang dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial (termasuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kesetaraan gender) akan berhasil sepanjang mendapatkan dukungan dari semua *stakeholders*, sehingga pada tahun 2026 kesejahteraan sosial masyarakat semakin meningkat yang ditandai dengan menurunnya PMKS.
18. Pada tahun 2026 diprediksikan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan semakin menurunnya angka kematian bayi, angka kematian kasar, angka penderita anemia ibu hamil, angka penderita anemia balita, dan angka penderita kurang energi kronis WUS.
19. Diharapkan pada Tahun 2026 pelayanan kesehatan semakin meningkat, adanya jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara gratis sehingga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta mendukung tercapainya peningkatan umur

- harapan hidup di atas 75 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Maka perlu dipertimbangkan jaminan layanan sosial, seperti: panti jompo.
20. Pada tahun 2026 diprediksikan adanya peningkatan angka indeks pembangunan manusia (IPM) seiring dengan keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia, kesehatan dan ekonomi.
 21. Jumlah sekolah kejuruan menengah pada tahun 2026 diprediksikan akan meningkat, sehingga lulusan sekolah telah siap untuk memasuki pasar kerja. Demikian pula pada saat ini akan terjadi adanya peningkatan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang dan jalur pendidikan, menurunnya angka putus sekolah pada semua jenjang jalur pendidikan, adanya peningkatan kualitas hasil pendidikan serta adanya pemerataan wajib belajar 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun.
 22. Peningkatan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang dan jalur pendidikan sehingga kualitas SDM masyarakat semakin meningkat serta semakin tingginya angka melek huruf di Kabupaten Pacitan tahun 2026.
 23. Pada tahun 2026 diprediksikan adanya pergeseran nilai sosial, budaya dan politik seiring dengan derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Akulturasi budaya Jawa dengan budaya lain akan terus berlangsung, namun budaya Jawa akan terus eksis di masyarakat hanya perlu adanya penyesuaian-penyesuaian.
 24. Dinamika demokrasi politik lokal akan terus berkembang di Kabupaten Pacitan, terutama peran masyarakat sipil yang semakin strategis.
 25. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Pacitan masih perlu ditingkatkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas birokrasi yang profesional, efektif, efisien, bersih serta mampu memberikan pelayanan prima untuk kebutuhan masyarakat.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

Mendasar pada filosofi para *founding fathers* atau sesanti yang adiluhung dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Pacitan yaitu **"TATA PRAMANA HARGENG PRAJA"** yang secara kontekstual tertera dalam Peraturan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan, adalah merupakan tekad pemerintah dan masyarakat Pacitan untuk menciptakan pemerintahan yang arif, bijaksana serta mampu mengayomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tata tentrem kerto raharjo didalam wiiayah yang dipenuhi bukit-bukit. Penjabaran dari filosofi tersebut adalah sebagai berikut :

Berdasarkan filosofi tersebut, tata kelola pemerintah daerah dalam konteks pemberian pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Profesionalisme** secara substansif mengandung makna adanya rasa keterpanggilan dalam diri para penyelenggara pembangunan untuk berkarya kepada masyarakat dengan ikrar (*fateri/profiteri*) kesetiaan pada nilai luhur dan keahlian (*kompetensi*) yang tinggi. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Pacitan, ikrar (*profiteri*) itu didasarkan pada filosofi **"TATA PRAMANA HARGENG PRAJA"** di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur kebersamaan, integritas, kejujuran, penghormatan pada martabat manusia dan **HAM**, kesetaraan, wawasan lingkungan dan pelayanan.
- b. **Transparan**. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi terkait, seperti berbagai aturan, kebijakan pemerintah di berbagai kegiatan. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- c. **Akuntabilitas** adalah kewajiban memberikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban. Para pembuat keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik.

- d. Demokratisasi. warga masyarakat diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.
- e. Pelayanan Prima. Pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Dalam hal ini kepuasan masyarakat merupakan faktor penentu faktor keberhasilan bagi setiap organisasi (pemerintah) untuk tetap dapat diterima oleh masyarakat. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu dilaksanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Efektif dan efisien. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- g. Partisipatif. Setiap warga Pacitan mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip pembangunan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karenanya rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai kepada fase pemeliharaan.
- h. *Sustainable* (berkelanjutan) Penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat harus berdasarkan pada prinsip berkelanjutan. Pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini merupakan tindak lanjut dari program-program penyelenggaraan pemerintahan periode yang lalu. Demikian pula seterusnya pelaksanaan pembangunan saat ini akan berlanjut pada periode yang akan datang.

Sementara itu visi adalah sebuah kehendak luhur atau suatu angan-angan luhur tentang arah dan tujuan dari suatu entitas. Apabila dikaitkan dengan suatu pemerintahan, maka visi adalah angan-angan luhur dari entitas pemerintahan tentang arah dan tujuan dari pemerintahan. Berpijak pada kondisi Kabupaten Pacitan saat ini, memperhitungkan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang, mempertimbangkan potensi Kabupaten Pacitan, serta memperhatikan Visi Pembangunan Nasional 2005-2025, maka Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2005–2025 adalah:

**“Kabupaten Pacitan Yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman,
Sejahtera yang Menjunjung Nilai-nilai Agama dan Budaya”**

Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2005 - 2025 dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan pembangunan ini, Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan dijadikan pijakan sekaligus tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan yang mandiri, didalamnya terkandung penaertian maju mempunyai arti bahwa daerah memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam membangun kemandirian ini mutlak harus dibangun kemampuan daya saing daerah. Kemandirian ini tercermin antara lain pada ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, kemampuan aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari sumberdaya lokal yang semakin kuat, dan pengelolaan potensi sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan (berwawasan lingkungan) , sehingga mengurangi ketergantungan sumberdaya dari daerah lain, serta kemampuan membangun jaringan kerjasama untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah.

Kabupaten Pacitan yang berdaya saing memiliki arti bahwa setiap kegiatan ekonomi dan pemerintahan dapat dilakukan secara efisien. Dengan demikian, setiap produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pacitan dapat bersaing, baik pada level lokal regional, nasional, bahkan internasional. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat pemerintahan atau swasta, dilakukan atas dasar efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi. Sedangkan setiap produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga produk dari Kabupaten Pacitan bisa bersaing di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Berdaya saing dimaksudkan disegala aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Kabupaten Pacitan yang aman didalamnya terkandung penaertian adil, memiliki arti bahwa setiap aktivitas kehidupan masyarakat dan pemerintahan memiliki kedudukan hukum yang sama, sehingga seluruh

aktivitas yang dilakukan mendapatkan jaminan keadilan dan rasa aman, baik secara fisik maupun non-fisik. Ke depan Kabupaten Pacitan menjadi daerah yang aman dan nyaman untuk investasi, aktivitas perekonomian, penyeienggaraan pemerintahan dan segenap aktivitas kehidupan bermasyarakat lainnya. Aman juga diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, dan fasilitas publik lainnya.

Kabupaten Pacitan yang sejahtera memiliki arti bahwa prinsip kesejahteraan harus menjadi landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Pacitan. Hal ini bermakna, setiap kegiatan dan produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan harus bisa menciptakan masyarakat Kabupaten Pacitan yang sejahtera secara materiil dan non-materiil. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi masyarakat di wilayah lainnya.

Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat dan pemerintahan harus menjunjung nilai-nilai agama dan budaya memiliki arti nilai-nilai agama dan budaya mampu menjiwai aktivitas di segala aspek kehidupan, dalam rangka terwujudnya karakter warga Kabupaten Pacitan yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang bercirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, jujur, toieran, bergotong royong, dinamis, dan terbuka terhadap segala perubahan. Serta bertujuan memperkokoh budaya masyarakat yang tercermin pada peningkatan martabat, kepribadian, dan jati diri masyarakat Kabupaten Pacitan.

4.2 Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional yang diwujudkan dalam bentuk produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan di atas, misi

merupakan cerminan segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi.

Adapun Misi Kabupaten Pacitan 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Pacitan yang berdaya saing, berakhlak, berpendidikan, berdaya, Inovatif dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (AgroIndustri), Kelautan dan Pariwisata, dicapai dengan cara peningkatan produksi pasca panen pada sektor industri pertanian, peningkatan hasil laut dan pengolahannya, serta menumbuhkembangkan pelayanan jasa pariwisata yang kompetitif dengan didukung antara lain oleh peningkatan peran UMKM dan usaha lainnya.
3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil dicapai dengan cara pembangunan sarana dan prasarana daerah yang handal dan terintegrasi sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi, menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
4. Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya dicapai dengan cara peningkatan stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban, konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM, jaminan mengemukakan pendapat, berorganisasi, dan berpolitik serta terjaminnya keleluasan segenap aktivitas kehidupan bermasyarakat yang bertanggungjawab.
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan dicapai dengan cara adalah menyeienggarakan pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dicapai dengan cara membangun transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung profesionalisme aparatur.

Misi merupakan penjabaran dari visi, pada uraian berikut ini akan disampaikan urutan secara sistematis pencapaian visi melalui misi-misi yang telah disampaikan.

Kabupaten Pacitan yang Mandiri akan terwujud jika masyarakat Kabupaten Pacitan berupaya mengisi kemerdekaan dengan sikap mandiri, berbuat mandiri, dan membangun secara mandiri.

Kabupaten Pacitan yang ber-*Daya Saing Daerah* akan dapat terwujud jika didukung oleh moral dan etika masyarakat serta aparatur daerah yang mulia. Moral dan etika yang mulia ini akan dapat tercapai jika nilai-nilai agama dan budaya dipahami dan diimplementasikan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat pemerintahan. Selain itu, daya saing daerah akan dapat dimiliki oleh Kabupaten Pacitan jika didukung pula oleh pemerintahan yang baik dengan berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*, kualitas sumberdaya manusia yang handal, serta didukung pula oleh infrastruktur daerah yang berkualitas.

Kabupaten Pacitan yang Aman akan terwujud jika unsur-unsur di dalam pencapaian daya saing daerah dapat terpenuhi. Rasa aman ini lebih menitikberatkan pada jaminan bagi kelancaran dan kemudahan terhadap segenap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap masyarakat akan memiliki rasa aman terhadap pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan, sehingga tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan oleh pemerintah. Setiap masyarakat akan merasa aman untuk melakukan setiap aktivitas perekonomian, misalnya investor mendapat jaminan kepastian hukum untuk berinvestasi, tenaga kerja mendapatkan perlindungan hukum, pasokan energi dan air bersih yang cukup. Selain itu, masyarakat dijamin untuk bebas mengemukakan aspirasi politik, jaminan untuk aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mengembangkan budaya, beribadah sesuai dengan agamanya, dan jaminan dalam segenap aktivitas kehidupan dalam rangka menuju pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pacitan yang sejahtera akan terwujud jika didukung oleh unsur daya saing daerah dan rasa aman untuk beraktivitas di segala aspek kehidupan terpenuhi. Kedua unsur tersebut akan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan sehingga masyarakat akan terpenuhi hak-hak dasarnya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Kabupaten Pacitan yang sejahtera juga

memberikan garansi bagi kesejahteraan generasi di masa yang akan datang melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Kabupaten Pacitan yang mandiri, berdaya saing, aman, dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Pacitan yang mandiri, berdaya saing, aman dan sejahtera, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

A. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya, ditandai oleh hal-hal berikut :

1. Terwujudnya karakter masyarakat Pacitan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral yang menjunjung nilai-nilai agama dan budaya yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat Pacitan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berkembang dinamis dan berorientasi iptek;
2. Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat masyarakat Pacitan, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

B. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (AgroIndustri), Kelautan dan Pariwisata, ditunjukkan oleh hal-hal berikut :

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lain, dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti

luas, kelautan dan pariwisata yang menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri yang berdaya saing serta meningkatnya peranan sektor jasa.

C. Terwujudnya Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil, ditandai dengan hal-hal berikut :

1. Terwujudnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi, terpenuhinya pasokan energi sesuai dengan kebutuhan dan terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air,
2. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;
3. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
4. Terwujudnya ruang wilayah Pacitan sebagai Kabupaten yang mandiri, berdaya saing, aman, sekahtera.

D. Terwujudnya Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya, ditandai dengan hal-hal berikut :

1. Terwujudnya keamanan daerah yang menjamin martabat kemanusiaan dan keselamatan masyarakat dari gangguan keamanan baik dari luar daerah maupun dalam daerah;
2. Terciptanya supremasi dan penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat dan jabatan dan terciptanya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik;
4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan;

E. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan, ditunjukkan oleh hal-hal berikut :

1. Semakin baiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihan lingkungan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi;

2. Terpeliharanya kekayaan keragamaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing serta modal pembangunan daerah;
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan;

F. Terwujudnya Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*, ditunjukkan oleh hal-hal berikut :

1. Meningkatnya profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dan bertanggungjawab serta profesional yang mampu mendukung pembangunan daerah;
2. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan yang dapat diukur dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri;
3. Terwujudnya ketertiban sosial melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif;
4. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang mantap sehingga mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Untuk Masing-Masing Misi

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pacitan 2005-2025 adalah arahan-arahan umum untuk menunjang perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 20 tahun ke depan. Untuk memudahkan dalam menentukan arah pembangunan dan mampu menjangkau segenap aspek kehidupan, maka arah pembangunan di Kabupaten Pacitan 20 tahun diarahkan melalui strategi Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) Pacitan pada sasaran-sasaran sebagai berikut :

A. Arah Kebijakan Misi Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya, meliputi :

1. Pembangunan Pendidikan diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat dan outputnya dapat terserap dalam lapangan kerja.
2. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.
3. Pembangunan Kependudukan diarahkan pada terwujudnya keluarga sejahtera dan pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan.
4. Pembangunan Ketenagakerjaan, diarahkan pada terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan buruh serta penciptaan tenaga kerja yang berkualitas.
5. Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan pada peningkatan harkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga dapat berdaya dan memiliki akses untuk melakukan mobilitas ke peningkatan kualitas kehidupan.
6. Pembangunan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas generasi muda, yang memiliki karakter dan wawasan kebangsaan (nation building) serta beretika bangsa Indonesia.
7. Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dan perlindungan anak dalam rangka menjamin pemenuhan dan perlindungan hak serta tumbuh kembang anak.

8. Pembangunan dan Pematapan Jatidiri Bangsa diarahkan pada terwujudnya karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
9. Penanggulangan Kemiskinan diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan kemudahan untuk melakukan akses terhadap peningkatan kualitas hidup berbasis keluarga.
10. Pembangunan Kehidupan Beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, pembentukan akhlak mulia, memupuk etos kerja dan menghargai prestasi.
11. Pengembangan Kebudayaan diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.

Indikator keberhasilan misi ini ditandai dengan meningkatnya angka melek huruf, meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS); meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup; menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi; menurunnya prevalensi kurang gizi, menurunnya jumlah PMKS; terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, perluasan lapangan kerja; meningkatnya produktifitas tenaga kerja, menurunnya Angka Kemiskinan, menurunnya konflik umat beragama, dan menurunnya angka kriminalitas dengan rencana tahapan pencapaian sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi I

No	Indikator Keberhasilan	Target Capaian			
		Tahap I (2006-2011)	Tahap II (2011-2016)	Tahap III (2016-2021)	Tahap IV (2021-2026)
1	Angka melek huruf (%)	98,58	96,65	96,71	96,77
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
	- APK PAUD	44	59	68	75
	- APK TK	45	56	67	80
	- APK SD/MI/PAKETA	103	103	103	103
	- APK SMP/MTs/PAKET B	97,4	98	99	100
	- APK SMA/SMK/MA/PAKET C	68	75	82	95
	- APM SD/MI/PAKET A	98,99	99	99,5	99,9
	- APM SMP/MTs/PAKET B	82	88	94	99,9
	- APM SMA/SMK/MA/PAKET C	54	84	76	90
3	Usia harapan hidup (tahun)	71,11	71,32	71,53	71,76
4	Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran)	< 4	< 4	< 4	< 4
5	Angka kematian bayi (per 100.000 kelahiran)	< 50	< 50	< 56	< 56
6	Jumlah PMKS (orang)	80.781	70.265	61.119	53.152

7	Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,028	0,030	0,032	0,035
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,87	0,75	0,63	0,54
9	Produktivitas PDRB TK	12.420.273	39.632.860	126.467.719	403.656.134
10	Angka Kemiskinan (%)	18,20	14,25	10,5	6,75

Sumber Data : Hasil Proyeksi

B. Arah Kebijakan Misi Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (AgroIndustri), Kelautan dan Pariwisata, meliputi :

1. Penguatan Struktur Perekonomian diarahkan pada pembangunan struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada keunggulan kompetitif sektor primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier yang diarahkan pada pemantapan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Penguatan Struktur Industri, diarahkan pada pengembangan sektor agroIndustri berbasis Industri kecil dan menengah melalui peningkatan kemitraan yang sejajar dengan usaha-usaha ekonomi lokal
3. Revitalisasi Pertanian, diarahkan pada peningkatan standarisasi produk hasil pertanian, ketersediaan input produksi pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur pertanian, peningkatan kelembagaan petani, dan berkembangnya berbagai skim pembiayaan untuk usaha pertanian.
4. Peningkatan Ketahanan Pangan, diarahkan pada peningkatan ketersediaan pangan baik beras maupun non beras menuju terciptanya kemandirian pangan, dan peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) menuju ke tingkat yang ideal.
5. Peningkatan Investasi dan Perdagangan diarahkan pada peningkatan kepastian usaha, menjaga hak kepemilikan lahan dan penciptaan regulasi yang mendorong berkembangnya usaha, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, dan penyederhanaan sistem dan prosedur investasi.
6. Peningkatan Daya Saing Pariwisata diarahkan pada peningkatan dan penumbuhan kembali potensi pariwisata yang telah berkembang bersumber pada potensi alam dan budaya yang berwawasan lingkungan serta pelestarian budaya, peningkatan kuantitas dan varietas potensi unggulan pariwisata dan diversifikasi produk pelayanan pariwisata, pemberdayaan dan pengembangan pemasaran pariwisata terpadu, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, dan meningkatkan sosialisasi dan promosi wisata.

7. Peningkatan Daya Saing Industri diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas dari setiap produk industri, pengembangan IMKM sehingga dapat melakukan peran yang setara dengan industri besar, mendorong investasi baru yang diarahkan pada industri yang berorientasi ekspor.
8. Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan diarahkan pada penciptaan pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia, kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan teknologi.
9. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
10. Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan dan Perbankan diarahkan pada peningkatan peran lembaga keuangan dan perbankan dalam pengembangan industri berbasis pertanian, kelautan dan pariwisata melalui penyediaan permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Indikator keberhasilan misi ini yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya ketersediaan pangan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya PDRB per kapita dan indeks nilai tukar petani/NTP dan menurunnya angka pengangguran serta kemiskinan dengan rencana tahapan pencapaian sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi II

No	Indikator Keberhasilan	Target Capaian			
		Tahap I (2006-2011)	Tahap II (2011-2016)	Tahap III (2016-2021)	Tahap IV (2021-2026)
1	PDRB Perkapita (Rp)	5.781.065,28	6.311.155,60	6.841.245,92	7.371.336,24
2	NTP	116,71	120,61	124,50	128,40
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,52	7,38	8,24	9,10

Sumber Data : Hasil Proyeksi

C. Arah Kebijakan Misi Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil, meliputi :

1. Pembangunan Transportasi diarahkan pada peningkatan jaringan transportasi berbasis zona – zona ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, penanganan ruas

jalan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala, peningkatan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas, peningkatan sistem jaringan jalan lintas yang mendukung kebutuhan industri dan kawasan strategis potensial, peningkatan profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan, peningkatan peran serta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan.

2. **Pengelolaan Sumber Daya Air**, diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air permukaan yang memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan melakukan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, guna menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air bawah tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air, serta memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
3. **Pembangunan Perumahan dan Permukiman** diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni utamanya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah beserta pemenuhan sarana dan prasarana permukiman (air bersih, sanitasi, persampahan dan drainase), dengan membangkitkan potensi pendanaan dari berbagai sumber pembiayaan (pemerintah, swasta dan masyarakat) serta mengoptimalkan pemerataan persebaran penduduk serta pembangunan.
4. **Pengembangan Wilayah**, diarahkan pada terwujudnya percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah didukung infrastruktur ekonomi dalam menopang realisasi pemerataan pembangunan melalui percepatan pembangunan kawasan strategis, pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
5. **Penyelenggaraan Penataan Ruang** diarahkan bagi terwujudnya ruang wilayah Pacitan sebagai Kabupaten yang mandiri, berdaya saing, aman, sekahtera. Dalam rangka mendukung hal itu maka sinergi dengan RTRW Kabupaten Pacitan merupakan kesatuan perencanaan pembangunan daerah yang tak bisa dipisahkan.

6. Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi diarahkan pada peningkatan kualitas SDM di bidang teknologi informasi, peningkatan peran media untuk pemeratakan dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan , peningkatan peran media massa dan cyber-media sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif, peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam mengembangkan media telekomunikasi dan informasi, serta meningkatkan upaya-upaya pencegahan dampak negatif atas pemanfaatan teknologi informasi.

Indikasi dari keberhasilan misi ini, ditandai dengan meningkatnya status kemantapan jalan, meningkatnya cakupan pelayanan sarana prasarana, dasar lingkungan permukiman dan perumahan, dan berkurangnya ketimpangan antar wilayah dengan rencana tahapan pencapaian sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi III

No	Indikator Keberhasilan	Target Percepatan			
		Tahap I (2006-2011)	Tahap II (2011-2016)	Tahap III (2016-2021)	Tahap IV (2021-2026)
1	Kondisi Jalan (m)				
	- Baik	760.970	1.095.322	1.576.578	2.269.288
	- Sedang	232.672	334.902	482.050	693.850
	- Rusak	103.746	149.330	214.942	309.382
	- Macadam	74.694	107.513	154.752	222.746
	- Tanah	62.284	75.256	108.322	155.916
2	Cakupan Pelayanan Air Bersih (jiwa)	218.100	313.928	451.860	650.398
3	Rumah Layak Huni (rumah)	114.764	165.188	237.767	342.236
4	Cakupan Jaringan Listrik (SR)	79.801	114.864	165.332	237.975

Sumber Data : Hasil Proyeksi

D. Arah Kebijakan Misi Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya, meliputi :

1. Penyempurnaan Struktur Politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi, optimalisasi kinerja lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan, meningkatkan kemampuan mengelola daerah secara baik dan bersih sebagai perwujudan kebijakan otonomi daerah serta konsolidasi dengan lembaga-lembaga di masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Proses Politik yang diarahkan pada peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik; mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa,

keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

3. Peningkatan Peranan Komunikasi dan Informasi yang diarahkan pada mewujudkan kebebasan pers yang bertanggungjawab dan tedembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara, mewujudkan pemerataan informasi dengan mendorong munculnya media-media massa lokal yang independen; menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik; menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh *link* informasi yang ada untuk memudahkan proses sosialisasi dan transparansi kebijakan;
4. Penataan Peran Pemerintah dan Masyarakat yang diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam proses politik, pemerintahan dan pembangunan, peningkatan ketaatan terhadap hukum, pembentukan kemandirian ekonomi masyarakat, penguatan pelaku ekonomi (kecil dan menengah) serta peningkatan tanggungjawab sosial.
5. Pembangunan Keamanan dan Ketertiban diarahkan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan ditegakkannya tatanan sosial kemasyarakatan serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Indikator keberhasilan misi ini, ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi, meningkatnya jumlah organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi pemuda dan organisasi masyarakat lainnya dan meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi IV adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi yang diindikasikan dengan prosentase pada Pembangunan Tahap I (2006-2011) sebesar 67,69 % - 70% , Pembangunan Tahap II (2011-2016) sebesar 70 % - 73 % , periode Pembangunan Tahap III (2016-2021) sebesar 73 % - 76 % , dan periode Pembangunan Tahap IV (2021-2026) sebesar 76 % - 60 %.
2. Peningkatan persentase jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda dan Organisasi Masyarakat lainnya yang dibina pada Pembangunan Tahap I (2006-2011) sebesar 7,19 % - 14 %,

periode Pembangunan Tahap II (2011-2016) sebesar 14 % - 19 %, periode Pembangunan Tahap III (2016-2021) sebesar 19 % - 26 %, dan periode Pembangunan Tahap IV (2021-2026) sebesar 26 % - 33 %.

3. Peningkatan persentase Keberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban lingkungan yang diindikasi dengan rasio linmas inti per 10.000 penduduk pada Pembangunan Tahap I (2006-2011) sebesar 56,25 % - 61 % , periode Pembangunan Tahap II (2011-2016) sebesar 61% - 65 %, periode Pembangunan Tahap III (2016-2021) sebesar 65 % - 68 %, dan periode Pembangunan Tahap IV (2021-2025) sebesar 68 % - 70 %.

E. Arah Kebijakan Misi Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan, meliputi :

1. **Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) Terbarukan**, diarahkan untuk memberikan prioritas utama pada kepentingan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat, eksploitasi SDA yang mempertimbangkan kepentingan penduduk lokal, kestabilan daya dukung alam dan reklamasi paska eksploitasi;
2. **Pendayagunaan Sumber Daya Alam Tak-Terbarukan** diarahkan pada pemenuhan kepentingan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan penduduk lokal, kestabilan daya dukung alam dan reklamasi paska eksploitasi yang dilakukan secara benar;
3. **Pengembangan Energi** diarahkan untuk mewujudkan pemerataan dan pemenuhan distribusi energi serta penciptaan energi-energi utama yang bersumber dari energi terbarukan yang ramah lingkungan
4. **Pemantapan Kawasan Lindung** diarahkan pada pemantapan kelembagaan pengelolaan kawasan lindung, peningkatan konservasi lahan dan peningkatan kerjasama dengan lembaga yang berkompeten dan profesional dalam pengelolaan kawasan lindung;
5. **Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan** diarahkan pada penuntasan rehabilitasi pada slsa lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dan meningkatkan jaminan tidak adanya lahan kritis baru, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan;
6. **Peningkatan Konservasi di Kawasan Budidaya** diarahkan pada peningkatan penerapan langkah-langkah konservasi oleh masyarakat di kawasan budidaya, peningkatan pengaturan dan penegakan ketentuan

konservasi di kawasan budidaya, peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya dalam bentuk hutan kota, dan internalisasi etika konservasi kepada masyarakat

8. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan dalam kegiatan pembangunan ekonomi, sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
9. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, diarahkan pada peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan sumber daya manusia, dan penanaman nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan;
10. Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup, diarahkan pada penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup.
11. Penanganan Bencana diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam mitigasi, penanganan tanggap darurat dan paska bencana.

Indikasi dari keberhasilan misi ini ditandai dengan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup; meningkatnya sumberdaya alam hayati termamfaatkan dan diolah untuk industri; meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik dengan sumber energi konvensional dan terbaharukan, menurunnya lahan kritis akibat eksploitasi sumberdaya alam dan meningkatnya lahan yang ditangani dengan rencana tahapan pencapaian sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 5.4
Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi V

No	Indikator Keberhasilan	Target Capaian			
		Tahap I (2006-2011)	Tahap II (2011-2016)	Tahap III (2016-2021)	Tahap IV (2021-2026)
1	Lahan kritis (Ha)	23.233,00	22.248,73	21.264,45	20.280,18
2	Lahan yang ditangani (Ha)	1.795	1.935	2.075	2.215

Sumber Data : Hasil Proyeksi

F. Arah Kebijakan Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government, meliputi :

1. **Pembangunan Hukum** diarahkan untuk mewujudkan ketertiban sosial melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif, penciptaan konstruksi hukum yang memberi peluang dan perlindungan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusionalisme, hak-hak asasi manusia, dan hukum yang berkeadilan.
2. **Penyelenggaraan Pemerintahan** diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mantap sehingga mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. **Pembangunan Politik** diarahkan untuk dapat menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis melalui pelembagaan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, kesantunan sosial, dan budaya Indonesia, hak-hak azasi manusia, dan mengutamakan kepentingan kedaulatan bangsa serta tetap utuh-teguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Pembangunan Komunikasi dan Informasi** diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi serta menjamin hak masyarakat luas untuk mendapatkan informasi yang transparan menuju proses pencerdasan
5. **Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur** diarahkan pada peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah, peningkatan kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan, peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja, peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; peningkatan kesejahteraan aparatur daerah melalui pola remunerasi berbasis sistem kinerja baik individual maupun Instansi, peningkatan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, mewujudkan netralitas birokrasi dalam kehidupan politik, peningkatan pemanfaatan teknologi Informasi termasuk pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan,

pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah; dan penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan.

6. Pembangunan Keuangan Daerah diarahkan pada kemandirian keuangan daerah melalui penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, efisien dan efektif (*value for money*).

Indikator dari keberhasilan misi ini ditandai meningkatnya pelayanan publik, menurunnya kerugian negara, meningkatnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya angka kriminalitas, meningkatnya pendapatan asli daerah serta meningkatnya peranan swasta dalam pembiayaan pembangunan dengan rencana tahapan pencapaian sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 5.5
Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi VI

No	Indikator Keberhasilan	Target Capaian			
		Tahap I (2006-2011)	Tahap II (2011-2016)	Tahap III (2016-2021)	Tahap IV (2021-2026)
1	PAD (Rp.000)	34.384.121	41.030.501	54.908.066	73.479.378
2	Realisasi Investasi				
	- PMA (Rp.000)	74.659.500	124.075.750	173.492.000	222.908.250
	- PMDN (Rp.000)	21.600.000	39.600.000	67.600.000	75.600.000
3	Jumlah PNS	10.196	10.696	11.446	11.946
4	Tingkat pendidikan formal aparaturnya				
	- D3/D4/S1	4.541	6.226	7.911	9.596
	- S2	250	350	450	550
	- S3	1	2	3	4

Sumber Data : Hasil Proyeksi

5.2 Pendanaan Pembangunan Daerah

A. Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah

Kebijakan pendanaan pembangunan daerah diarahkan dengan memanfaatkan kemampuan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (*value for money*) melalui optimalisasi penerimaan daerah baik bersumber intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pendanaan pembangunan, optimalisasi lembaga keuangan mikro serta zakat.

B. Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah

1. Optimalisasi Penerimaan Daerah

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui upaya intensifikasi pajak maupun retribusi daerah dengan optimalisasi asset daerah, optimalisasi BUMD serta optimalisasi petayanan. Sementara itu upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan sumber-sumber pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat, mengoptimalkan skema-skema bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Pacitan.

b. Optimalisasi Penerimaan Pembiayaan melalui Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD dalam keadaan defisit dan dilakukan dengan kecukupan DCSR (*Debt Coverage Service Ratio*), hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga kesehatan APBD secara lebih baik, sehingga tingkat pengembalian (*re-payment*) dapat berjalan dengan lancar. Pinjaman Daerah seperti diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan atau untuk menutup kekurangan kas. Pinjaman daerah sebagaimana pasal 7 PP 54 Tahun 2005 terdiri dari :

1. Pinjaman Jangka Pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai Proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

Sebagaimana klausul pada Pasal 8 PP 54/2005, pinjaman jangka pendek bersumber dari :

- 1) Pemerintah Daerah lain;
- 2) Lembaga Keuangan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- 3) Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Sedangkan pinjaman daerah jangka menengah dan jangka panjang bersumber dari Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan

APBN dan atau pengadaan pinjaman pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri serta Pemerintah Daerah lain

c. Obligasi Daerah

Pada era otonomi saat ini memberi peluang bagi pemerintah dan masyarakat daerah untuk lebih kreatif dan mulai mandiri dalam mengurus dan membangun rumah tangga daerahnya. Hal ini berarti secara operasional pemerintah daerah harus mampu melaksanakan tugas-tugas berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menyikapi kemampuan APBD yang terbatas dalam menyediakan dana pembangunan daerah, daerah perlu mencari dan memanfaatkan sumber dana pinjaman yang berasal dari masyarakat dan swasta lokal atau pinjaman yang berasal dari daerah yang lebih mampu salah satunya adalah obligasi.

Obligasi daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, salah satu unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, Badan Otorita Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak lain (swasta) yang didukung atau disponsori dan atau dijamin oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, obligasi tidak harus diterbitkan oleh pemerintah daerah, tetapi dapat juga diterbitkan oleh BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau kantor-kantor dinas yang ada di daerah.

Beberapa macam obligasi daerah berdasarkan jenis pinjaman atas pengembalian hutang pokok dan bunganya terdiri dari :

- (1) Obligasi Umum (*General Bond*) yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membiayai investasi dengan jaminan atas pembayaran kembali utang pokok dan bunganya adalah seluruh penerimaan pemerintah daerah tanpa tranfer;
- (2) Obligasi pendapatan (*Revenue Bond*) yaitu obligasi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah daerah atau BUMD untuk membiayai suatu proyek tertentu. Jaminan pembayaran kembali hutang pokok dan bunganya akan berasal dari penerimaan proyek tersebut ; dan
- (3) Obligasi Baralled atau *Hybrid Obligation* yaitu obligasi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah daerah atau BUMD untuk

membiayai suatu proyek tertentu. Jaminan pembayaran kembali hutang pokok dan bunganya akan berasal dari penerimaan daerah dan penerimaan proyek tersebut.

Selain perlu kepercayaan dari masyarakat, lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha serta semakin efisiennya penyelenggaraan pemerintah daerah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan obligasi antara lain adalah :

- a) Mempersiapkan regulasi dan prosedur penerbitan obligasi daerah;
- b) Mempersiapkan saluran distribusi atau outlet yang akan digunakan untuk melayani transaksi jual beli obligasi daerah ;
- c) Membuat kriteria tentang proyek-proyek yang layak didanai dengan penerbitan obligasi daerah ;
- d) Membuat mekanisme pengawasan penerbitan obligasi daerah
- e) Mendapatkan persetujuan dari DPRD ;
- f) Analisa kemampuan pinjam;
- g) Analisa IRR ;
- h) Analisa biaya hutang (*cost of debt*).

2. Efisiensi dan efektivitas Pendanaan Pembangunan.

a. Memperkuat dan Memperluas kemitraan (*Public-Private Partnership*)

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Di negara berkembang saat ini peningkatan sektor perekonomian peran swasta semakin meningkat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat dan memperluas kemitraan atau kerjasama. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh pihak yang saling berkerjasama yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat adalah :

- 1) Perumusan model kemitraan yang paling tepat dilakukan ;
- 2) Perumusan kriteria mitra yang potensial sebagai mitra pemerintah;
- 3) Membangun model kemitraan yang efektif ; kerjasama antar pemerintah-pemerintah Kabupaten dan Provinsi, Pemerintah Daerah dengan swasta, Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan antar swasta dengan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan.

4) Kemitraan/kerjasama dapat dilakukan melalui berbagai model, antara lain : Leases and Concession (LO), Built Operations and Transfer (BOT), atau Public-Private Partnership.

b. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen suatu perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekitarnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada yang dilakukan tepadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Pelaksanaan CSR di dasarkan pada Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pada pasal 74 dinyatakan bahwa perseroan wajib melaksanakan CSR bila tidak, perusahaan akan dikenal sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan perusahaan yang tidak menyentuh sama sekali dengan sumber daya alam boleh melaksanakan CSR dengan suka rela.

Dengan mempertimbangkan program-program pembangunan di Kabupaten Pacitan, maka diharapkan adanya pemaduan program CSR dengan program pemerintah sehingga diharapkan implementasi program CSR mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di Pacitan.

Potensi CSR cukup besar dan efektivitas pemanfaatan CSR dapat dilakukan melalui sinkronisasi dan integrasi pola pendanaan obyek kegiatan dalam hal sinkronisasi waktu pelaksanaan, urusan dan lokasi yang akan didanai serta jangka waktu penanganan obyek/target group.

c. Pendanaan Pembangunan dengan pola cost sharing antara Pemerintah Pusat - Provinsi - Kabupaten/Kota (Government to Government Partnership)

Pola pembiayaan model Cost Sharing ini dilakukan melalui kesepakatan pengalokasian belanja antara Pemerintah Pusat - Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Konsep ini mengoptimalkan efektivitas belanja yang potensinya terbatas serta mengoptimalkan perluasan cakupan target group.

d. Mengembangkan Privatisasi/Swastanisasi

Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan meletakkan sektor swasta sebagai "the Engine of growth" dan mengurangi peran sektor publik dengan memberi peluang seluas-luasnya (catalytic government) peran investasi swasta/masyarakat untuk sektor usaha yang full cost recovery. Dalam rangka mendorong dan mengembangkan privatisasi/swastanisasi pelayanan umum (di bidang-bidang yang secara efisien dikelola sektor swasta).

Langkah-langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah :

- 1) Penyusunan kriteria privatisasi secara transparan;
- 2) Mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan yang dikerjakan oleh Pemerintah dan jenis pekerjaan yang dapat dilimpahkan pada swasta;
- 3) Meningkatkan dan memperluas keikutsertaan peran swasta untuk membangun prasarana dan sarana pelayanan.

Privatisasi yang dapat dikembangkan antara lain dalam pengelolaan Perpajakan, Persampahan, Limbah Manusia/Tinja, Air Bersih dan Tempat Pariwisata/Rekreasi yang dapat sepenuhnya dilakukan oleh pihak swasta.

Untuk mendukung kegiatan dalam menunjang sektor swasta dalam pembangunan diperlukan langkah-langkah antara lain :

- 1) Pemerintah Daerah membuat system peraturan perundangan (yang berkaitan dengan pemberian izin-izin usaha, lokasi, investasi) yang konsisten, mudah dilaksanakan, dan terbuka ;
- 2) Membenahi kualitas pelayanan di lingkungan organisasi pemerintah dengan menetapkan standar pelayan dengan prinsip : kesederhanaan dan ketetapan waktu, kejelasan dan kepastian, keterbukaan dan penuh informasi, ekonomis dan efisiensi prosedur, keadilan dan keamanan :
- 3) Membentuk Unit Pelayanan Umum dan Perizinan Terpadu (pelayanan dalam satu atap) ;
- 4) Peningkatan kinerja birokrasi : penerapan inovasi berupa perampingan birokrasi, peningkatan SDM, profesionalitas aparatur
- 5) Database yang up to date mengenai kebijakan dan peta potensi daerah yang berkaitan dengan kawasan, sarana prasarana, kegiatan yang akan dilakukan privatisasi atau kerjasama dan siap untuk di akses melalui internet.

- e. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh Swasta dan Masyarakat

Langkah ini diarahkan untuk mobilisasi potensi swasta dan masyarakat untuk pendanaan kegiatan pembangunan melalui penciptaan kerangka regulasi yang merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah sebagai penyediaan insentif kebijakan non fiskal.

- f. Efektivitas dan Efisiensi Belanja APBD.

Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan belanja diarahkan pada upaya untuk mengakomodasikan pelayanan sosial dasar dan menstimulasi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Prioritas urusan dilakukan melalui belanja langsung pada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Desa maupun masyarakat dialokasikan melalui Belanja Bantuan Keuangan dan atau Belanja Bantuan Hibah maupun Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan dan prioritas program yang ditetapkan.

3. Optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro baik Bank dan Non Bank diarahkan untuk mampu memberikan peran intermediasi di sektor riil di tingkat lokal pedesaan maupun kelompok marginal perkotaan. Kehati-hatian perbankan (Prudential Banking) yang menjadi standar operasional Bank Umum dan menjadi hambatan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan akan mampu diatasi oleh lembaga keuangan mikro ini. Kelembagaan keuangan mikro non Bank dapat diintroduksi dan diintensifkan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Unit Pengelola Keuangan (UPK) di desa/kelurahan, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP). Disamping itu kelembagaan keuangan mikro dapat pula diintroduksi sesuai dengan budaya lokal untuk memberikan peran intermediasi secara praktis, efektif dan mudah.

Strategi optimalisasi lembaga keuangan mikro adalah :

- a. Pengakuan dan perlindungan, hal ini diwujudkan melalui pengembangan kerangka regulasi bagi keuangan mikro ;
- b. Penguatan dan peningkatan kapasitas praktek dan pengelolaan;
- c. Penguatan dan peningkatan kapasitas sumberdaya finansial

4. Optimalisasi Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)

Zakat, Infak dan Shodaqoh merupakan salah satu sumberdaya masyarakat Pacitan yang sangat potensial untuk mampu memberikan peran dalam mendukung program-program Pemerintah Daerah. Alternatif sumberdaya dari ZIS tetap berada dalam koridor norma/kaidah-kaidah yang berlaku. Kelembagaan pengelola ZIS yang sudah ada, perlu dioptimalkan untuk memperluas cakupan pemberi/donor ZIS serta perluasan target group penerima. Dengan pola demikian, maka strategi sinkronisasi akan mampu mengoptimalkan peran belanja publik dan potensi ZIS masyarakat Pacitan.

5.3 Tahapan dan Prioritas

Untuk memberikan arahan pelaksanaan yang lebih jelas perlu ditentukan tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005 – 2025. Oleh karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari RPJPD, maka tahapan pelaksanaan RPJPD tersebut dituangkan dalam bentuk fokus pembangunan lima tahunan dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2025. Tahapan atau fokus pembangunan pada setiap periode harus menjadi panduan pokok kepala daerah pada periode bersangkutan dalam menyusun RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Adanya fokus pada setiap tahapan tidak berarti diabaikannya pembangunan di bidang lainnya. Hal itu semata-mata menunjukkan penekanan atau prioritas utama pembangunan pada setiap tahapan. Tahapan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Pembangunan tahap 1 (2006–2011) : Pemantapan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Sumberdaya manusia.** Pada tahapan ini sasaran pokok pelaksanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan infrastruktur wilayah yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Pacitan yang berkualitas tinggi khususnya yang ditunjukkan oleh indikator tingkat pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan, dan moralitas masyarakat serta aparatur pemerintahan daerah. Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur dasar jalan, jembatan, dan drainase, serta infrastruktur yang mendukung langsung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada industri pertanian, kelautan dan pariwisata.

- 2. Pembangunan tahap II (2011–2016) : Pemantapan Produktivitas dan Pemerataan Pembangunan Daerah.** Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan produktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi khususnya produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian, kelautan dan jasa pariwisata; mewujudkan pemerataan yang optimal dalam distribusi pelaksanaan dan pencapaian hasil pembangunan antar wilayah kecamatan dan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat; dan mewujudkan pembangunan wilayah yang seimbang sesuai dengan fungsi masing-masing wilayah. Peningkatan produktivitas yang pesat merupakan pendorong utama bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan sangat berpengaruh terhadap akselerasi pembangunan Kabupaten Pacitan pada tahap selanjutnya. Sedangkan pemerataan pembangunan merupakan tangga utama untuk mencapai masyarakat yang makmur dalam keadilan.
- 3. Pembangunan tahap III (2016–2021) : Pemantapan Kemandirian Masyarakat** Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Pacitan yang memiliki kemandirian tinggi dalam membangun kehidupannya. Kemandirian tersebut sebagai Implikasi dari berkembang pesatnya bidang pertanian, kelautan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan. Wujud kemandirian tersebut yang utama adalah rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah, tingginya daya beii, tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian masyarakat merupakan kunci bagi terwujudnya pembangunan yang digerakan oleh masyarakat, yaitu suatu situasi dimana masyarakat menjadi subjek pembangunan dalam arti yang sesungguhnya.
- 4. Pembangunan tahap IV (2021–2026) : Pemantapan Peran Daerah dalam Pembangunan Regional dan Nasional.** Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan peran daerah yang menonjol dalam pembangunan di Jawa Timur dan lingkup Nasional. Khusus dalam konteks regional Jawa Timur, hal yang akan diwujudkan adalah mendayagunakan seluruh sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang telah terbangun, khususnya di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata, sehingga menjadi Kabupaten berbasis industri pertanian, kelautan dan pariwisata yang paling diperhitungkan. Segenap pencapaian yang diraih pada tahapan sebelumnya menjadi pijakan yang didayagunakan semaksimal mungkin untuk menjadi Kabupaten yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera yang Menjunjung Nilai-nilai Agama dan Budaya

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

A. Kaidah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pacitan 2005 – 2025 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan dalam menyeienggarakan pembangunan selama 20 tahun ke depan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. RPJPD ini merupakan acuan bagi para calon Bupati Pacitan dalam merumuskan Visi dan Misi yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye.

Sebagai manifestasi dari kedudukannya sebagai pedoman, RPJPD Kabupaten Pacitan 2005 – 2025 selanjutnya harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan dalam periode jangka panjang tersebut.

Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Pacitan, fungsi RPJPD adalah sebagai pemandu dan sekaligus rambu-rambu yang menentukan arah jangka panjang pembangunan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Dengan kata lain, RPJPD Kabupaten Pacitan 2005 -2025 yang telah berhasil disusun ini bukan saja berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga sekaligus sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan berbagai program pembangunan Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan di setiap tahapan pembangunan jangka menengah

Keberhasilan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pacitan sangat ditentukan oleh pelaksanaan yang terarah, terpadu dan sinergis dari RPJPD 2005-2025. Oleh karena itu, implementasi dari RPJPD perlu didasarkan pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang tepat sebagai berikut :

1. **Integratif.** Arah pembangunan di semua bidang ditempuh sebagai kesatuan upaya dalam rangka menjalankan Misi untuk mencapai Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2025. Kaidah ini mengarahkan pelaksanaan pembangunan pada pola yang terpadu.
2. **Koordinatif.** Setiap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pacitan harus berkomunikasi satu sama lain dalam rangka sinkronisasi

- peran dan kegiatan guna mencapai kelancaran dan efektifitas pembangunan pada seluruh bidang.
3. Sinergis. Seluruh arah pembangunan ditempuh dalam kerangka saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain guna mencapai Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
 4. Partisipatif. Pelaksanaan pembangunan ditempuh berdasarkan peran serta seluruh unsur masyarakat dalam seluruh tahapan prosesnya. Sebagaimana berlangsung dalam proses penyusunan RPJPD, peran serta masyarakat luas juga menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena penyelenggaraan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan baru bisa berjalan jika dilaksanakan oleh seluruh unsur masyarakat sesuai dengan peran dan kapasitasnya.
 5. Adaptif. Pembangunan di masa mendatang akan semakin diwamai oleh lingkungan eksternal dan internal yang berubah cepat, kompleks, syarat konflik, dan penuh ketidakpastian. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan jangka panjang harus bersifat adaptif, yakni memperhatikan dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan pembangunan.
 6. Berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan jangka panjang ditempuh dengan menjamin kesinambungannya. Untuk itu keterkaitan dalam suatu urutan tahapan antar periode pembangunan harus selalu diutamakan dalam penjabaran RPJPD ini. Rencana dan implementasi pembangunan jangka pendek dan menengah pada periode sebelumnya harus memberikan prakondisi dan menjadi pijakan bagi pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka menengah pada periode selanjutnya.
 7. Terkendali. Pengendalian baik pada tahap proses maupun akhir dilakukan secara ketat untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan baik melalui mekanisme formal maupun melalui *kontrol sosial* yang dilakukan.

Dalam implementasinya RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan, sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan 20 tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025 diharapkan dapat berfungsi sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan visi, misi dan program pembangunan untuk penyusunan RPJM Daerah, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD.

2. Instrumen untuk menyusun perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan, serta terintegrasi dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Timur dan arah pembangunan nasional.
4. Acuan dalam memberikan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

B. Prasyarat

Dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Pacitan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD, tiga pilar Good Governance yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholders merupakan prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pacitan

Transparansi adalah adanya jaminan dan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi pembangunan yang direncanakan, sedang dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan. Transparansi tidak saja menuntut adanya obyektivitas, keterbukaan dan kejujuran, akan tetapi juga harus diimbangi dengan adanya sikap menerima berbagai kritik konstruktif dari masyarakat sebagai umpan balik untuk terus-menerus memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, sistem birokrasi, kualitas layanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Sedangkan akuntabilitas adalah kapasitas berbagai lembaga atau instansi pemerintah daerah untuk bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai tahap perencanaan, implementasi, sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Oleh karena itu akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat

mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standart yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan hasil perpaduan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan dan legitimasinya di mata rakyat.

Sedangkan, yang dimaksud partisipasi adalah perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran baru masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat atau objek pembangunan belaka, namun merupakan subjek dan agen pembangunan yang mempunyai posisi yang sentral, strategis dan penting. Tiga pilar Good Governance di atas, adalah "spirit" yang semestinya dimiliki dan menjadi dasar bagi seluruh pemangku-kepentingan dan stakeholders terkait untuk menjamin berbagai program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan benar – benar berjalan seperti yang diharapkan .

Keberhasilan pencapaian Visi Kabupaten Pacitan 2005 – 2025 melalui pelaksanaan Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, sangat tergantung pada komitmen dari kepemimpinan daerah, konsistensi kebijakan dan peran serta masyarakat, dan dunia usaha secara aktif .

BUPATI PACITAN



INDARTATO